



PELUANG
SIGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar
Inovasi Desa



LAPORAN AKHIR

PROGRAM AKADEMI KAMPUNG
SIGAP 3 TAHUN 2023

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa &
Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Berau
dan Kabupaten Kutai Timur



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS)	7
TUJUAN PROGRAM AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS)	10
A. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kampung/Desa	10
B. Penguatan Tata Kelola BUMK/BUMDes	10
C. Penguatan Ekosistem Kemandirian Kampung/Desa	10
SASARAN WILAYAH DAN PESERTA PROGRAM AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS)	12
PERIODE PELAKSANAAN PROGRAM AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS)	16
RINGKASAN KEGIATAN AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS)	24
A. Kegiatan Bersama Dalam Pelaksanaan Akademi Kampung Sigap	24
B. Resume Ruang Lingkup Kegiatan AKS #3	25
1. Kegiatan Assessment	25
2. Kegiatan Kelas Belajar Besar	35
3. Inisiasi Kampung Model	61
4. Desk Pembelajaran Khusus	63
5. Pendampingan Pasca Pelatihan / Monitoring Evaluasi	76
C. Lembaga yang Terlibat	80
CAPAIAN PROGRAM AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS) 3	82
RENCANA KERJA AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS) 4	90
A. Rekomendasi Tata Kelola Pemerintah Kampung	90
1. Perbaikan Kapasitas Sosial	90
2. Perbaikan Kapasitas Proses dan Birokrasi	90
3. Perbaikan Kapasitas Politik dan Kepemimpinan	91



B.	Rekomendasi Tata Kelola BUMK	92
1.	Aspek Permodalan BUMK	92
2.	Aktivitas Bisnis BUMK.....	93
3.	Tata kelola BUMK.....	93
4.	Tools Praktis Manajemen BUMK	93
5.	Pengembangan Ekosistem	94
C.	Catatan Umum dan Temuan Lapangan Akademi Kampung SIGAP	94
D.	Rencana Kerja & Road Map AKS 4.....	95
	DUKUNGAN & PENUTUP.....	98
	LAMPIRAN.....	100
	Materi 1. Pengantar Kewenangan Kampung	100
	Materi 2. Identifikasi dan pemetaan aktor.....	111
	Materi 2. 1. Pengantar Menuju Data Desa (2)	117
	Materi 2. 2. Pengantar Kebijakan Berbasis Data	131
	Materi 3 Memahami Kebijakan dalam Legislasi Kampung (1).....	136
	Materi Pengelolaan Keuangan BUMK	139
	Logo BUMK Silian Jaya – Kampung Bohe Silian	155
	Logo Wisata Kehe Daing – Kampung Payung Payung	157
	PPT Catatan Perjalanan Kampung Sumber Agung	159



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Sasaran Wilayah dan Peserta Program AKS #3	12
Tabel 2 Peserta AKS unsur Pemerintahan Kampung/Desa	17
Tabel 3 Peserta AKS unsur Lembaga BUMK/BUMDes.....	19
Tabel 4 Metode, Waktu, dan Teknis Asesmen AKS 1 - 3	26
Tabel 5 Hasil Assessment Tata Kelola Pemerintah Kampung di Kabupaten Berau	27
Tabel 6 Hasil Assessment Tata Kelola Pemkam di Kabupaten Kutai Timur	27
Tabel 7 Materi Kelas Belajar Besar Akademi Kampung Sigap (Tanjung Redeb)	36
Tabel 8 Materi Kelas Belajar Besar Akademi Kampung Sigap (Wilayah Pesisir)	36
Tabel 9 Daftar Peserta Kelas Belajar Besar Akademi Kampung Sigap (Tanjung Redeb)	37
Tabel 10 Peserta Kelas Belajar Besar Akademi Kampung Sigap (Wilayah Pesisir).....	37
Tabel 11 Peserta Kelas Belajar Tata Kelola Pemerintahan Kampung (Wilayah Pesisir)	38
Tabel 12 Peserta Kelas Belajar Tata Kelola Keuangan BUMK (Wilayah Pesisir).....	38
Tabel 13 Peserta Kelas Belajar Tata Kelola Pemerintahan Kampung (Tanjung Redeb)	48
Tabel 14 Peserta Kelas Belajar Tata Kelola Keuangan BUMK (Tanjung Redeb).....	49
Tabel 15 Catatan Persoalan Kampung di Kelas Belajar Tanjung Redeb.....	54
Tabel 16 Agenda Pendampingan Pasca Pelatihan.....	76
Tabel 17 Daftar Pihak-Pihak yang terlibat dalam kegiatan Akademi Kampung Sigap	80
Tabel 18 Daftar Kampung Yang Sudah Menginstal SIK	82
Tabel 19 Daftar BUMK dengan Sistem Pelaporan Keuangan YSID	83
Tabel 20 Status Badan Hukum BUMK	85
Tabel 21 13 Agenda Prioritas AKS 4	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Peserta AKS 1 - 3	22
Gambar 2 Diagram Peserta Asesmen dan Kelas Belajar AKS 1 - 3.....	22
Gambar 3 Dokumentasi Assessment di Kampung Campursari, Sumber Agung, Kayu Indah.....	26
Gambar 4 Dokumentasi Assessment di Kampung Mapulu	28
Gambar 5 Diagram Hasil Assessment Klasifikasi Tata Kelola BUMK.....	32
Gambar 6 Dokumentasi Kelas Belajar Besar Tata Kelola Pemkam (Wilayah Pesisir).....	41
Gambar 7 Grafik Hasil Pre Test dan Post Test Kelas Belajar PemKam (Pesisir)	43
Gambar 8 Dokumentasi Kelas Belajar Besar Keuangan BUMK (Wilayah Pesisir)	44
Gambar 9 Grafik Hasil Pre Test dan Post Test Kelas Belajar BUMK (Pesisir)	45
Gambar 10 Dokumentasi Kelas Belajar Besar Tata Kelola PemKam (Tanjung Redeb).....	53
Gambar 11 Grafik Hasil Pre Test dan Post Test Kelas Belajar Pemkam (Tanjung)	56
Gambar 12 Dokumentasi Kelas Tata Kelola Keuangan BUMK (Tanjung Redeb).....	58
Gambar 13 Grafik Hasil Pre Test dan Post Test Kelas Belajar BUMK (Tanjung).....	58
Gambar 14 Dokumentasi mini training di Kecamatan Muara Wahau	63
Gambar 15 Dokumentasi Mini Training Gabungan AKS (Kecamatan Maratua)	70
Gambar 16 Dokumentasi Pendampingan di Kampung Bohe Silian	77
Gambar 17 Dokumentasi Pendampingan di Kampung Teluk Alulu	78
Gambar 18 Dokumentasi Pendampingan di Kampung Teluk Harapan	78
Gambar 19 Dokumentasi Pendampingan di Kampung Payung-Payung	79
Gambar 20 Dokumentasi Pendampingan Maratua Peduli Lingkungan.....	79
Gambar 21 Dokumentasi Pembuatan Podcast	87



A | Latar Belakang Pelaksanaan Akademi Kampung SIGAP (AKS)



PEJUANG
SIGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar
Inovasi Desa

Laporan Akhir Program Akademi Kampung Sigap 3 Tahun 2023



LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS)

Seperangkat kewenangan desa telah dibuka melalui UU Desa di tahun 2014. Namun sampai saat ini, implementasi UU Desa masih belum optimal dan masih menjadi tantangan bersama bagi banyak desa dalam merumuskan arah pembangunan. Persoalannya seringkali desa masih dipahami sebagai obyek pembangunan. Namun dengan tantangan tersebut, ternyata masih ditemukan desa-desa yang memiliki prestasi dalam bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Desa yang berprestasi inilah, dalam hal ini Desa Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta, yang direplikasi pengalamannya untuk kemudian disebarakan pada kampung-kampung di Kabupaten Berau dan Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Pentingnya pembelajaran antar-kampung secara ekosistemik dikarenakan Kampung dan Badan Usaha Milik Desa (atau Badan Usaha Milik Kampung) telah menghadapi berbagai macam tantangan, banyak diantaranya mengalami kegagalan, namun tidak sedikit pula Kampung dan BUMDes/BUMK yang memiliki prestasi. Kampung dan BUMDes/BUMK yang berprestasi inilah yang kemudian direplikasi pengalaman dan praktik baiknya untuk kemudian disebarakan.

Dan sudah semenjak tahun 2017 dan 2018, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kalimantan Timur mendorong pengembangan ekosistem saling belajar kepada 150 Desa/Kampung di Kalimantan Timur. Yang meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Penajam Paser Utara, Paser. Pada perkembangannya tahun 2021, Kabupaten Berau merancang Program SIGAP Sejahtera dan dijadikan prioritas pertama dari 18 program unggulan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Berau. Membangun ekosistem pembelajaran antar-kampung menjadi latar gagasan program SIGAP Sejahtera.

Program SIGAP Sejahtera menitikberatkan pada tiga sektor utama: Tata Kelola Pemerintahan Kampung, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Kelembagaan Ekonomi Lokal. Dalam skema besar SIGAP Sejahtera, program Akademi Kampung SIGAP (AKS) dirumuskan sebagai upaya penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kampung dan Kelembagaan Ekonomi Lokal melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Program AKS sudah berjalan tiga tahun (2021-2023) dan memberi dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan kemajuan sejumlah kampung di Kabupaten Berau. Seperti Kampung Sumberagung untuk tata kelola pemerintahan, Kampung Labanan Makarti untuk tata kelembagaan ekonomi BUMK.



Dalam pelaksanaan, program AKS tidak sebatas pendampingan melalui pelatihan atau asistensi tingkat tapak, melainkan dilengkapi pendekatan “ekosistemik” kolaborasi tukar pengalaman antar-kampung. Ekosistem kolaborasi ini diharapkan memformulasi berbagai peluang kerjasama antar-kampung untuk memperoleh kemandirian. Dan menempatkan kampung-kampung sebagai kekuatan kolektif, adaptif, replikatif bagi pembangunan. Metode belajar konektivitas tersebut sejalan dengan pendekatan SIGAP yang bertumpu pada kekuatan masyarakat atau strength-based approach.

Program AKS, bukan hanya terbatas pendampingan melalui pelatihan atau asistensi, juga dilengkapi pendekatan ekosistemik atau terbangunnya kolaborasi dan saling tukar pengalaman antar-kampung/antar-lembaga. Program Akademi Kampung SIGAP (2021 – 2023) dilaksanakan dengan mengimplementasikan beberapa jenis inovasi di antaranya:

1. Payung regulasi/kebijakan terintegrasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, sampai pemerintah kampung. Dukungan tersebut memungkinkan berjalannya pelaksanaan program Akademi Kampung SIGAP pada dua sektor utama, yakni tata kelola pemerintahan kampung dan kelembagaan ekonomi lokal.
2. Pencatatan pelaporan keuangan BUMK dengan menggunakan sistem aplikasi YSID “satu klik” berbasis Microsoft Excel, yang memudahkan pengurus BUMK untuk membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan setiap bulan/triwulan/semester.
3. Perbaikan kualitas mutu data dan informasi kampung melalui pengembangan Sistem Informasi Kampung Terpadu (SIKT), yang berisi empat indikator layanan: sistem persuratan (administrasi kampung), sistem pelayanan yang terintegrasi aplikasi android, website, dan webGIS.
4. Penguatan ekosistem saling belajar antar-kampung dan ekosistem kolaborasi antar-lembaga di Kabupaten Berau khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur umumnya. Instrumen ini dikembangkan berdasarkan praktik baik yang sudah dilakukan di Desa Panggungharjo, Yogyakarta. Ekosistem kolaborasi direplikasi sebagai upaya agar kampung/lembaga tidak mengucilkan diri, namun menempatkan diri sebagai kekuatan kolektif-kolaboratif untuk akselerasi pembangunan dan keberhasilan program.



B | Tujuan Program Akademi Kampung SIGAP (AKS)



PEJUANG
SIGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar
Inovasi Desa



TUJUAN PROGRAM AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS)

Program Akademi Kampung SIGAP Ke-3 (Periode 25 Januari - 20 Mei) Tahun 2023 bertujuan untuk:

A. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kampung/Desa

1. Penguatan kapasitas politik dan pemerintahan yang meliputi penguatan kapasitas politik dan kepemimpinan serta penguatan kapasitas proses dan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab.
2. Pelembagaan pengelola informasi dan data kampung untuk menjamin keberlanjutan misi digitalisasi kampung.
3. Penerapan Sistem Informasi Kampung Terpadu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan kampung.
4. Penguatan kapasitas analisis data dan informasi sebagai navigasi arah perencanaan pembangunan kampung.

B. Penguatan Tata Kelola BUMK/BUMDes

1. Membangun mindset kewirausahaan sosial sebagai modal utama menjalankan BUMK;
2. Standarisasi kelembagaan BUMK sesuai PP No.11/2021 dan Permendes PDDT No.3/2001;
3. Penguatan kapasitas perencanaan usaha BUMK;
4. Penerapan sistem pengelolaan keuangan BUMK.

C. Penguatan Ekosistem Kemandirian Kampung/Desa

Adanya pembelajaran bersama melalui diskusi publik secara berkala tentang isu strategis-inovatif kedaulatan kampung. Penyusunan deck pembelajaran untuk inisiasi model sekolah kampung/desa pada 4 wilayah, antara lain:

1. Wilayah Pesisir: Kampung Sumber Agung (Batu Putih), Kampung Payung Payung (Maratua), Kampung Talisayan (Talisayan)
2. Wilayah Tengah: Kampung Labanan Makarti (Teluk Bayur)
3. Wilayah Hulu: Kampung Merabu (Kelay) dan Kampung Long Ayan (Segah)
4. Kutai Timur: Desa Nehas Liah Bing (Muara Wahau/Kutai Timur)



C | Sasaran Wilayah dan Peserta Akademi Kampung SIGAP (AKS)



PEJUANG
SIGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar
Inovasi Desa

Laporan Akhir Program Akademi Kampung Sigap 3 Tahun 2023



SASARAN WILAYAH DAN PESERTA PROGRAM AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS)

Sasaran wilayah dan peserta Akademi Kampung SIGAP Ke-3 Tahun 2023 diharapkan diikuti 27 Kampung dan 20 BUMK/BUMDes yang tersebar di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Dengan cakupan wilayah kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Sasaran Wilayah dan Peserta Program AKS #3

Pemerintah Desa/Kampung		BUMK/BUMDes	
Kabupaten Berau			
No	Nama Desa/Kampung	No	Nama Desa/Kampung
1	Merabu	1	Merabu
2	Sido Bangen	2	Sido Bangen
3	Mapulu	3	Long Ayan
4	Panaan	4	Labanan Makarti
5	Long Gie	5	Labanan Jaya
6	Long Duhung	6	Tabalar Muara
7	Long Pelay	7	Biatan Ulu
8	Long Keluh	8	Talisayan
9	Long Lamcin	9	Tunggal Bumi
10	Long Suluy	10	Sukamurya
11	Long Ayan	11	Tembudan
12	Punan Mahakam	12	Sumber Agung
13	Pandan Sari	13	Kayu Indah





13	Pandan Sari	13	Kayu Indah
14	Labanan Makarti	14	Biduk-Biduk
15	Labanan Jaya	15	Teluk Sulaiman
16	Pegat Batumbuk	16	Teluk Sumbang
17	Teluk Semanting	17	Teluk Alulu
18	Tabalar Muara	18	Teluk Harapan
19	Biatan Ulu	19	Payung-Payung
20	Talisayan	20	Bohe Silian
21	Tunggal Bumi		
22	Sukamurya		
23	Campur Sari		
24	Tembudan		
25	Sumber Agung		
26	Kayu Indah		
27	Teluk Sumbang		
Kabupaten Kutai Timur			
No	Nama Desa/Kampung	No	Nama Desa/Kampung
1	Nehas Liah Bing	1	Nehas Liah Bing
2	Dea Beq	2	Dea Beq
3	Diaq Lay	3	Diaq Lay
4	Bea Nehas	4	Bea Nehas
5	Long Wehea	5	Long Wehea
6	Diaq Leway	6	Diaq Leway



Program AKS #3 Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang diharapkan diikuti 27 Kampung yang tersebar pada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Pada realisasinya, sejak kegiatan assessment, kelas pelatihan, hingga pendampingan pasca pelatihan, berhasil diikuti oleh 32 Kampung. Ada 3 kampung yang tidak mengikuti proses dari awal sampai akhir. Ketiga kampung tersebut Kampung Long Lamcin, Kampung Long Keluh, Kampung Punan Mahakam. Posisi ketiganya digantikan Kampung Suaran dan Kampung Teluk Sulaiman.

Sedangkan untuk Tata Kelola Kelembagaan BUMK yang diharapkan diikuti 20 lembaga BUMK yang tersebar di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Berau dan dan Kabupaten Kutai Timur. Pada realisasinya, sejak kegiatan assessment, kelas pelatihan, hingga proses pendampingan pasca pelatihan, berhasil diikuti oleh 24 BUMK. Adapun tiga tambahan lembaga adalah BUMK Suaran, BUMK Pegat Batumbuk, BUMK Long Beliu. Sementara itu, setelah kegiatan assessment diketahui bahwa dari 6 desa di Kabupaten Kutai Timur, hanya Desa Nehas Liah Bing yang memiliki lembaga BUMDes. Kelima desa lain sama sekali belum memiliki BUMDes.



D | Periode Pelaksanaan Program Akademi Kampung SIGAP (AKS)



PEJUANG
SIGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar
Inovasi Desa



PERIODE PELAKSANAAN PROGRAM AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS)

Akademi Kampung SIGAP Angkatan 1 (Desember 2020 – Juni 2021) diikuti 20 Kampung peserta kelas tata kelola Pemerintah Kampung dan 20 Kampung peserta kelas tata kelola BUMK yang tersebar di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur. Pada Angkatan 1 ini, Launching Akademi Kampung SIGAP 1 dilaksanakan secara daring melalui kanal Youtube Yayasan Konservasi Alam Nusantara (Tautan : <https://youtu.be/-rMyaxfJIP8>) pada 18 Desember 2020. Kegiatan ini sekaligus sebagai penanda dukungan lintas pihak di level nasional, daerah, hingga organisasi yang memiliki komitmen dalam upaya membangun kemandirian kampung/desa di Kalimantan Timur. Dalam kegiatan Launching AKS 1 ini terdapat 6 pembicara, yaitu Abdul Halim Iskandar Menteri Desa PDTT, Suharso Monoarfa Menteri PPN/Kepala Bappenas, Isran Noor Gubernur Kalimantan Timur, M. Syirajudin Kepala DPMD Kalimantan Timur, Herlina Hartanto Direktur Eksekutif YKAN, Ryan Sugiarto Ketua YSID. Tahap ini bertujuan mendorong perubahan dan membangun pemahaman yang sama terhadap 4 aspek perbaikan Pemerintah Kampung dan Lembaga BUMK, yaitu perbaikan infrastruktur ekonomi, infrastruktur politik, infrastruktur sosial, infrastruktur teknologi.

Akademi Kampung SIGAP Angkatan 2 (Februari – Juli 2022) diikuti 29 Kampung peserta kelas tata kelola Pemerintah Kampung dan 25 Kampung peserta kelas tata kelola BUMK. Pada Angkatan 2 ini, awalnya peserta kelas tata kelola Pemerintah Kampung adalah 25 Kampung dan 21 Kampung peserta kelas tata kelola BUMK. Namun dalam perjalanan beberapa kampung menyatakan keinginan untuk ikut. Launching Akademi Kampung SIGAP 2 dilaksanakan (Rabu 23 Maret 2022) di Balai Mufakat Kabupaten Berau. Yang dihadiri oleh Bupati Berau, Sekda Berau, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau, Kesbangpol Berau, Diskoperindag Berau, Camat, Pemerintah Kampung, Pejuang SIGAP, dan beberapa perwakilan NGO. Bersamaan dengan Launching Angkatan 2 ini, juga dilakukan peluncuran Sistem Informasi Kampung Sumber Agung, Sekolah BUMK Kampung Labanan Makarti, dan Forum Diskusi Bulanan Kampung Labanan Makmur. Tahap ini bertujuan mendetailkan sasaran-sasaran strategis, yaitu reformulasi pelayanan publik dan perencanaan pembangunan kampung, preposisi BUMK sebagai penggerak ekonomi desa, penguatan ekosistem saling belajar antar-kampung.

Akademi Kampung SIGAP Angkatan 3 (Januari – Mei 2023) diikuti oleh 32 Kampung dan 24 BUMK yang tersebar di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Berau dan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada Angkatan 3 ini, terdapat 15 Kampung dan 7 BUMK yang baru tergabung dalam program Akademi Kampung SIGAP.



Selebihnya adalah kampung yang telah tergabung pada AKS #1 dan AKS #2. Pada Angkatan 3 ini, selain kegiatan kelas belajar besar tata kelola Pemerintah Kampung dan BUMK yang diadakan secara paralel sejak 13-17 Maret 2023 yang berlangsung di dua kluster kegiatan, yaitu Kluster Sumber Agung (untuk kampung-kampung dan BUMK dari Kecamatan Biatan, Tabalar, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk) dan Kluster Tanjung Redeb (untuk kampung-kampung dan BUMK dari Kecamatan Sambaliung, Teluk Bayur, Pulau Maratua, Pulau Derawan, Segah, Kelay). Juga diadakan deck pembelajaran khusus untuk inisiasi model kelas belajar pada 4 wilayah, antara lain Wilayah Pesisir Selatan (Sumber Agung dan Talisayan), Wilayah Kepulauan (Maratua), Wilayah Hulu (Long Ayan di Hulu Segah dan Merabu di Hulu Kelay), Wilayah Kutai Timur (Nehas Liah Bing). Akademi Kampung SIGAP Angkatan 3 dalam pelaksanaannya melibatkan sejumlah instansi/lembaga, yaitu DPMK Berau, DPMD Kutai Timur, P3MD, Diskominfo Berau, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Yayasan Nastari, Kecamatan, Sekretariat Kabupaten SIGAP Sejahtera, Pejuang SIGAP Sejahtera, Perkumpulan Perisai, Perkumpulan Maratua Peduli Lingkungan, dan Tokoh Adat. Tahap ini bukan hanya terbatas pelatihan atau asistensi, juga bertujuan untuk penciptaan ekosistem belajar bersama antar-kampung dan antar-lembaga terkait Tata Kelola Kampung dan Tata Kelola BUMK.

Tabel 2 Peserta AKS unsur Pemerintahan Kampung/Desa

KECAMATAN	KAMPUNG / DESA	TAHUN		
		2021	2022	2023
SAMBALIUNG	Pilanjau	✓		
	Pegat Bukur		✓	
	Gurimbang		✓	
	Bebanir Bangun		✓	
	Sukan Tengah		✓	
	Suaran		✓	✓
GUNUNG TABUR	Maluang		✓	
	Melati Jaya	✓		
	Pulau Besing		✓	
TELUK BAYUR	Labanan Makmur	✓	✓	
	Labanan Makarti	✓	✓	✓
	Labanan Jaya		✓	✓
BIATAN	Biatan Bapinang	✓		
	Biatan Lempake	✓		
	Manunggal Jaya		✓	
	Biatan Ulu		✓	✓



KECAMATAN	KAMPUNG / DESA	TAHUN		
		2021	2022	2023
TABALAR	Semurut	✓		
	Tabalar Muara			✓
KELAY	Merabu	✓	✓	✓
	Merasa		✓	
	Long Duhung		✓	✓
	Sidobangen		✓	✓
	Muara Lesan		✓	
	Long Beliu			✓
	Panaan			✓
	Mapulu			✓
	Long Suluy			✓
	Long Pelay			✓
SEGAH	Harapan Jaya	✓		
	Pandansari			✓
	Long Ayan			✓
DERAWAN	Tanjung Batu	✓		
	Pulau Derawan		✓	
	Kasai		✓	
	Teluk Semanting	✓		✓
	Pegat Batumbuk		✓	✓
TALISAYAN	Talisayan	✓	✓	✓
	Campursari	✓	✓	✓
	Sukamurya		✓	✓
	Tunggal Bumi		✓	✓
	Kayu Indah			✓



KECAMATAN	KAMPUNG / DESA	TAHUN		
		2021	2022	2023
BATU PUTIH	Batu Putih		✓	
	Tembudan	✓	✓	✓
	Sumber Agung		✓	✓
BIDUK-BIDUK	Biduk-Biduk	✓		
	Teluk Sulaiman		✓	✓
	Teluk Sumbang		✓	✓
LOA KULU (KUTAI KARTANEGARA)	Sungai Payang	✓		
KARANGAN (KUTAI TIMUR)	Karangan Ilir	✓		
MUARA WAHAU (KUTAI TIMUR)	Nehas Liah Bing			✓
	Long Wehea			✓
	Bea Nehas			✓
	Dea Beq			✓
	Diaq Leway			✓
	Diaq Lay			✓

Tabel 3 Peserta AKS unsur Lembaga BUMK/BUMDes

KECAMATAN	NAMA BUMK/BUMDes	TAHUN		
		2021	2022	2023
SAMBALIUNG	Berkah Padai (Pilanjau)	✓		
	Batu Bual Sejahtera (Pegat Bukur)		✓	
	Gurimbang Mandiri (Gurimbang)		✓	
	Lanuk Permai (Long Lanuk)		✓	
	Bina Mandiri (Suaran)		✓	✓



KECAMATAN	NAMA BUMK/BUMDes	TAHUN		
		2021	2022	2023
GUNUNG TABUR	Batiwakkal (Maluang)	✓	✓	
	Rumpun Jaya Mandiri (Melati Jaya)	✓	✓	
TELUK BAYUR	Makmur Sejahtera (Labanan Makmur)	✓	✓	
	Surya Jaya Abadi (Labanan Makarti)	✓	✓	✓
	Bersahaja (Labanan Jaya)		✓	✓
BIATAN	Bapinang Sejahtera (Biatan Bapinang)	✓		
	Lempake Mandiri (Biatan Lempake)	✓		
	Jaya Abadi (Biatan Ulu)		✓	✓
TABALAR	Semurut Berkarya (Semurut)	✓		
	Mandiri Sejahtera (Tabalar Muara)			✓
KELAY	Lebo Asik (Merabu)	✓	✓	✓
	Merasa Jaya (Merasa)		✓	
	Harapan Baru (Long Duhung)		✓	
	Bangen Lestari (Sidobangen)		✓	✓
	Harapan Lestari (Long Beliu)			✓
SEGAH	Jaya Lestari (Harapan Jaya)	✓		
	Maju Sejahtera (Pandansari)			✓
	Geh Elmin Meklaw (Long Ayan)			✓
	Tiga Tawai (Tepian Buah)	✓		
DERAWAN	Pag'isunan (Tanjung Batu)	✓	✓	
	Mangrove (Teluk Semanting)	✓		
	SMART (Pegat Batumbuk)		✓	✓



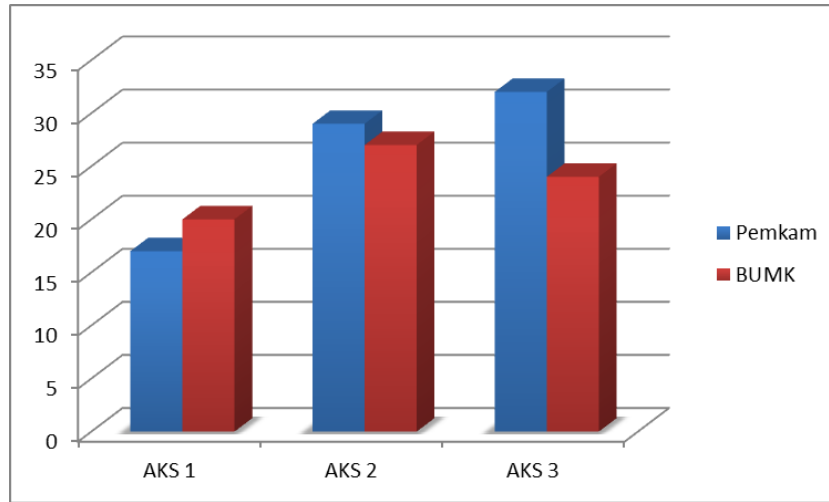


KECAMATAN	NAMA BUMK/BUMDes	TAHUN		
		2021	2022	2023
TALISAYAN	Mandiri (Talisayan)	✓	✓	✓
	Mandiri Jaya Abadi (Campursari)	✓	✓	
	Bintang Bersinar (Sukamurya)		✓	✓
	Mekar Jaya (Tunggal Bumi)		✓	✓
	Karya Bersama (Kayu Indah)			✓
BATU PUTIH	Tanjung Buaya-Buaya (Batu Putih)		✓	
	Rindang Jaya (Tembudan)	✓	✓	✓
	Mandiri Sejahtera (Sumber Agung)		✓	✓
BIDUK-BIDUK	Biduk Mandiri (Biduk-Biduk)	✓	✓	✓
	Pasir Putih Indah (Teluk Sulaiman)		✓	✓
	Berkarya (Teluk Sumbang)		✓	✓
MARATUA	Lumba-Lumba (Teluk Harapan)	✓		✓
	Malatua Payung Sejahtera (Payung-Payung)		✓	✓
	Silian Jaya (Bohe Silian)			✓
LOA KULU (KUTAI KARTANEGARA)	Payang Sejahtera (Sungai Payang)	✓		
KARANGAN (KUTAI TIMUR)	DKI Manis (Karangan Ilir)	✓		
MUARA WAHAU (KUTAI TIMUR)	Liah Wehea (Nehas Liah Bing)			✓

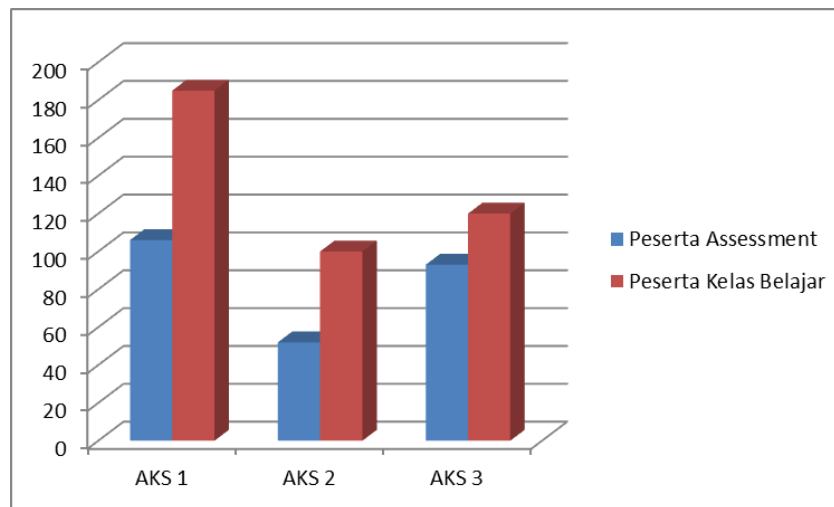




Gambar 1 Diagram Peserta AKS 1 - 3



Gambar 2 Diagram Peserta Asesmen dan Kelas Belajar AKS 1 - 3





E | Ringkasan Kegiatan Akademi Kampung SIGAP (AKS)



PEJUANG
SIGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar
Inovasi Desa

Laporan Akhir Program Akademi Kampung Sigap 3 Tahun 2023



RINGKASAN KEGIATAN AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS)

A. Kegiatan Bersama Dalam Pelaksanaan Akademi Kampung Sigap

Sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, YSID telah melaksanakan beberapa kegiatan bersama untuk mendukung pelaksanaan program Akademi Kampung SIGAP, di antaranya:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Program Akademi Kampung SIGAP dengan pihak YKAN yang didukung Pemerintah Kabupaten Berau yang diwakili oleh DPMK Berau, Yayasan Dharma Bakti Berau Coal (YDBC), dan Universitas Gadjah Mada selaku pengelola program.
2. Paparan program terhadap stakeholder tingkat Kampung dan tingkat Kabupaten yang diikuti dengan kegiatan bersama Pameran Produk Unggulan UMKM dan Festival Kampung SIGAP.
3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama penginstalan dan pendampingan Sistem Informasi Kampung Terpadu (SIKT) Sumber Agung dan beberapa kampung lain di Berau di tahun 2022. Prestasi membanggakan diraih Kampung Sumber Agung dengan meraih juara pertama Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Regional III 2022 berkat mutu data dan informasi kampung melalui pengembangan SIKT.
4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama penginstalan dan pendampingan Sistem Informasi Kampung Terpadu (SIKT) Kampung Labanan Makarti pada AKS #3. Prestasi membanggakan diraih Labanan Makarti dengan meraih juara pertama Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Berau 2023 berkat mutu data dan informasi kampung melalui pengembangan SIKT.
5. Inisiasi kampung model “Sekolah BUMK” Labanan Makarti dan “Sekolah Desa” Labanan Makmur. Hal ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem saling belajar antar-kampung.
6. Kerjasama irisan program antara YSID dan YKAN IOP Marine untuk kegiatan assessment 3 BUMK di Wilayah Pesisir, yaitu Kampung Suaran, Tabalar Muara, Pegat Batumbuk.
7. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama pembuatan Buku Sejarah Kampung dengan Pemerintah Kampung Sumber Agung.
8. Penyusunan Regulasi Kampung Sumber Agung terkait penerapan Remunerasi Berbasis Kinerja termasuk Petunjuk Teknis Tata Kelola Keuangan.
9. Penyusunan PPT Kampung Sumberagung terkait capaian/keberhasilan kampung.
10. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara YSID, Perkumpulan Perisai, Pemerintah Kampung Sumber Agung untuk pembuatan peta digital. Ini adalah bagian dari penguatan ekosistem saling belajar atau kolaborasi antar-lembaga.
11. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara YSID, Perkumpulan Perisai, Pemerintah Kampung Talisayan untuk pembuatan ulang peta 3 dimensi. Ini adalah bagian penguatan ekosistem saling belajar atau kolaborasi antar-lembaga.
12. Pendampingan BUMDES Bersama Kecamatan Maratua untuk kegiatan Dakayu Malatua Festival 2023.
13. Penandatanganan Kerjasama antara YSID dan DPMK untuk menjadi pemateri pelatihan akuntansi BUMDES Bersama se-Kabupaten Berau.



14. Fasilitasi model pendampingan “Jurnalisme Warga” untuk kelompok Maratua Peduli Lingkungan.
15. Kegiatan assessment Akademi Kampung SIGAP terkait Tata Kelola Pemerintahan Kampung dan Tata Kelola Lembaga BUMK dalam rentang waktu tiga tahun (2021 – 2023) melibatkan 251 Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Pengurus BUMK, dan Pejuang SIGAP Sejahtera.
16. Pelatihan Kelas Belajar Akademi Kampung SIGAP terkait Tata Kelola Pemerintahan Kampung dan Tata Kelola Lembaga BUMK dalam rentang waktu tiga tahun (2021 - 2023) yang telah melibatkan 405 Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Pengurus BUMK, dan Pejuang SIGAP Sejahtera.
17. Pembuatan video pendek untuk kegiatan launching program AKS #2 Tahun 2022
18. Pembuatan podcast (siaran/video kegiatan yang dibuat dalam format digital) untuk topik Tata Kelola Pemerintahan Kampung, Tata Kelola Kelembagaan BUMK, dan Dokumentasi Pengetahuan Kampung untuk sejumlah kampung di Kabupaten Berau seperti Mapulu, Long Ayan, Merabu, Payung-Payung, dst, pada AKS #3 Tahun 2023.

B. Resume Ruang Lingkup Kegiatan AKS #3

1. Kegiatan Assessment

Proses assessment dilakukan pada dua bulan pertama program (Februari-Maret 2023) dan mencakup 28 Kampung di Kabupaten Berau dan 6 Desa di Kabupaten Kutai Timur. Dua kampung di wilayah Hulu Kelay, yakni Long Lamcin dan Long Keluh tidak dapat mengikuti assessment. Sehingga total assessment untuk Tata Kelola Pemerintahan Kampung adalah 32 Kampung/Desa, dengan rincian 26 Kampung di Berau dan 6 Desa di Kutai Timur. Sementara proses assessment Tata Kelola Kelembagaan BUMK/BUMDes menysasar 23 BUMK di Kabupaten Berau dan 1 BUMDes di Kabupaten Kutai Timur. Dari 24 BUMK sasaran assessment tersebut, hanya BUMK Kampung Teluk Alulu di Kecamatan Maratua yang tidak dapat mengikuti proses. Sementara itu 2 BUMK, yakni BUMK Bina Mandiri Suaran dan BUMK SMART Pegat Batumbuk laporan hasil assessment dipisahkan untuk kebutuhan program YKAN IOP. Jadi dalam laporan akhir AKS 3 untuk assessment Tata Kelola Kelembagaan BUMK hanya disajikan 21 BUMK/BUMDes.

Proses assessment menggunakan pendekatan *gap analysis* yaitu menganalisis kesenjangan yang ada dengan target yang ditetapkan berdasarkan indikator kunci. Sehingga model pelatihan/pendampingan yang diterapkan berdasarkan kebutuhan lapangan dan kegiatan pelatihan lebih terarah dan efektif. Adapun metode yang dipakai gabungan antara analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Perlakuan assessment terhadap kampung, terutama antara kampung yang pernah ikut AKS dan kampung yang baru, berbeda. Pada kampung yang telah tergabung pada AKS #1 dan AKS #2, proses ini disebut *Mid Term Assessment*. Sedangkan bagi kampung yang baru tergabung program AKS #3 proses ini disebut *Preliminary Assessment*.

Kegiatan assessment dilakukan langsung oleh Tim YSID yang berjumlah 6 orang yang dibagi menjadi dua tim (tim hulu dan tim pesisir) dengan melakukan kunjungan ke kampung-kampung dan BUMK yang menjadi sasaran penilaian.



Tim YSID mengonfirmasi sejumlah pertanyaan melalui wawancara dan observasi lapangan selama 17 hari kepada banyak pihak, mulai dari kepala kampung, sekretaris kampung, perangkat kampung, ketua BPK dan anggota, pengurus BUMDes/BUMK, anggota Pokdarwis, pengurus koperasi, perangkat kecamatan, tokoh adat, sampai pejuang sigap sejahtera di setiap kampung.



Gambar 3 Dokumentasi Assessment di Kampung Campursari, Sumber Agung, Kayu Indah

Hasil dari kegiatan assessment selama hampir 3 minggu tersebut kemudian dipakai sebagai rujukan/pemetaan tematik untuk kegiatan Kelas Belajar Tata Kelola Pemerintah Kampung dan Tata Kelola BUMK pada AKS 3, *deck* pembelajaran khusus, inisiasi kampung model, monitoring evaluasi, alternatif pengembangan program yang aplikatif sinergis. Selain bertujuan untuk mencari detail persoalan, perubahan, kemajuan aspek Tata Kelola Pemerintahan Kampung dan Tata Kelola BUMK. Kegiatan assessment dilakukan untuk menemukan kesesuaian antara dokumen, jawaban, fakta lapangan. Adapun versi lengkap hasil assessment telah dijelaskan pada laporan sebelumnya. Di bawah ini adalah gambaran kegiatan assessment program AKS selama 3 tahun.

Tabel 4 Metode, Waktu, dan Teknis Asesmen AKS 1 - 3

	AKS #1 (2021)	AKS #2 (2022)	AKS #3 (2023)
Metode	FGD Daring	Rapid Assessment	Gap Analysis Assessment
Waktu	12 hari	12 hari	17 hari
Teknis	Wawancara via zoom online	Sebar kuesioner melalui platform daring	Kunjungan lapangan dan wawancara langsung ke Pemerintah Kampung, BPK, BUMK, Pokdarwis, Tokoh Adat Masyarakat, Pemerintah Kecamatan, PSS SIGAP Sejahtera



a. Ringkasan dan Rekomendasi Hasil Asesmen Tata Kelola Pemerintahan Kampung

Dari hasil assessment selama 17 hari tersebut didapatkan gambaran umum yang penilaiannya dilakukan dengan melihat ketiga aspek kapasitas dasar: kapasitas sosial, kapasitas politik dan kepemimpinan, kapasitas proses dan birokrasi. Dari hasil penilaian tersebut, Yayasan Sanggar Inovasi Desa mengelompokkan kampung dalam empat kategori: kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Deskripsi gambaran singkat pengelompokan masing-masing pemerintahan kampung sebagai berikut.

Tabel 5 Hasil Assessment Tata Kelola Pemerintah Kampung di Kabupaten Berau

KAB	NO.	KAMPUNG	NILAI KAPASITAS				GAP KAPASITAS				STATUS	
			SOSIAL	POL. & KEPEMIM PINAN	PROSES & BIROKRAS I	TOTAL NILAI	SOSIAL	POL. & KEPEMIM PINAN	PROSES & BIROKRAS I	TOTAL GAP		
BERAU	1	SUMBER AGUNG	96	188	90	374	-24	-68	-66	-158	B	BAIK
BERAU	2	TEMBUDAN	81	144	81	306	-39	-112	-75	-226	C	CUKUP
BERAU	3	SIDO BANGEN	81	144	81	306	-39	-112	-75	-226	C	CUKUP
BERAU	4	LABANAN MAKART	72	148	84	304	-48	-108	-72	-228	C	CUKUP
BERAU	5	TELUK SULAIMAN	84	136	84	304	-36	-120	-72	-228	C	CUKUP
BERAU	6	TABALAR MUARA	84	136	84	304	-36	-120	-72	-228	C	CUKUP
BERAU	7	TALISAYAN	75	140	84	299	-45	-116	-72	-233	C	CUKUP
BERAU	8	LABANAN JAYA	81	116	87	284	-39	-140	-69	-248	C	CUKUP
BERAU	9	MERABU	66	136	69	271	-54	-120	-87	-261	C	CUKUP
BERAU	10	PEGAT BATUMBUK	81	108	81	270	-39	-148	-75	-262	C	CUKUP
BERAU	11	KAYU INDAH	87	104	75	266	-33	-152	-81	-266	C	CUKUP
BERAU	12	LONG BELIU	72	112	69	253	-48	-144	-87	-279	C	CUKUP
BERAU	13	CAMPUR SARI	63	104	87	254	-57	-152	-69	-278	C	CUKUP
BERAU	14	TELUK SUMBANG	78	92	81	251	-42	-164	-75	-281	C	CUKUP
BERAU	15	TELUK SEMANTING	81	96	72	249	-39	-160	-84	-283	C	CUKUP
BERAU	16	TUNGGAL BUMI	72	80	93	245	-48	-176	-63	-287	C	CUKUP
BERAU	17	PANDANSARI	69	96	72	237	-51	-160	-84	-295	C	CUKUP
BERAU	18	LONG DUHUNG	57	96	72	225	-63	-160	-84	-307	C	CUKUP
BERAU	19	SUKA MURYA	63	68	81	212	-57	-188	-75	-320	C	CUKUP
BERAU	20	SUARAN	75	68	69	212	-45	-188	-87	-320	C	CUKUP
BERAU	21	BIATAN ULU	60	104	45	209	-60	-152	-111	-323	C	CUKUP
BERAU	22	PANAAN	60	80	60	200	-60	-176	-96	-332	D	KURANG
BERAU	23	LONG AYAN	57	60	69	186	-63	-196	-87	-346	D	KURANG
BERAU	24	MAPULU	51	72	45	168	-69	-184	-111	-364	D	KURANG
BERAU	25	LONG SULUI	39	64	54	157	-81	-192	-102	-375	D	KURANG
BERAU	26	LONG PELAY	48	40	57	145	-72	-216	-99	-387	D	KURANG

Tabel 6 Hasil Assessment Tata Kelola Pemkam di Kabupaten Kutai Timur

KAB	NO.	KAMPUNG	NILAI KAPASITAS				GAP KAPASITAS				STATUS	
			SOSIAL	POL. & KEPEMIM PINAN	PROSES & BIROKRAS I	TOTAL NILAI	SOSIAL	POL. & KEPEMIM PINAN	PROSES & BIROKRAS I	TOTAL GAP		
KUTAI TIMUR	27	NEHAS LIAH BING	72	88	57	217	-48	-168	-99	-315	C	CUKUP
KUTAI TIMUR	30	DEA BEQ	90	88	66	244	-30	-168	-90	-288	C	CUKUP
KUTAI TIMUR	28	LONG WEHEA	72	76	54	202	-48	-180	-102	-330	D	KURANG
KUTAI TIMUR	29	DIAK LEWAY	63	76	54	193	-57	-180	-102	-339	D	KURANG
KUTAI TIMUR	31	DIAQ LAY	66	72	45	183	-54	-184	-111	-349	D	KURANG
KUTAI TIMUR	32	BEA NEHAS	69	68	66	203	-51	-188	-90	-329	D	KURANG





Dari 26 kampung di Kabupaten Berau, hanya Sumber Agung yang terklasifikasi BAIK (3,85%) dan 5 (lima) kampung yang berstatus KURANG (76,92%). Sebagian besar, 20 kampung, terklasifikasi CUKUP (19,23%). Kinerja Sumber Agung relevan terhadap capaiannya saat ini dengan menjadi Juara I Lomba Desa Tingkat Nasional, Regional III Kalimantan dan Sulawesi yang diselenggarakan Kemendagri. Fokus utama Lomba Desa versi Kemendagri memang berupa capaian kinerja tata kelola pemerintahan. Lima kampung yang terklasifikasi KURANG merupakan kampung-kampung di daerah hulu sungai. Empat kampung berada di Kecamatan Kelay dan satu kampung di Kecamatan Segah (Long Ayan). Selain lemahnya kapasitas tata kelola, kelima kampung ini umumnya ditandai oleh kondisi keterbatasan mendasar: akses geografis, infrastruktur yang belum baik, berpenduduk kecil. Kelima kampung tersebut juga mempunyai ciri sama, yakni persebaran pemukiman masyarakat Dayak. Pada enam desa Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, yang menjadi desa asli masyarakat Dayak Wehea, ditemukan 2 (dua) kampung dalam klasifikasi CUKUP dan 4 (empat) kampung klasifikasi KURANG.



Gambar 4 Dokumentasi Assessment di Kampung Mapulu

Berdasarkan hasil assessment yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kami merekomendasikan langkah strategis sebagai berikut:

1) Kapasitas Sosial

Perlunya pengembangan kualitas proses Pemilihan Kepala Kampung yang memungkinkan visi dan misi kepemimpinan programatik muncul. Selain itu, isu terkait peningkatan kualitas musyawarah kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban perlu menjadi perhatian.



Hal tersebut dapat dimulai dengan memperluas partisipasi berbasis kewilayahan, kelompok maupun individu, serta memperluas ruang pelibatan warga termasuk lembaga kemasyarakatan kampung dalam pelaksanaan program/kegiatan. Keterlibatan warga juga diharapkan dapat muncul dalam evaluasi kinerja kebijakan, setidaknya pada level efektivitas formulasi dan/atau alokasi program/kegiatan dan anggaran (misal melalui program review). Dalam pengawasan dapat dilengkapi pengembangan complaint handling system.

Di sisi lain, rekomendasi dalam indikator kapasitas sosial ini juga dapat dilakukan dengan mengembangkan model pendidikan kreatif bagi warga untuk memperkuat kompetensi berpikir dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Adapun dalam pelayanan, pentingnya mendorong perbaikan kualitas pelayanan dari pemerintah suprakampung terhadap layanan dasar: kesehatan (kedisiplinan tenaga pendidik) dan pendidikan (beasiswa siswa berprestasi) yang memungkinkan sampai pendidikan tinggi. Selain itu, perlunya pengelolaan sistem data kemiskinan terintegrasi bagi akurasi data dan pemanfaatannya bagi program penjaminan sosial dan pemberdayaan lainnya.

2) Kapasitas Proses dan Birokrasi

Pada kapasitas ini, kami merekomendasikan perlunya memperkuat dan mengembangkan pemahaman perangkat kampung terhadap basis dan jenis kewenangan kampung, baik dalam kerangka pengakuan asal-usul – rekognisi (self governing community), kewenangan skala lokal – desentralisasi/otonomi (local self government), maupun tugas pembantuan. Selain itu juga penting untuk memastikan ketepatan pemenuhan siklus rutin tahapan penyelenggaraan pemerintahan kampung (proses, waktu, standar dokumen) dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Termasuk dalam hal ini mendorong agar Pemerintah Kabupaten konsisten terhadap pemenuhan jadwal waktu dalam siklus kebijakan (misalnya, ketepatan waktu terhadap informasi jenis dan jumlah dana transfer dari berbagai sumber berikut ketentuan regulasi penggunaan. Sebelumnya ditemukan beberapa kali keterlambatan informasi dari Pemkab). Selain itu perlunya mengembangkan kapasitas formulasi kebijakan dan legal drafting berbagai produk regulasi di tingkat kampung.

Di sisi lain, pelayanan rutin dan standar prosedur pelayanan perlu dipastikan dengan jelas dan diatur dalam regulasi kampung. Pada kampung-kampung yang sudah relatif mapan, perlunya mengembangkan kompetensi analisis anggaran dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan minimalis. Selain itu, diperlukan pendalaman pengawasan dan pembinaan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan kampung, diantaranya yang sering muncul adalah tema perpajakan.



Pada tataran perencanaan, kami merekomendasikan untuk menginisiasi bentuk-bentuk perencanaan tematik sebagai penerjemah operasional RPJMK (misalnya, dalam bentuk masterplan pembangunan untuk sektor/unggulan tertentu). Selain itu, penting untuk melibatkan lembaga kampung dan/atau lembaga kemasyarakatan kampung sebagai mitra pemerintah kampung. Dalam hal tertentu pada urusan yang dinilai belum memiliki kaitan kelembagaan dapat dibentuk/dikembangkan lembaga kampung khusus.

Pada hal-hal yang bersifat administratif, kami merekomendasikan untuk mengembangkan pemahaman penyusunan standar dan penggunaan berbagai dokumen penyelenggaraan pemerintahan, baik dokumen perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Setelah SISKEUDES, aplikasi SIPADES untuk pencatatan aset juga bisa segera digunakan untuk semua kampung. Semakin memungkinkan aplikasi yang tidak harus terhubung dengan jaringan internet akan sangat bermanfaat bagi kampung-kampung terpencil/terisolir. Di sisi lain, perlunya mendorong Pemkab Berau menetapkan standar informasi publik untuk memenuhi hak publik atas informasi pemerintahan kampung (transparan dan akuntabel) sekaligus perlindungan bagi pemerintah kampung terhadap pihak tidak bertanggungjawab.

Sebagai bagian dalam meningkatkan kualitas proses dan birokrasi, penting untuk mulai menerapkan Sistem Informasi Kampung, mulai dari pengorganisasian data, penyajian, pengolahan, sampai publikasi. Dalam lingkup ini, tercakup juga pengendalian pemerintah kampung terhadap berbagai data dinamis yang perlu pemutakhiran secara berkala. Ini menjadi pintu masuk untuk menekuni isu datakarasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Hal tersebut juga perlu didukung dengan penguatan skill dasar perangkat kampung dalam pelaksanaan tugas, diantaranya bagi perangkat kampung yang belum mampu menggunakan komputer untuk aplikasi-aplikasi yang lazim dipakai (Misalnya yang minimalis adalah Ms. Office, khususnya Ms. Word dan Ms. Excel).

Sedangkan pada isu penghasilan atau insentif, kami merekomendasikan perlunya mendorong penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung setara minimal UMK sebagai upaya menciptakan basis kesejahteraan minimal. Selain itu, juga dapat dilakukan pengembangan sistem insentif berbasis kinerja untuk mendorong capaian dan inovasi. Ini bisa dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap analisis jabatan, beban kerja, dan deskripsi tugas masing-masing jabatan yang menjadi dasar dalam penetapan klasifikasi SOTK Kampung.



3) Kapasitas Politik dan Kepemimpinan

Sama halnya dengan kapasitas proses dan birokrasi, pada kapasitas ini juga kami merekomendasikan pentingnya memperkuat dan mengembangkan pemahaman Kepala Kampung terhadap basis dan jenis kewenangan kampung, baik dalam kerangka pengakuan asal-usul – rekognisi (self governing community), kewenangan skala lokal – desentralisasi/otonomi (local self government), maupun tugas pembantuan. Hal tersebut juga perlu didukung dengan mengembangkan pemahaman konteks, dimensi, dan proses kebijakan, setidaknya pada tahap agenda setting dan (re)formulasi kebijakan, termasuk evaluasi berbasis regulatory impact.

Selain itu, hasil diskusi atas urgensi yang terjadi pada tataran kepemimpinan di tingkat kampung, kami merekomendasikan perlunya merancang Sekolah (Calon) Kepala Kampung atau bentuk lain yang memungkinkan pembelajaran integratif-kontekstual-inovatif terhadap dinamika tata kelola pemerintahan kampung, khususnya pada kapasitas leadership. Di sisi lain, perlunya mengembangkan model ekosistem pembelajaran yang memungkinkan pertukaran, percontohan, dan pengembangan baik pengetahuan maupun produk yang lahir dari praktik-praktik baik antar kampung. Ini menjadi bagian dari kerja-kerja manajemen pengetahuan yang tentu melibatkan berbagai pihak. Hal tersebut juga dapat diupayakan dengan mengembangkan jejaring kerja kolaborasi antara kampung dan entitas ekonomi atau sosial lain seperti perusahaan di dunia industri, NGO, Perguruan Tinggi, dan lainnya untuk menjadi bagian dari ekosistem pembangunan kampung secara programatik.

Pemerintah kampung juga perlu mengembangkan berbagai kerjasama kampung dalam berbagai peluang pengelolaan sumberdaya secara akuntabel. Selain itu, juga penting untuk menemukan, memformulasikan, dan mengembangkan keunikan/kekhasan kampung sebagai pembeda untuk mengenalkan kampung ke lingkup lebih luas. Untuk mendukung hal tersebut, kapasitas komunikasi publik Kepala Kampung perlu terus ditingkatkan, termasuk menjadi garda depan proses branding kampung.

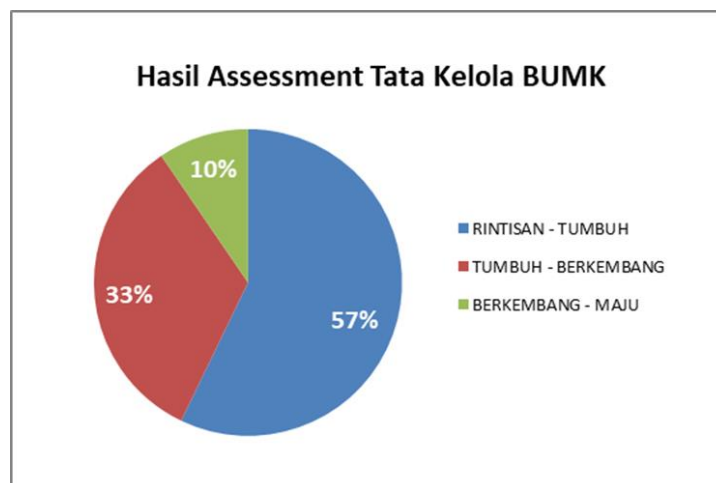
Kami juga merekomendasikan untuk menggerakkan berbagai panggung sebagai sistem insentif Kepala Kampung mendapatkan manfaat pengakuan terhadap hasil kinerjanya (misal, melalui berbagai lomba atau pemberian penghargaan) yang diikuti oleh insentif program atau anggaran bagi peraih penghargaan. Penghargaan bisa didapatkan dari pemerintah, swasta/industri, ataupun lembaga pendidikan.

Sedangkan pada tataran perencanaan, kampung perlu menyusun masterplan pembangunan kampung pada fokus tertentu, sebagai pendetilan perencanaan strategis dalam RPJMK. Ini agar fokus pembangunan kampung konsisten dari waktu ke waktu, termasuk jika terjadi pergantian Kepala Kampung.

b. Ringkasan dan Rekomendasi Hasil Asesmen Badan Usaha Milik Kampung

Dari hasil assessment selama 17 hari tersebut didapatkan gambaran umum yang penilaiannya dilakukan dengan melihat keenam aspek kapasitas dasar: Pertama, kapasitas organisasi. Kedua, perspektif pasar. Ketiga, kinerja manajemen. Keempat, kinerja keuangan. Kelima, proses bisnis. Keenam, dampak sosial dan lingkungan. Dari hasil assessment, Yayasan Sanggar Inovasi Desa mengelompokkan BUMK dalam ketiga kategori: Tahap Rintisan Menuju Tumbuh, Tumbuh Menuju Berkembang, Berkembang Menuju Maju. Dan hasil assessment menunjukkan temuan menarik ketiga kategori tersebut yang digambarkan pada tabel berikut.

Gambar 5 Diagram Hasil Assessment Klasifikasi Tata Kelola BUMK



Pengelompokan BUMK dalam ketiga kategori, yakni Rintisan Menuju Tumbuh, Tumbuh Menuju Berkembang, Berkembang Menuju Maju, juga dapat diartikan sebagai proses identifikasi dan analisis perbedaan kapasitas masing-masing BUMK. Yang kemudian ditempatkan dalam kategori-kategori yang memiliki penilaian serta karakteristik sama. Adapun deskripsi singkat kondisi BUMK yang ditemukan waktu assessment pada kampung-kampung di Kabupaten Berau dan BUMDes Desa Nehas Liah Bing, Kabupaten Kutai Timur, adalah sebagai berikut.

- 1) **Kapasitas organisasi dan perspektif pasar**, yang terjadi adalah secara organisasi banyak BUMK belum didasarkan pada PP.11/2021 dan Permendes No.3 dan belum memiliki dokumen SOP lembaga serta masih kebingungan ketika harus menentukan perspektif pasar yang tepat. Sehingga mindset entrepreneurship dan literasi finansial untuk tata kelola BUMK diperlukan.



- 2) **Kinerja manajemen dan kinerja keuangan**, terutama sistem remunerasi dan rekrutmen masih menjadi problem mendasar. Begitu juga dengan transparansi anggaran dan pelaporan pencatatan keuangan.
- 3) **Proses bisnis dan dampak sosial lingkungan**, yang terjadi adalah potensi dan peluang yang dimiliki masing-masing kampung tidak serta merta memberikan dampak luas bagi masyarakat dan sumbangsih terhadap pendapatan asli kampung (PAK).

Berdasarkan hasil assessment yang telah dijelaskan tersebut di atas, kami merekomendasikan langkah strategis sebagai berikut:

1) Aspek Permodalan BUMK

Hampir keseluruhan BUMK yang kami assessment mendapatkan penyertaan modal dari kampung tanpa didasari dengan analisa kelayakan usaha dan perencanaan usaha yang memadai. Hal ini menyebabkan tren pertumbuhan aset dan modal yang menurun pada mayoritas BUMK. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, kepailitan usaha BUMK niscaya terjadi. Pada kasus semacam ini, perlu dilakukan inventarisasi ulang nilai aset dan nilai kemanfaatan aset yang dimiliki. Sehingga kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki dapat diputuskan, kerugian tidak semakin berlanjut, dan strategi 'penyelamatan' bisnis dapat dilakukan.

Kami juga merekomendasikan perlunya klausul kebijakan terkait penyertaan modal kepada BUMK harus disertai analisa kelayakan usaha dan rencana usaha. Tentunya dengan format sederhana namun mampu menjawab kebutuhan investasi, rencana aktivitas beserta proyeksi pendapatan dan biaya, serta proyeksi keuntungan yang didapatkan. Pada BUMK yang mendapatkan hibah dari pihak ketiga, baik dalam bentuk barang maupun program swakelola, perlu mengedepankan dialog dengan berbagai pihak terkait untuk menjamin prinsip akuntabilitas penyaluran hibah. Bila memungkinkan, berbagai hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor dapat disalurkan melalui mekanisme APBK. Terkait kerjasama usaha atau investasi dari pihak lain, pelaksana operasional wajib mengajukan rencana kerjasama untuk mendapatkan persetujuan dari Musyawarah Kampung.

2) Aktivitas Bisnis BUMK

Berhasil atau gagalnya aktivitas usaha yang dijalankan BUMK erat kaitannya dengan kapasitas BUMK sebagai kesatuan organisasi dalam menjalankannya. Kapasitas yang dimaksud disini bukan hanya terbatas pada sistem manajemennya. Namun yang lebih fundamental lagi adalah tentang ide bisnis itu sendiri.



Bagaimana ide tersebut akan dieksekusi, apakah sanggup? Mayoritas pengurus BUMK saat ini memiliki aktivitas ekonomi utamanya masing-masing, dengan kata lain, BUMK merupakan aktivitas sampingan mereka. Padahal, ide - eksekusi usaha yang dijalankan BUMK merupakan jenis usaha dengan karakteristik aktivitas rutin. Hal ini menyebabkan banyak usaha BUMK yang tidak terkelola secara optimal, atau bahkan mangkrak.

Pada karakteristik semacam ini, kami merekomendasikan pemilihan jenis usaha dengan aktivitas rutin yang minim, dan intensitas cashflow yang rendah. Hal ini juga sebagai jalan tengah untuk meminimalisir biaya operasional rutin BUMK, yang salah satunya terkait tuntutan gaji. Contoh : kebun sawit, rumah walet, investasi ke perusahaan (BUMK) lainnya, dll.

3) Tata kelola BUMK

PP 11/2021 mendudukan kembali sinergitas peran antara BUMK, Pemerintah Kampung, dan Masyarakat dengan menempatkan Musyawarah Kampung (Muskam) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang mengatur dan memutuskan 24 hal-hal pokok dan strategis pengelolaan BUMK, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Oleh karenanya, salah satu kunci utama keberhasilan BUMK terletak pada kualitas Muskam. Walaupun masih terdapat tantangan didalamnya, yakni kecenderungan forum musyawarah yang umumnya didominasi elit. Penyediaan data dan informasi sebagai bagian evaluasi dan arah kebijakan pengembangan BUMK perlu diupayakan untuk memperbaiki kualitas muskam menjadi ruang diskusi yang lebih inklusif dan partisipatif. Pun dalam hal kapasitas pelaksana operasional, yang perlu didukung dengan penyediaan berbagai tools praktis manajemen BUMK.

4) Tools Praktis Manajemen BUMK

Kegagalan pengelolaan BUMK acapkali bukan dikarenakan kecurangan, namun lebih kepada kesalahan atau ketidakmampuan pengelola BUMK untuk menyajikan kinerjanya dalam sebuah dokumen. Pun petunjuk-petunjuk dan bimbingan teknis yang dilakukan kebanyakan hanya menyajikan bentuk akhir dokumen yang dikehendaki, tanpa menyentuh proses bagaimana dokumen tersebut disusun. Terutama pada pengelolaan keuangan. Pasalnya, ketersediaan alat bantu pelaporan keuangan yang otomatis tersusun dari aktivitas pencatatan transaksi belum banyak tersedia dan terdiseminasi. Penyediaan berbagai template dan tools praktis perlu terus diupayakan untuk menjamin tata kelola BUMK yang baik, transparan dan akuntabel. Beberapa di antaranya:

- a) Template Perkam, AD, dan ART BUMK.
- b) Template Program Kerja dan Rencana Usaha BUMK.
- c) Tools Analisa Kelayakan Usaha BUMK.
- d) Tools Pengelolaan Keuangan BUMK, dan
- e) Berbagai Template dan Tools Lain, sesuai karakteristik usaha BUMK.





5) Pengembangan Ekosistem

Perlu membangun laboratorium inovasi, proses knowledge management melalui pendokumentasian pengalaman (best practises dan worst practices) menjadi sebuah pengetahuan (model pembelajaran) untuk disebar-tularkan kepada BUMK dan kampung lain. Praktik-praktik baik yang telah dilaksanakan pada beberapa BUMK dapat menjadi model pembelajaran yang efektif bagi BUMK lainnya. Seperti misalnya proses bisnis yang telah dijalankan BUMK Labanan Makarti, Laporan Keuangan BUMK Rindang Jaya, Tembudan, atau bahkan persoalan tata kelola bisnis di Biduk-Biduk yang juga dapat menjadi pembelajaran - yang kemudian menjadi pengetahuan- bersama.

Selain itu, kami merekomendasikan pentingnya membangun hubungan ekonomi, dengan mengembangkan keterpaduan rantai pasok antara kampung dengan pasar. Termasuk di dalamnya inventarisir potensi dan produk dengan peluang pasar/offtaker. Di sisi lain, mengembangkan Jejaring juga diperlukan guna mempertemukan antar kompetensi (expertise) untuk menjawab berbagai kebutuhan kampung. Termasuk didalamnya meliputi dukungan teknis tertentu serta proses transfer of knowledge.

2. Kegiatan Kelas Belajar Besar

Assessment yang telah dilakukan pada bulan Februari memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan materi kelas belajar oleh YSID. Hal ini mengingat assessment dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan dan kondisi permasalahan yang ada di masing-masing kampung terkait tata kelola pemerintahan dan BUMK. Dengan demikian, materi kelas belajar yang disusun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di kampung tersebut. Selain itu, assessment juga dapat menjadi dasar bagi YSID untuk merumuskan program-program pendampingan yang tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan BUMK di kampung-kampung tersebut. Adapun YSID merumuskan materi Kelas Belajar Besar Akademi Kampung Sigap #3 sebagai berikut:



Tabel 7 Materi Kelas Belajar Besar Akademi Kampung Sigap (Tanjung Redeb)

No	Materi	Sub-Materi	Output
1	Pengantar Legislasi dan Data Kampung	Kewenangan Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami basis kewenangan kampung serta dimensi (konteks, konten, dan proses) dan siklus tahapan pengelolaan kebijakan publik di kampung; 2. Peserta dapat mengidentifikasi dan merancang pemanfaatan data terhadap arah dan strategi kebijakan pembangunan kampung; 3. Peserta memiliki pemahaman menyusun produk legislasi kampung;
		Dimensi dan Siklus Kebijakan Publik di Kampung	
		Kebijakan Berbasis Bukti - Data dan kinerja kebijakan - Merancang kebutuhan dan pemanfaatan data terhadap arah dan strategi kebijakan kampung	
		Dasar legal drafting	
2	Pengantar Pengelolaan Keuangan BUMK	Dasar Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat memahami pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik modal (Kampung) 2. Peserta Memahami dasar-dasar Akuntansi sebagai alat untuk melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar Akuntansi Umum yang Berlaku 3. Peserta dapat Memahami Cara Kerja Aplikasi Keuangan BUMK Berbasis Excel untuk digunakan sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan
		Set Up Neraca Saldo	
		Pencatatan Transaksi	
		Pelaporan Keuangan	

Tabel 8 Materi Kelas Belajar Besar Akademi Kampung Sigap (Wilayah Pesisir)

No	Materi	Sub-Materi	Output
1	Tata Kelola Lembaga Kampung	Kewenangan Kampung: Dasar, Limitasi, dan Redistribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami basis kewenangan kampung dan keterbatasan pengelolaan 2. Peserta dapat mengidentifikasi ruang interkoneksi dan kolaborasi antar lembaga kampung; dan 3. Peserta memahami strategi distribusi kewenangan dalam pengorganisasian tugas dan fungsi antar lembaga kampung yang sinkron, harmonis, dan terintegrasi.
		Kapasitas Distributif Kepala Kampung dalam Penataan Kewenangan antar lembaga	
		Identifikasi Persoalan dan Peluang Penataan (Batasan dan Interkoneksi) antara Lembaga Kampung dan Lembaga Masyarakat Kampung	
		Strategi dan Teknik Distribusi Kewenangan yang Sinkron, Harmonis, dan Terintegrasi	
2	Pengantar Pengelolaan Keuangan BUMK	Dasar Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat memahami pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik modal (Kampung) 2. Peserta Memahami dasar-dasar Akuntansi sebagai alat untuk melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar Akuntansi Umum yang Berlaku 3. Peserta dapat Memahami Cara Kerja Aplikasi Keuangan BUMK Berbasis Excel untuk digunakan sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan
		Set Up Neraca Saldo	
		Pencatatan Transaksi	
		Pelaporan Keuangan	



Kelas Belajar Besar AKS #3 ini dibagi menjadi 2 klaster kelas besar, yaitu Kelas Tanjung Redeb pada 16-17 Maret 2023 dan Kelas Pesisir Selatan pada 13-14 Maret 2023. Kelas Belajar tersebut diikuti oleh masing-masing 2 orang dari Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan BPK), serta 2 orang dari BUMK (Direktur BUMK dan Bendahara BUMK). Berikut daftar peserta yang mengikuti kelas belajar besar Akademi Kampung Sigap #3 :

Tabel 9 Daftar Peserta Kelas Belajar Besar Akademi Kampung Sigap (Tanjung Redeb)

Kelas Tanjung Redeb							
Pemkam (18 Kampung)							
1	Suaran	6	Panaan	11	Long Duhung	16	Payung-Payung
2	Pandansari	7	Mapulu	12	Long Pelay	17	Teluk Harapan
3	Sidobangen	8	Long Beliu	13	Long Keluh	18	Teluk Alulu
4	Labanan Jaya	9	Long Lamcin	14	Pegat Batumbuk		
5	Labanan Makarti	10	Long Suluy	15	Bohe Silian		
BUMK (10 Kampung)							
1	Suaran	5	Pandansari	9	Teluk Harapan		
2	Labanan Makarti	6	Pegat Betumbuk	10	Teluk Alulu		
3	Labanan Jaya	7	Bohe Silian				
4	Sidobangen	8	Payung-Payung				

Tabel 10 Peserta Kelas Belajar Besar Akademi Kampung Sigap (Wilayah Pesisir)

Kelas Pesisir Selatan							
Pemkam (12 Kampung)							
1	Sumber Agung	4	Teluk Sumbang	7	Tabalar Muara	10	Kayu Indah
2	Talisayan	5	Tembudan	8	Biatan Ulu	11	Sukamurya
3	Teluk Sulaiman	6	Tunggal Bumi	9	Campur Sari	12	Biduk-Biduk
BUMK (6 Kampung)							
1	Sumber Agung	4	Teluk Sulaiman				
2	Talisayan	5	Kayu Indah				
3	Tunggal Bumi	6	Tembudan				

Adapun kelas belajar untuk pemerintah kampung bertujuan untuk menguatkan kapasitas proses dan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan akuntabel. Selain itu juga penguatan kapasitas legislasi melalui pemanfaatan data serta informasi kampung untuk memperkuat kinerja kebijakan berbasis bukti (evidence based policy), serta penguatan kapasitas tata kelola kewenangan dan hubungan kewenangan antar lembaga kampung dalam pengelolaan sumberdaya kampung yang sinkron, harmonis, dan terintegrasi. Sedangkan bagi Badan Usaha Milik Kampung, kelas belajar bertujuan untuk memberikan penguatan kapasitas pemahaman dasar akuntansi, pelaporan keuangan, perencanaan bisnis. Selain itu, peserta juga diharapkan mampu melakukan pencatatan keuangan.



a. Kelas Belajar Besar (Wilayah Pesisir Selatan)

Kelas Belajar Besar Pesisir Selatan dilaksanakan di Kampung Sumberagung dengan sasaran peserta 12 Kampung dan 6 BUMK yang tersebar di Kecamatan Tubaan, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk. Secara spesifik sasaran peserta kegiatan adalah Kepala Kampung dan Ketua BPK atau perwakilannya, Direktur dan Bendahara BUMK atau perwakilannya, dan para Pejuang SIGAP Sejahtera. Berikut ini daftar kampung yang mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan Kelas Belajar Umum Pesisir Selatan yang dilaksanakan secara paralel selama dua hari, antara tanggal 13 – 14 Maret 2023.

Tabel 11 Peserta Kelas Belajar Tata Kelola Pemerintahan Kampung (Wilayah Pesisir)

No	Kampung	Hari Pertama	Hari Kedua
1	Tabalar Muara	Wakil BPK	Wakil BPK
2	Tembudan	Kasi Pemkam	Kasi Pemkam
3	Biatan Ulu	Kasi Pemkam	Kasi Pemkam
4	Teluk Sulaiman	Kaur Umum	Kaur Umum
5	Tunggal Bumi	Kasi Kesejahteraan, Sekretaris BPK	Kasi Kesejahteraan, Sekretaris BPK
6	Sumber Agung	Kepala Kampung, BPK, 2 Perangkat Kampung	Kaur Keuangan
7	Pejuang SIGAP Sejahtera	Faskam Sumber Agung	Faskam Sumber Agung

Tabel 12 Peserta Kelas Belajar Tata Kelola Keuangan BUMK (Wilayah Pesisir)

No	Kampung	Hari Pertama	Hari Kedua
1	Tembudan	Bendahara BUMK (1 orang)	Bendahara BUMK (1 orang)
2	Sumber Agung	Sekretaris BUMK (1 orang)	-
3	Teluk Sulaiman	Anggota BUMK (2 orang)	Anggota BUMK (2 orang)
4	Tunggal Bumi	-	Bendahara BUMK (1 orang)
5	Pejuang SIGAP Sejahtera	Faskam Tembudan, Faskam Sumber Agung (2 orang)	Faskam Tembudan, Faskam Sumber Agung (2 orang)



1) Fokus Bahasan

Dari proses assessment yang dilakukan terhadap 26 Kampung di Berau dan 6 Desa di Kutai Timur selama 17 hari (tanggal 7 – 23 Februari 2023) didapatkan gambaran umum sebagai berikut: Pertama, kampung-kampung di Wilayah Hulu bermasalah secara kapasitas sosial, kapasitas proses dan birokrasi, kapasitas politik dan kepemimpinan. Kedua, kampung di Wilayah Hilir dan Wilayah Pesisir secara kapasitas politik dan kepemimpinan juga kurang, tidak banyak pemimpin visioner. Ketiga, partisipasi politik warga hanya bagus ketika pilkacam. Keempat, pembuatan peraturan kampung bersifat reguler. Kelima, tidak banyak kampung memiliki kapasitas jaringan yang luas. Dan walaupun ada, kerjasama “abu-abu” tidak tercatat. Keenam, kapasitas distributif (pemahaman bahwa warga punya ruang lebar untuk mengurus kampung) belum banyak dipahami bahkan dianggap mustahil dipraktikkan di Berau.

Selain penjelasan hasil assessment, para peserta diberikan materi asal-usul dan kewenangan kampung. Mereka diberi pemahaman bahwa kampung/desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan berdasar prakarsa warga, hak asal-usul, dan hak adat. Kampung secara administratif berkedudukan di kabupaten, namun itu tidak serta merta menjadikan kampung bawahan kabupaten. Justru kampung memiliki hak kewenangan dan hak distribusi yang membedakannya dengan komunitas. Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui negara.

Selain itu ikut dijelaskan bahwa hak asal-usul merupakan hak yang melekat pada kampung. Namun pemerintah masih harus melakukan pembagian kewenangan karena tidak semua hal diurus kampung di satu sisi. Di sisi lain, pemerintah kabupaten tidak berhak sepenuhnya mengatur kampung. Kampung tetap bisa mengurus dirinya sendiri. Misalnya kampung dimungkinkan mengelola langsung Pendapatan Asli Kampung (PAK), karena hal tersebut diakui. Selain pengelolaan PAK, tantangan lain yang dihadapi kampung di Berau adalah bagaimana lembaga-lembaga kampung yang ada itu dapat membuat banyak kewenangan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Maka, partisipasi warga menjadi penting, pengertian kampung sebagai subyek utama pembangunan mendesak dipahami. Sehingga bayangan mengenai kampung bentuk lama menjadi tidak relevan. Dan saat ini, yang harus dipahami bersama adalah (1) kampung memiliki kewenangan menentukan kapasitas birokrasi, (2) kewenangan asal-usul, (3) kewenangan membentuk dan menjalankan sistem organisasi, (4) kewenangan pembinaan kelembagaan masyarakat, (5) kewenangan pengelolaan tanah kas kampung, (6) kewenangan pengembangan peran warga dalam pembangunan, (7) efektivitas peran-peran lembaga kampung dan kewenangan yang diperlebar.



Sementara pada kelas Tata Kelola BUMK, isu akuntabilitas masih menjadi perhatian pada kegiatan AKS #3 tahun ini. Peserta diberikan pemahaman mengenai salah satu dari tiga perspektif BUMK yaitu perspektif ekonomi menjelaskan bahwa BUMK harus dipahami sebagai entitas ekonomi yang oleh karena perilakunya harus bias dilihat dengan kaca mata bisnis. Adapun pendekatannya yaitu melalui entrepreneurship dengan ukuran keberhasilan profitabilitas. Dalam hal ini laporan keuangan menjadi penting karena dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang bisnis yang berjalan. Selain menunjukkan kesehatan keuangan, laporan keuangan juga memungkinkan pengurus BUMK maupun pemberi modal untuk menilai dan membuat keputusan bisnis yang tepat melalui penentuan berbagai strategi seperti pengurangan biaya, peningkatan profitabilitas, atau mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Selain itu, selama proses asesmen juga ditemukan bahwa isu transparansi kerap menjadi pemantik ketidakpercayaan masyarakat pada BUMK, yang kemudian juga menghambat proses bisnis yang berjalan. Oleh karena itu, melalui laporan keuangan yang akurat dan transparan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan berbagai pemangku kepentingan kepada BUMK yang kemudian dapat berperan dalam menarik investasi dan memperluas kerja sama atau kemitraan baru.

Adapun pada kelas tata kelola keuangan BUMK hari pertama dimulai dengan memahami perbedaan proses entrepreneurship dan management. Dimana keuangan menjadi bagian dalam proses mengelola usaha menjadi sehat dan akuntabel atau dalam hal ini termasuk dalam proses management itu sendiri. Setelah memahami posisi keuangan dalam proses bisnis, peserta juga diberikan pemahaman struktur tata kelola BUMK berdasar PP 11/2021 dimana mereka dapat mengetahui dimana fungsi pengaturan, pengurusan, dan pengelolaan berada, termasuk juga beberapa pengaturan tentang kewenangan musyawarah desa. Setelah itu peserta juga diberikan materi terkait sistem manajemen BUMK, pola pengelolaan keuangan, dan struktur pengelola keuangan BUMK. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai konsep dasar dalam berbisnis, bagaimana pendapatan dan biaya sebagai konsep dasar bisnis saling terikat, yang mana keduanya mempengaruhi efektivitas dan efisiensi bisnis. Termasuk di dalamnya dasar strategi bisnis yang bertumpu pada pendapatan dan biaya.

Setelah memahami dasar-dasar bisnis dan pengaturan terkait pengelolaan keuangan, kelas dilanjutkan dengan materi pengantar akuntansi yang dimulai dengan logika dan persamaan dasar akuntansi termasuk di dalamnya yaitu asset, hutang, dan modal.



Setelah itu materi dilanjutkan dengan memahami alur keuangan mulai dari transaksi, pencatatan, pembukuan, hingga pelaporan, dimana proses tersebut kemudian dapat dilakukan dengan pendekatan aplikasi keuangan BUMK yang berbasis excel. Adapun aplikasi keuangan ini sudah disesuaikan dengan format Permendesa no. 3 tahun 2021. Setelah itu peserta baik yang sudah, sedang, maupun belum aktif menggunakan aplikasi keuangan memahami kembali tentang laporan neraca keuangan, laporan laba rugi (termasuk di dalamnya bagaimana melihat indikasi kondisi keuangan melalui laporan neraca keuangan dan laporan laba rugi), laporan arus kas, laporan perubahan modal. Setelah itu pelatihan hari pertama ditutup dengan materi pencatatan keuangan beserta pos-pos akun yang harus dipahami peserta.

Pada hari kedua, kelas dimulai dengan pengenalan kembali enam puluh daftar akun dan posisinya dalam akuntansi. Kemudian dilanjutkan dengan praktik uji coba mengerjakan soal-soal dari tim materi secara berulang. Setelah peserta mulai terbiasa mengerjakan soal akuntansi, peserta kemudian mulai dikenalkan dengan proses pengisian pada aplikasi keuangan berbasis excel yang nantinya akan dibagikan kepada masing-masing bendahara BUMK.

2) Dinamika Kelas

Kegiatan Kelas Belajar Umum Pesisir Selatan dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Maret 2023 di Ruang Rapat Kampung Sumberagung dan Gedung PKK Sumberagung. Namun sayangnya kegiatan ini tidak bisa berjalan maksimal karena terjadi force majeure di hari pertama (hujan besar mengguyur wilayah Pesisir Selatan sejak pukul 03.00 hingga 11.30 WITA) dan di hari kedua (berjalan dalam suasana perkabungan sebab Ketua BPK Sumberagung wafat dan banyak peserta pergi melayat) tidak cukup mendapat atensi. Hanya enam kampung yang menunjukkan atensi cukup bagus, dibuktikan dengan kehadiran perwakilan mereka untuk mengikuti Kelas Tata Pemerintahan Kampung dan Tata Kelembagaan BUMK.

Gambar 6 Dokumentasi Kelas Belajar Besar Tata Kelola Pemkam (Wilayah Pesisir)





Pada hari pertama pelaksanaan Kelas Belajar Tata Kelola Pemerintahan Kampung diikuti oleh 11 peserta dari 6 kampung. Pada hari berikutnya hanya diikuti 8 peserta dari 6 kampung. Sementara Kelas Belajar Tata Kelola Kelembagaan BUMK pada dua hari pelaksanaan diikuti 4 peserta dari 4 kampung. Berikut daftar kampung yang tidak ikut kegiatan Kelas Belajar Umum Pesisir: Kayu Indah (berhalangan, karena sedang persiapan penilaian lomba kampung tingkat Kabupaten Berau mewakili Kecamatan Batu Putih). Kemudian Talisayan, Campursari, Sukamurya (berhalangan, ada rapat lintas sektoral di kecamatan) dan Teluk Sumbang (berhalangan, ada rapat dinas terkait Pilkakam Serentak di Tanjung Redeb) serta Biduk-Biduk (tidak ada konfirmasi).

Kegiatan selama dua hari tersebut dibagi menjadi empat sesi. Untuk kelas Tata Kelola Pemerintahan Kampung, sesi pertama adalah pengenalan dan pretest, sesi kedua membahas kewenangan desa, sesi ketiga adalah diskusi revitalisasi LKK. Sesi keempat, selain paparan materi lanjutan terkait revitalisasi LKK, peserta diajak mensimulasikan rencana pembangunan dan pembuatan raperkam. Mulai dari identifikasi isu, agenda kebijakan, implementasi program, evaluasi. Sementara untuk kelas Tata Kelola Kelembagaan BUMK selama dua hari, pembahasan difokuskan pada upaya membangun paradigma tata kelola BUMK sesuai PP 11/2021. Kedudukan musyawarah kampung, peran pemerintah kampung, dan pemilihan jenis usaha, serta pencatatan keuangan. Peserta antusias pada sesi pelatihan pencatatan keuangan karena banyak dari mereka yang merasa lemah/belum bisa membuatnya.

Meskipun peserta yang hadir diwakili oleh staf kampung, antusiasme cukup bagus, hal itu dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan, tanggapan, diskusi mendalam selama sesi berlangsung. Kegiatan Kelas Belajar Umum Pesisir Selatan dibuka Kepala Kampung Sumber Agung, Edy Sutrisno. Dalam sambutan tersebut dikatakan bahwa kegiatan kelas belajar merupakan hal baik dan sangat bermanfaat. "Ini jadi kesempatan baik kita menimba ilmu dari teman YSID Yogyakarta. YSID telah terbukti ikut menyelesaikan persoalan kampung-kampung di Berau, salah satunya mendampingi Sumberagung dalam lomba desa. YSID ini unik, mereka punya banyak sumber daya manusia dan masing-masing memiliki keahlian. Selain itu, kegiatan kelas belajar penting untuk pembelajaran transparansi serta akuntabilitas. Karena, syarat kemandirian kampung adalah transparansi. Syarat kemajuan BUMK adalah akuntabilitas keuangan."

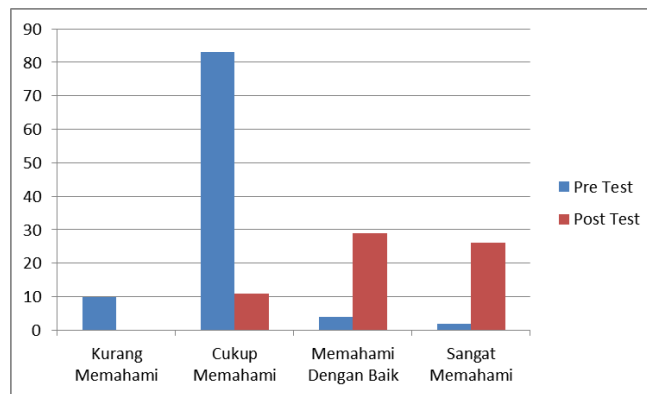
"Kita semua tahu kondisi BUMK di Berau seperti apa?" kata Bapak Edy Sutrisno. "Banyak yang asal jalan daripada maju. Banyak BUMK masih butuh pelatihan dan bahkan pendampingan. Kami juga ingin BUMK Sumberagung menjadi maju dan disorot. Bukan hanya PAK besar kami.



Kami, dengan dibantu YSID, akan membuat terobosan untuk kampung di tahun 2023, kami akan bekerjasama membuat (1) tata aturan remunerasi berbasis kinerja, (2) peta digital, (3) buku sejarah kampung.” Harapannya peta digital serta buku sejarah kampung sudah terbit bulan Agustus 2023 dan launching bertepatan hari jadi Kabupaten Berau di bulan September.

Selain itu, pada kegiatan Kelas Belajar tersebut, Tim YSID juga melakukan pre test dan post test yang dilakukan dengan pengisian kuisioner melalui link yang sudah disiapkan. Pre test dan post test berusaha merekam pemahaman peserta tentang materi pelatihan yang meliputi kewenangan pemerintah kampung, peran dan fungsi, dll. Adapun pemahaman tersebut dikualifikasikan pada empat level yaitu kurang memahami, cukup memahami, memahami dengan baik, sangat memahami.

Gambar 7 Grafik Hasil Pre Test dan Post Test Kelas Belajar PemKam (Pesisir)



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat secara umum terjadi pergeseran pemahaman dari yang sebelumnya cukup memahami, menjadi tersebar pada level memahami dengan baik dan sangat memahami. Selain itu jumlah yang tertera pada grafik memang mengalami penurunan mengingat terdapat perbedaan jumlah antara yang mengisi pre test dan post test, hal ini berkaitan dengan kehadiran peserta yang berbeda antara hari pertama dan kedua.

Sementara di kelas BUMK yang hanya diikuti oleh tiga kampung saja memang terlihat lebih sepi. Meski demikian proses diskusi dan pembelajaran justru berjalan cukup padat dan intens mengingat setiap peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan lebih leluasa dan longgar sesuai persoalan yang dihadapi masing-masing. Kondisi kelas yang terasa privat menjadikan suasana kelas cair dan lebih santai, namun proses belajar maupun praktik dapat berjalan dengan baik.



Gambar 8 Dokumentasi Kelas Belajar Besar Keuangan BUMK (Wilayah Pesisir)

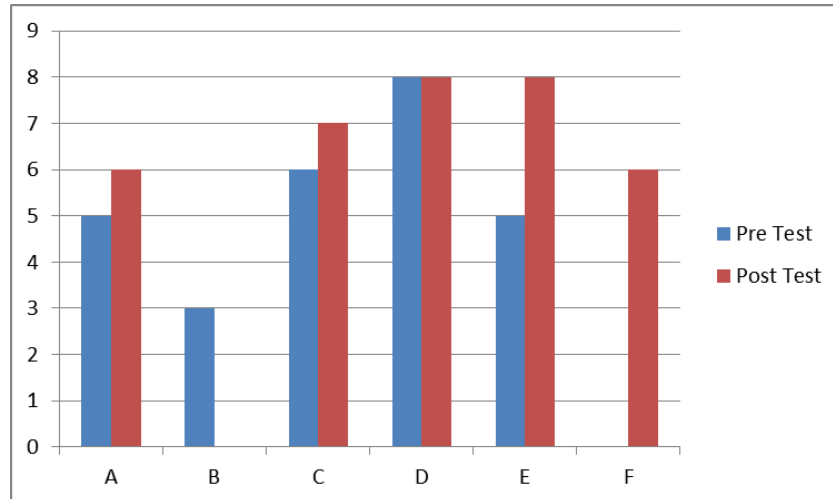


Selain itu, peserta diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal secara manual pada lembar plano. Hal ini dimaksudkan agar setiap peserta tetap mampu memahami logika dasar akuntansi dan asal usul sistem pencatatan yang mereka gunakan. Dengan waktu yang cukup, peserta juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan dan menyampaikan hasil pekerjaan sesuai dengan pemahaman masing-masing yang kemudian ditanggapi oleh peserta lain. Proses diskusi, kesalahan, dan perbaikan yang berjalan sedikit banyak mampu memberikan ingatan baik bagi peserta pada beberapa bagian kesulitan selama proses pencatatan transaksi keuangan

Pada kegiatan Kelas Belajar tersebut, Tim YSID juga melakukan pre test dan post test yang dilakukan dengan pengisian kuisisioner melalui link yang sudah disiapkan. Pada pre test dan post test ini, fasilitator pun mendampingi untuk memastikan seluruh peserta kelas belajar telah mengisi test dengan lengkap.

Adapun pre test dan post test berisi beberapa pertanyaan tentang dasar-dasar akuntansi, tata kelola keuangan BUMK, hingga studi kasus tertentu yang biasanya ditemukan pada laporan keuangan BUMK. Berikut ini merupakan grafik hasil pre test dan post test kelas belajar keuangan BUMK:

Gambar 9 Grafik Hasil Pre Test dan Post Test Kelas Belajar BUMK (Pesisir)



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh peserta mengalami peningkatan pengetahuan tentang materi yang dipelajari selama pelatihan. Adapun peserta B hanya mengikuti kelas hari pertama, dan peserta F baru mengikuti kelas pada hari kedua, sehingga tidak dapat dihasilkan perbandingan. Meski sebelumnya pernah menggunakan dan memahami akuntansi dasar, peserta mengaku tetap blank saat pre test dilakukan. Banyak dasar-dasar akuntansi seperti membedakan nama akun juga uang masuk dan uang keluar masih menjadi kendala setiap peserta. Namun, selama pelatihan 2 hari yang cukup padat dan intens, peserta mengaku lebih familiar serta membantu memecahkan beberapa pertanyaan dan kendala laporan keuangan selama ini. “Akuntansi memang harus belajar terus, dicoba, praktik,” ucap salah satu peserta kelas belajar

3) Hasil dan Tindak Lanjut

Materi belajar tentang Tata Kelola Pemerintahan Kampung banyak membuka perspektif baru bagi para staf kampung yang terlibat dalam pelatihan, yang rata-rata mereka masih berusia muda. Beberapa ide kritis muncul dari mereka, juga diskusi dan tanya jawab yang panjang, mulai dari isu stunting yang harus mulai menjadi concern bersama bagi semua kampung di Berau. Karena selama ini, pemerintah kampung dianggap tidak hadir secara khusus. Memang terdapat kegiatan pembinaan, namun itu program pusat. Sementara dukungan ekstra kampung belum ada. Maka dari itu, dibutuhkan sinergitas program. Selain itu, untuk menyiasati banyaknya program luar (bantuan dan kegiatan survey lapangan banyak lembaga) yang masuk ke kampung tanpa berkoordinasi. Maka pengelolaannya menjadi penting, dan kewenangan kampung perlu diletakkan pada tempatnya, agar tidak terjadi miskomunikasi, dan kampung mulai bisa mengarahkan detail-detail yang dibutuhkan. Tidak melulu mengikuti arahan permintaan pusat.



Untuk kasus Desa Pangunharjo, misalnya, program atau bantuan dari luar tidak ada yang tidak lewat pintu desa. Bahkan selalu dicocokkan dengan agenda desa. Prinsip tersebut dipakai agar pemerintah punya kendali terhadap semua program/bantuan yang ada, dan menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu terdapat pemahaman bersama bahwa pembentukan lembaga/kerjasama harus melalui desa. Jika tidak segala bentuk kerjasama tidak akan diakui. Itulah cara yang paling efektif.

Hasil dan tindak lanjut dari kegiatan Kelas Belajar Umum Pesisir Selatan adalah identifikasi masalah dan peluang Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK) untuk 6 lembaga baku, yakni RT, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM, LPHD (perhutanan sosial). Dan kemungkinan untuk 5 lembaga tambahan khusus yang mengurus bagian informasi data (IT), mediasi desa (Hukum), kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan. Namun syarat minimal untuk penambahan 5 lembaga khusus tersebut adalah adanya kemauan politik, delegasi kewenangan, isu yang diperlebar, dan keyakinan bersama bahwa lembaga dapat berkembang. Tanpa itu semua akan sulit terjadi.

Untuk kasus Berau yang paling mungkin bisa terjadi, bukannya penambahan 5 lembaga khusus seperti yang terjadi di Desa Pangunharjo, adalah revitalisasi keenam LKK. Dengan kata lain, LKK yang sudah ada lebih dioptimalkan lingkup tugas dan fungsi, masalah-masalah diidentifikasi lalu diharmonisasikan serta diatur dalam peraturan kampung. Seperti yang sudah terjadi di Kampung Merabu, di mana pemerintah kampung membuat harmonisasi antara LPHD, Pokdarwis, dan BUMK. Selain itu, masyarakat tidak boleh tinggal diam, masyarakat perlu membantu isu-isu yang dihadapi kampung.

Dalam hal ini yang dianggap paling mendesak, agar kewenangan kampung bisa terdistribusi dengan baik, adalah ide revitalisasi keenam LKK. Dari hasil diskusi dan rencana tindak lanjut, para peserta membuat rencana program, antara lain: Program Padat kerja 50 juta/RT, Penyediaan Air Bersih dengan Pengadaan Tandon Air Umum (tetapi harus dibuat regulasi pengaturannya, karena kasus di Kampung Tunggal Bumi, kampung pernah menganggarkan pembelian tandon untuk dibagi kepada warga-warga namun setelahnya banyak tandon yang dijual). Lalu Revitalisasi Karang Taruna (mulai dari kewenangan, fungsi, dan peran). Karang Taruna tidak lagi sebatas urusan olahraga, melainkan mulai terlibat dalam pendataan pendidikan dan sosial warga. Sebab digitalisasi data menjadi penting karena memungkinkan kampung mendesain pembangunan.



Selain itu pengurus Karang Taruna mulai dibekali keterampilan, skill desain, profiling. Dan pengurus Karang Taruna sudah harus bisa mengajukan usulan program (diluar bidang keolahragaan) ke ADK lalu dimasukkan di RPJM. Tetapi walaupun kemudian kampung merasa perlu membuat lembaga baru, selain 6 lembaga yang sudah ada hal itu tetap dimungkinkan dan punya dasar legalitas. Yakni PP 43/2014, Permendagri 18/2018, dan Pergub 75/2020 yang didalamnya dituangkan ketentuan mengenai pembentukan LKK ditetapkan melalui peraturan kampung.

Sementara itu, pada kelas tata kelola keuangan BUMK, selain berfokus untuk memberikan pemahaman kembali terhadap dasar-dasar keuangan dan akuntansi, Tim YSID juga terus berupaya memperbaiki, mengevaluasi, serta mendampingi penggunaan aplikasi keuangan berbasis excel yang pada periode AKS sebelumnya sudah terlebih dahulu dikenalkan. Mengingat salah satu evaluasi dari proses implementasi aplikasi tersebut yaitu waktu pelatihan yang dirasa kurang untuk transfer pengetahuan terkait aplikasi keuangan terkait. Oleh karena itu, selain kelas belajar yang berjalan, Tim YSID juga meminta setiap BUMK untuk mengirimkan catatan keuangan yang selama ini sudah digunakan, baik yang telah menggunakan aplikasi excel maupun belum. Bagi BUMK yang sudah menggunakan, Tim YSID melakukan pengecekan beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam proses pencatatan ke dalam aplikasi.

Di hari kedua, setiap BUMK mendapatkan sesi tersendiri untuk berdiskusi dan menerima revisi/masukan dari Tim YSID terkait catatan keuangan yang mereka miliki. Sedangkan bagi BUMK yang belum menggunakan aplikasi keuangan tersebut, Tim YSID membantu proses pencatatan awal dari catatan manual ke aplikasi excel selagi memungkinkan (atau dalam hal ini belum terlalu banyak transaksi yang harus diinput). Setelah itu, hasil revisi, perbaikan, maupun pencatatan diberikan kembali di hari kedua atau pada kesempatan lain melalui whatsapp kepada masing-masing BUMK untuk dilanjutkan proses pencatatan transaksinya. Untuk selanjutnya, Tim YSID akan terus berkomunikasi melalui daring dengan masing-masing bendahara dan/atau perwakilan BUMK untuk membantu proses penggunaan aplikasi keuangan apabila terdapat kendala dan diperlukan pendampingan lebih lanjut.



b. Kelas Belajar Besar (Tanjung Redeb)

Kelas Belajar Besar Tanjung Redeb dilaksanakan di Family Café, Tanjung Redeb, dengan sasaran peserta 18 Kampung dan 11 BUMK yang tersebar di Kecamatan Kelay, Segah, Sambaliung, Teluk Bayur, Maratua, Pulau Derawan. Secara spesifik sasaran peserta kegiatan belajar adalah Kepala Kampung dan Ketua BPK atau perwakilannya, Direktur dan Bendahara BUMK atau perwakilannya, serta tambahan Pejuang SIGAP Sejahtera. Berikut ini daftar kampung yang mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan Kelas Belajar Umum Tanjung Redeb yang dilaksanakan selama dua hari, antara tanggal 16 – 17 Maret 2023.

Tabel 13 Peserta Kelas Belajar Tata Kelola Pemerintahan Kampung (Tanjung Redeb)

No	Kampung	Hari Pertama	Hari Kedua
1	Suaran	Sekretaris Kampung, Ketua BPK, Staf Kampung (3 orang)	Sekretaris Kampung, Ketua BPK, Staf Kampung (3 orang)
2	Pandansari	Kepala Kampung dan Anggota BPK (2 orang)	Kepala Kampung dan Anggota BPK (2 orang)
3	Sido Bangen	Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan anggota BPK (3 orang)	Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan anggota BPK (3 orang)
4	Panaan	Kepala Kampung dan Staf Kampung (2 orang)	Kepala Kampung dan Staf Kampung (2 orang)
5	Mapulu	Kepala Kampung, Anggota BPK dan Staf Kampung (3 orang)	Kepala Kampung, Anggota BPK dan Staf Kampung (3 orang)
6	Long Beliu	Kepala Kampung dan Ketua BPK (2 orang)	Kepala Kampung dan Ketua BPK (2 orang)
7	Long Duhung	Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung (2 orang)	Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung (2 orang)
8	Long Pelay	Sekretaris Kampung (1 orang)	Sekretaris Kampung (1 orang)
9	Payung-payung	Sekretaris Kampung dan Ketua BPK (2 orang)	Sekretaris Kampung dan Ketua BPK (2 orang)
10	Teluk Harapan	Staf kampung (1 orang)	Staf kampung (1 orang)
11	Teluk Alulu	Ketua BPK dan Staf Kampung (2 orang)	Ketua BPK dan Staf Kampung (2 orang)
12	Bohe Silian	Kepala Kampung, Anggota BPK dan 2 Staf Kampung (4 orang)	Kepala Kampung, Anggota BPK dan 2 Staf Kampung (4 orang)



Tabel 14 Peserta Kelas Belajar Tata Kelola Keuangan BUMK (Tanjung Redeb)

No	Kampung	Hari Pertama	Hari Kedua
1	Pegat Batumbuk	Bendahara dan Anggota BUMK (2 orang)	Bendahara dan Anggota BUMK (2 orang)
2	Pandansari	Bendahara dan Anggota BUMK (2 orang)	Bendahara dan Anggota BUMK (2 orang)
3	Mapulu	Faskam (1 orang)	Faskam (1 orang)
4	Merapun	Faskam dan BUMK (2 orang)	Faskam dan BUMK (2 orang)
5	Long Beliu	Anggota BUMK (1 orang)	Anggota BUMK (1 orang)
6	Labanan Makarti	Bendahara BUMK dan Anggota (2 orang)	Bendahara BUMK dan Anggota (2 orang)
7	Labanan Jaya	BUMK (2 orang)	BUMK (2 orang)
8	Payung-Payung	Direktur BUMK dan Bendahara BUMK (2 orang)	Direktur BUMK dan Bendahara BUMK (2 orang)
9	Teluk Alulu	Faskam (1 orang)	Faskam (1 orang)
10	Teluk Harapan	Direktur BUMK dan Bendahara sementara (2 orang)	Direktur BUMK dan Bendahara sementara (2 orang)
11	Bohe Silian	Direktur BUMK dan Faskam (2 orang)	Direktur BUMK dan Faskam (2 orang)

Sementara Pejuang SIGAP Sejahtera yang ikut pelatihan berjumlah 12 orang. Antara lain Sekab SIGAP Sejahtera (2 orang), Korcam Segah, Korcam Kelay, Korcam Maratua, Faskam Long Beliu, Faskam Sidobangen, Faskam Pandansari, Faskam Teluk Alulu, Faskam Bohe Silian, Faskam Mapulu, dan Faskam Merapun.

Sementara itu terdapat 4 kampung yang tidak mengikuti kegiatan Kelas Belajar Umum Tanjung Redeb pada AKS #3. Antara lain Kampung Teluk Semanting, Long Lamcin, Long Keluh, Long Suluy.



1) Fokus Bahasan

Dari proses assessment yang dilakukan di Wilayah Hilir dan Wilayah Hulu selama 17 hari (antara tanggal 7 – 23 Februari 2023) didapatkan beberapa kesimpulan: Pertama, kampung-kampung di Wilayah Hulu masih terkendala pada kapasitas sosial, kapasitas proses dan birokrasi, kapasitas politik dan kepemimpinan. Kedua, kampung di Wilayah Hilir secara kapasitas politik dan kepemimpinan juga kurang, sangat sedikit yang visioner. Ketiga, baik itu di hulu dan hilir, partisipasi politik warga hanya bagus ketika pilkacam. Keempat, pembuatan peraturan kampung bersifat reguler. Kelima, kampung tidak memiliki kapasitas jaringan. Keenam, kapasitas distributif tidak dipahami bahkan dianggap mustahil diterapkan di Berau.

Selain penjelasan hasil assessment, para peserta diberikan materi asal-usul dan kewenangan kampung. Mereka diberi pemahaman bahwa kampung/desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan berdasar prakarsa warga, hak asal-usul, dan hak adat. Kampung secara administratif berkedudukan di kabupaten, namun itu tidak serta merta menjadikan kampung bawahan kabupaten. Justru kampung memiliki hak kewenangan dan hak distribusi yang membedakannya dengan komunitas. Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui negara. Selain itu ikut dijelaskan bahwa hak asal-usul merupakan hak yang melekat pada kampung. Namun pemerintah masih harus melakukan pembagian kewenangan karena tidak semua hal diurus kampung di satu sisi. Di sisi lain, pemerintah kabupaten tidak berhak sepenuhnya mengatur kampung. Kampung tetap bisa mengurus dirinya sendiri. Tantangan lain bagi kampung-kampung di Berau adalah inisiatif membuat legislasi sebanyak mungkin yang sudah diatur dalam undang-undang.

Maka, selain partisipasi warga yang menjadi penting, yang harus dipahami bersama terkait proses legislasi kampung adalah (1) kampung memiliki kewenangan birokrasi, (2) kewenangan asal-usul, (3) kewenangan membentuk dan menjalankan organisasi, (4) kewenangan pembinaan kelembagaan, (5) kewenangan pengelolaan tanah kas kampung, (6) kewenangan pengembangan peran warga dalam pembangunan, dan (7) efektivitas peran lembaga kampung dan perluasan kewenangan.

Berangkat dari hasil assessment yang menunjukkan bahwa kampung di Wilayah Hulu masih memiliki gap cukup banyak dalam kapasitas sosial, kapasitas proses dan birokrasi, kapasitas politik dan kepemimpinan, maka YSID memutuskan membuat Kelas Legislasi untuk Tata Kelola Pemerintahan Kampung pada AKS #3 di Tanjung Redeb.



Sementara pada kelas Tata Kelola BUMK, isu akuntabilitas masih menjadi perhatian pada kegiatan AKS #3 tahun ini. Peserta diberikan pemahaman mengenai salah satu dari tiga perspektif BUMK yaitu perspektif ekonomi menjelaskan bahwa BUMK harus dipahami sebagai entitas ekonomi yang oleh karena perilakunya harus bisa dilihat dengan kaca mata bisnis. Adapun pendekatannya yaitu melalui entrepreneurship dengan ukuran keberhasilan profitabilitas. Keuangan menjadi penting karena dapat digunakan untuk menjaring informasi yang komprehensif tentang bisnis yang berjalan. Selain menunjukkan kesehatan keuangan, laporan keuangan juga memungkinkan pengurus BUMK maupun pemberi modal untuk menilai dan membuat keputusan bisnis yang tepat melalui penentuan berbagai strategi seperti intensifikasi, ekstensifikasi, inovasi, ataupun diversifikasi guna mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Selain itu, selama proses asesmen juga ditemukan bahwa isu transparansi kerap menjadi pemantik ketidakpercayaan masyarakat pada BUMK, yang kemudian juga menghambat proses bisnis yang berjalan. Oleh karena itu, melalui laporan keuangan yang akurat dan transparan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan berbagai pemangku kepentingan kepada BUMK yang kemudian dapat berperan dalam menarik investasi dan memperluas kerja sama atau kemitraan baru.

Adapun pada kelas tata kelola keuangan BUMK hari pertama dimulai dengan memahami perbedaan proses entrepreneurship dan management. Dimana keuangan menjadi bagian dalam proses mengelola usaha menjadi sehat dan akuntabel atau dalam hal ini termasuk dalam proses management itu sendiri. Setelah memahami posisi keuangan dalam proses bisnis, peserta juga diberikan pemahaman struktur tata kelola BUMK berdasar PP 11/2021 dimana mereka dapat mengetahui dimana fungsi pengaturan, pengurusan, dan pengelolaan berada, termasuk juga beberapa pengaturan tentang kewenangan musyawarah desa. Setelah itu peserta juga diberikan materi terkait sistem manajemen BUMK, pola pengelolaan keuangan, dan struktur pengelola keuangan BUMK. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai konsep dasar dalam berbisnis, bagaimana kendali efektivitas dan efisiensi saling terikat satu sama lain. Termasuk di dalamnya rumus dasar bisnis yang bertumpu pada pendapatan dikurangi biaya.

Setelah memahami dasar-dasar bisnis dan pengaturan terkait pengelolaan keuangan, kelas dilanjutkan dengan materi pengantar akuntansi yang dimulai dengan logika dan persamaan dasar akuntansi yaitu hubungan asset, hutang, dan modal. Setelah itu materi dilanjutkan dengan memahami alur keuangan mulai dari memahami jenis transaksi, pencatatan, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja bisnis BUMK, ditinjau dari laporan keuangan dalam satu periode akuntansi.



Proses tersebut kemudian dapat dilakukan dengan pendekatan aplikasi keuangan BUMK yang berbasis excel. Adapun aplikasi keuangan ini sudah disesuaikan dengan format Permendesa no. 3 tahun 2021. Setelah itu peserta baik yang sudah, sedang, maupun belum aktif menggunakan aplikasi keuangan memahami kembali tentang pencatatan dan pelaporan keuangan BUMK yang adjustable. Setelah itu pelatihan hari pertama ditutup dengan materi pencatatan keuangan beserta pos-pos akun yang harus dipahami peserta.

Pada hari kedua, kelas dimulai dengan pengenalan kembali enam puluh daftar akun dan posisinya dalam akuntansi. Kemudian dilanjutkan dengan praktik uji coba mengerjakan soal-soal dari tim materi secara berulang. Setelah peserta mulai terbiasa mengerjakan soal akuntansi, peserta kemudian mulai dikenalkan dengan proses pengisian pada aplikasi keuangan berbasis excel yang nantinya akan dibagikan kepada masing-masing bendahara BUMK. Sebagai penutup kelas belajar, peserta juga diberikan pengantar mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang menjelaskan lebih deskriptif tentang laporan keuangan dan justifikasi kondisi atas laporan keuangan yang dimiliki. BUMK juga akan mampu menakar indikasi kondisi bisnis yang dijalankan melalui laporan laba/rugi, dan kesehatan keuangan organisasi melalui laporan neraca.

2) Dinamika Kelas

Kegiatan Kelas Belajar Umum Tanjung Redeb dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Maret 2023 di Family Café, Tanjung Redeb. Berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Kelas Belajar Pesisir Selatan, Kelas Belajar Tanjung Redeb berjalan maksimal dan antusiasme peserta sangat tinggi. Dari 18 Kampung yang diundang, hanya lima kampung tidak hadir. Selain itu, antusiasme peserta, dibuktikan dengan kehadiran Kepala Kampung, Ketua BPK, Direktur dan Bendahara BUMK, serta para Pejuang SIGAP Sejahtera untuk mengikuti Kelas Tata Pemerintahan Kampung dan Tata Kelola Kelembagaan BUMK.

Pada hari pertama dan hari kedua pelaksanaan Kelas Belajar Tata Kelola Pemerintahan Kampung diikuti oleh 28 peserta dari 13 kampung. Sementara Kelas Belajar Tata Kelola Kelembagaan BUMK pada dua hari pelaksanaan diikuti oleh 19 peserta dari 10 kampung. Kegiatan selama dua hari tersebut dibagi menjadi empat sesi. Untuk kelas Tata Kelola Pemerintahan Kampung, sesi pertama adalah perkenalan dan pretest, sesi kedua membahas kewenangan kampung dan pentingnya data, sesi ketiga adalah proses pengusulan legislasi dan simulasi. Sesi keempat, paparan dan diskusi usulan legislasi yang ingin dijadikan draft perkam dan raperkam.



Gambar 10 Dokumentasi Kelas Belajar Besar Tata Kelola PemKam (Tanjung Redeb)





Adapun selama proses pelatihan terdapat beberapa catatan terkait persoalan di masing-masing kampung sebagai berikut:

Tabel 15 Catatan Persoalan Kampung di Kelas Belajar Tanjung Redeb

No	Kampung	Catatan Persoalan
1	Sido Bangen	Pengaturan hewan ternak dan hewan peliharaan. Masalah yang dihadapi adalah banyak ternak yang berkeliaran dan membuang kotoran sembarangan. Di sisi lain, hewan peliharaan juga menanam tanaman warga, selain itu ada hewan peliharaan memakan hewan ternak. Hal ini bisa menimbulkan konflik antara warga. Ke depan, jika hal ini diatur maka akan membuat hewan ternak bisa tumbuh berkembang biak.
2	Long Beliu	Pengaturan hewan peliharaan (anjing). Kasus yang dihadapi adalah hewan anjing sering berkeliaran di jalan yang mengganggu akses kendaraan. Selain itu juga ada kasus rabies. Warga harapannya bisa mengandangkan anjing, selain itu mengatur jumlah anjing di kampung, misalnya anjing peliharaan di masing-masing rumah ada berapa. Kampung ini pernah membuat perkam, dulunya anjing diajak untuk berburu. Namun sekarang, di Long Beliu, anjing tidak dimaksimalkan untuk berburu. Anjing sekarang banyak yang stress, karena tidak dipergunakan untuk berburu. Harapannya agar kampung bisa aman, sehat dan bersih.
3	Suaran	Masalahnya Kawasan Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (luasan wilayah suaran kurang lebih 55.000 Ha tetapi lahan APL hanya 5.500 Ha termasuk Areal Perairan). Karena sumber penghasilan/pekerjaan Desa Suaran, yaitu berkebun, petani, nelayan dan petambak. Dampaknya adalah tidak tercapainya pembangunan jalan usaha tani karena terbentur dengan lahan produksi menjadi Areal Penggunaan Lain. Agar masyarakat bisa membangun jalan usaha tani di wilayah APL tersebut. Dampaknya yang diharapkan untuk meningkatkan pemberdayaan/perekonomian masyarakat
4	Pandan Sari	Masalahnya masyarakat menggunakan/membangun fasilitas di lahan kampung/tanah. Ini menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Kampung mengharapkan agar mengatur ini agar nantinya bisa mengatur penggunaan tanah yang ada. Karena Sebagian besar lahan digunakan untuk usaha/warung. Kampung Pandansari adalah kampung transmigrasi, sehingga warga yang datang duluan yang mengambil tanah. Di Long Beliu, ada kasus juga seperti ini. Ada oknum dimana sudah diketahui jika tanah yang jadi fasilitas umum. Namun saat dikelola oleh pemkam untuk kebutuhan masyarakat, itu ada oknum yang mengaku memiliki lahan tersebut, tapi tidak bisa memberikan data yang ada. Hanya pengakuan secara sepihak. Hal ini bisa menimbulkan konflik turun temurun di warga.

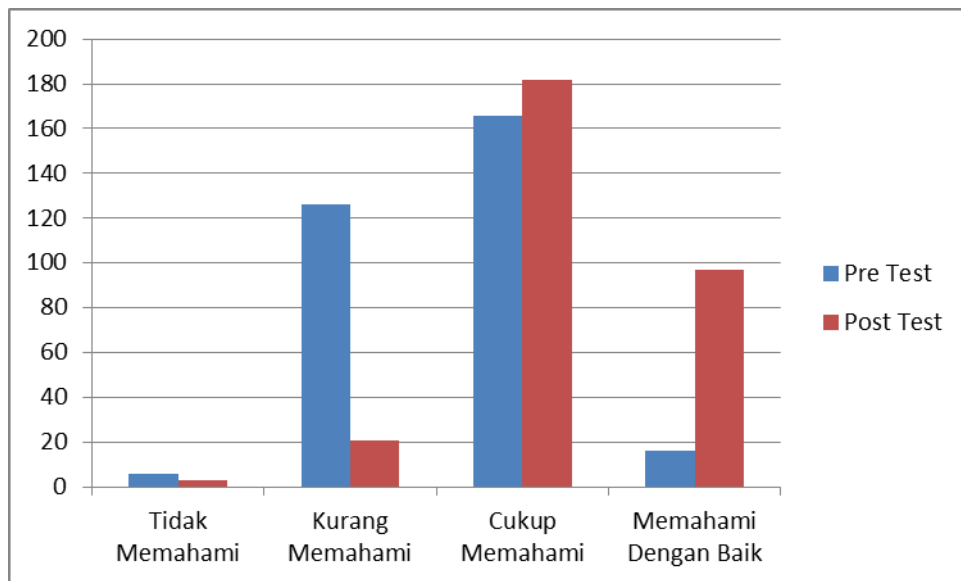


No	Kampung	Catatan Persoalan
5	Payung - Payung	Retribusi atau pungutan. Maratua merupakan salah satu obyek wisata di Kabupaten Berau. Mengapa ini menjadi masalah, karena ada beberapa obyek yang dimiliki oleh kelompok atau perorangan ketika dibuka. Hal ini rentan menimbulkan masalah. Mereka bisa memungut retribusi, sementara daerah tidak memungut retribusi. Dampaknya ada laporan pungutan liar dan nantinya bisa menimbulkan konflik di masyarakat atau berimbas pada kelompok/individu pengelola. Dengan diatur, maka akan jelas tata kelola obyek wisata, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan PAK.
6	Teluk Alulu	Ada masalah sampah. Dampaknya, wisatawan khawatir dengan sampah dan mengurangi pengunjung. Di Maratua sejak tahun 2000an, sudah ada resort yang dibangun di lokasi yang dibangun oleh investor. Misalnya, di Payung-Payung, ada 7 resort dan belum memiliki aturan kerjasama atau perjanjian untuk pemberian dana CSR. Dan belum semua memberikan dana CSR. Ketika tidak ada aturan dari resort ke kampung, maka akan bisa jadi pungli karena tidak ada aturan (perkam/perkakam). Sekarang, Pemkab sedang berproses untuk melakukan lobi dan negosiasi kerjasama yang akan dilakukan dengan CSR resort.
7	Bohe Silian & Teluk Harapan	Masalah sama mengenai bantuan ADK untuk janda dan duda (dana dan kriteria penerima bantuan). Dampaknya karena ada kecemburuan sosial dalam masyarakat karena dalam aturan itu mengatur pemberian bantuan pada janda dan duda. Masyarakat di Maratua, banyak janda kaya. Sedangkan ternyata janda/duda yang kaya mendapat bantuan. Hal ini harus diatur supaya tidak terjadi konflik di masyarakat. Di sisi lain itu juga membantu kampung memberikan bantuan sesuai peruntukan yang membutuhkan.
8	Mapulu	Kesulitan akses air bersih, masih mengambil air sungai dan cukup jauh. Meskipun air sungai masih bersih. Perlu dibuat saluran irigasi untuk menyalurkan air bersih dari sungai ke rumah-rumah warga. Proses hari ini masih pada pelaporan ke Dinas PU dan belum ada tindak lanjut.



Selain itu, pada kegiatan Kelas Belajar tersebut, Tim YSID juga melakukan pre test dan post test yang dilakukan dengan pengisian kuisisioner melalui link yang sudah disiapkan. Pre test dan post test berusaha merekam pemahaman peserta tentang materi pelatihan yang meliputi kewenangan pemerintah kampung, peran dan fungsi, dll. Adapun pemahaman tersebut dikualifikasikan pada empat level yaitu kurang memahami, cukup memahami, memahami dengan baik, sangat memahami.

Gambar 11 Grafik Hasil Pre Test dan Post Test Kelas Belajar Pemkam (Tanjung)



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat secara umum terjadi pergeseran pemahaman dari yang sebelumnya peserta didominasi pada level kurang memahami dan cukup memahami, kemudian hasil post test menunjukkan sebagian besar peserta telah mencapai level cukup memahami dan memahami dengan baik. Selain itu jumlah yang tertera pada grafik memang mengalami penurunan mengingat terdapat perbedaan jumlah antara yang mengisi pre test dan post test, hal ini berkaitan dengan kehadiran peserta yang berbeda antara hari pertama dan kedua. Meski demikian, perbedaan jumlah peserta kelas Tanjung tidak begitu jauh mengingat antusias peserta cukup baik jika dibandingkan dengan Kelas Belajar Wilayah Pesisir.





Sementara untuk kelas Tata Kelola Kelembagaan BUMK, sesi pertama diisi dengan materi konsep dalam proses bisnis dan pengaturan tata kelola BUMK sesuai dengan PP 11/2021. Kemudian sesi kedua diisi dengan pemahaman pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Pemkab dan pemahaman dasar-dasar akuntansi sebagai alat untuk melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Sesi ketiga pada hari kedua dilanjutkan dengan memahami cara kerja aplikasi keuangan berbasis excel untuk digunakan sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan.

Kegiatan Kelas Belajar Tanjung Redeb dibuka perwakilan dari YKAN, Chris Djoka, dan ditutup Sekretaris Dinas DPMK Berau. Dalam kata sambutan ditegaskan bahwa, "Kampung-kampung di Berau harus dapat menemukan inovasi jika ingin seperti Desa Panggungharjo, Yogyakarta. Kita (kampung-kampung Berau) harus bersatu, harus bisa berekosistem satu sama lain. Dan Sumberagung menjadi contoh "role model" Tata Kelola Pemerintahan Kampung dari keberhasilan pendampingan YSID. Sementara Labanan Makarti menjadi contoh "role model" Tata Kelola Kelembagaan BUMK dari keberhasilan pendampingan YSID."

Kegiatan Kelas Belajar Umum Tanjung Redeb yang dilaksanakan selama dua hari tersebut sangat ramai, para peserta mengidentifikasi masalah yang ada di kampung masing-masing lalu bersama-sama mencari cara penyelesaiannya. Sementara di kelas BUMK, peserta juga mengaku lebih terbantu dan antusias pada sesi pelatihan pencatatan keuangan karena tidak cuma melulu berisi materi namun juga dapat mempraktikkan langsung.

Pada kelas BUMK, peserta diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal secara manual pada lembar plano. Hal ini dimaksudkan agar setiap peserta tetap mampu memahami logika dasar akuntansi dan asal usul sistem pencatatan yang mereka gunakan. Dengan waktu yang cukup, peserta juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan dan menyampaikan hasil pekerjaan sesuai dengan pemahaman masing-masing yang kemudian ditanggapi oleh peserta lain. Proses diskusi, kesalahan, dan perbaikan yang berjalan, sedikit banyak mampu memberikan ingatan baik bagi peserta pada beberapa bagian kesulitan selama proses pencatatan transaksi keuangan.

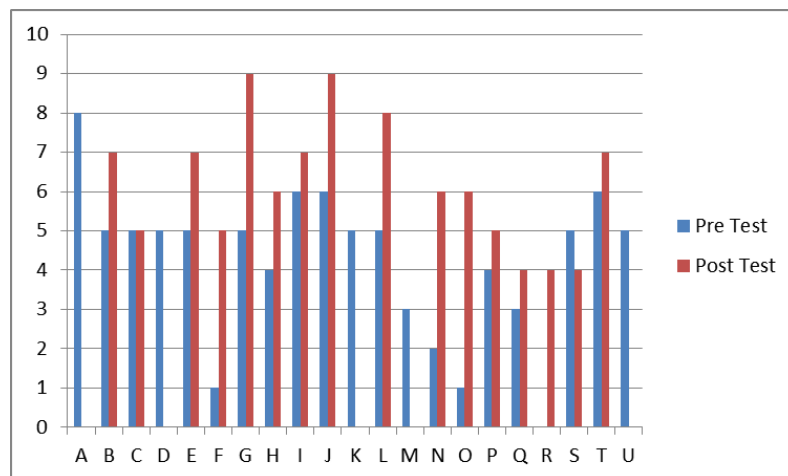


Gambar 12 Dokumentasi Kelas Tata Kelola Keuangan BUMK (Tanjung Redeb)



Sama halnya seperti Kelas Belajar yang telah dilaksanakan sebelumnya di wilayah pesisir, pada kegiatan Kelas Belajar wilayah Tanjung Tim YSID juga melakukan pre test dan post test yang dilakukan dengan pengisian kuisioner melalui link yang sudah disiapkan. Pada pre test dan post test ini, fasilitator pun mendampingi untuk memastikan seluruh peserta kelas belajar telah mengisi test dengan lengkap. Adapun pre test dan post test berisi beberapa pertanyaan tentang dasar-dasar akuntansi, tata kelola keuangan BUMK, hingga studi kasus tertentu yang biasanya ditemukan pada laporan keuangan BUMK. Berikut ini merupakan grafik hasil pre test dan post test kelas belajar keuangan BUMK:

Gambar 13 Grafik Hasil Pre Test dan Post Test Kelas Belajar BUMK (Tanjung)





Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh peserta mengalami peningkatan pengetahuan tentang materi yang dipelajari selama pelatihan. Adapun terdapat 3 peserta (A, M, U) yang hanya mengikuti kelas hari pertama dan tidak mengikuti kelas pada hari kedua, sehingga tidak dapat dihasilkan pembandingan. Hampir sama seperti kelas belajar wilayah pesisir, bahwa saat dilakukan pre test, masih banyak peserta yang kebingungan menjawab pertanyaan seputar dasar-dasar akuntansi seperti memahami nama akun juga membedakan uang masuk dan uang keluar. Namun, selama pelatihan 2 hari yang cukup padat dan intens, peserta mengaku lebih familiar serta membantu memecahkan beberapa pertanyaan dan kendala laporan keuangan selama ini. Jika dibandingkan dengan di kelas belajar pesisir, pada kelas belajar wilayah Tanjung menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat peserta yang cukup aktif melakukan diskusi dan praktik secara bersama. Apabila menghadapi kendala atau kesulitan, fasilitator dan narasumber memberikan pendampingan untuk membahas jawabannya secara bersama, sehingga peserta lebih mudah memahami hal-hal yang sebelumnya mereka belum menguasai.

3) Hasil dan Tindak Lanjut

Materi kelas belajar “legislasi kampung” untuk Tata Kelola Pemerintahan Kampung dan kelas belajar “akuntansi” untuk Tata Kelola Kelembagaan BUMK pada kluster Tanjung Redeb disambut antusias para peserta. Selama dua hari kegiatan pelatihan mereka merasa mendapatkan perspektif baru. Sejumlah ide kritis muncul dari proses diskusi yang panjang.

Mengenai kewenangan legislasi yang dimiliki kampung, sebetulnya banyak kepala kampung mengetahui hal tersebut. Tetapi persoalannya kemudian, seperti yang disampaikan oleh Kepala Kampung Long Beliu dalam kelas belajar. “Kami dibatasi oleh regulasi yang ada (aturan dari kabupaten). Betul, anggaran yang masuk ke kampung sampai miliaran. Namun banyak program titipan dan kami perlu mengeceknya. Kami merasa belum mendapatkan kewenangan penuh.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak usulan seringkali terbentur oleh regulasi yang dibuat lembaga di atasnya. Bahkan implementasinya tidak pas atau jauh dari harapan. Pada kasus Desa Panggungharjo, jika mereka menemukan benturan regulasi, mereka akan berkirim surat kepada pemerintah kabupaten atau bahkan pemerintah pusat untuk membuka akun “yang dikunci” agar bisa diakses secara bertahap.



Hal lain yang menjadi tindak lanjut bersama ialah seberapa serius kepala kampung mengurus kampung. Untuk serius mengurus kampung, kepala kampung harus punya kapasitas regulasi, kapasitas ekstraktif, kapasitas distributif, kapasitas responsif dan kapasitas jaringan. Jika kesemua hal tersebut dimiliki kepala kampung, maka rencana strategis pembangunan dan anggaran pendapatan belanja kampung lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan lain yang dibahas dalam kelas belajar Pemerintahan Kampung adalah pentingnya data, bagaimana cara membaca dan menginterpretasi data, bahkan sampai pada tahapan data didorong untuk penyusunan regulasi. Dalam kasus kampung-kampung di Berau, seperti dijelaskan perwakilan dari Kampung Bohe Silian dan diamini peserta lain, “Kampung-kampung sudah punya bank data, sebagian mampu menerjemahkan data, namun untuk pengolahan data tersebut masih banyak yang kebingungan. Kami memahami pentingnya regulasi dan data. Tapi sekali lagi kualitas sumber daya manusia, kurangnya tenaga ahli, menjadi kendala data tidak dapat diolah di kampung-kampung.”

Cara membaca atau melihat data itu ada dua macam, yakni melihat persoalan dan melihat peluang dari data. Dengan kata lain, yang pertama, data (entah data kuantitatif atau data kualitatif) dipahami untuk menyelesaikan masalah. Dan, yang kedua, data dibaca untuk menangkap peluang. Dalam sekali waktu keduanya dibaca dan disandingkan bisa sebagai data tunggal atau data *cross tab*.

Karena itulah dibutuhkan pendampingan secara khusus, intens, kontinyu, mulai dari penyusunan APBK yang benar, pengelolaan sistem informasi kampung, pengolahan data, pembuatan regulasi dan distribusi kewenangan kampung. Kemudian pertanyaannya, strategi seperti apakah yang dipilih untuk pembuatan kebijakan? Pertama, edukasi tingkat warga. Kedua, pemberlakuan larangan/sanksi. Ketiga, pemberian insentif dapat dijadikan strategi perubahan sosial. Keempat, regulasi dibuat, ditetapkan, dan dijalankan. Kelima, apabila regulasi kampung terhalang oleh Pergub atau peraturan lainnya, komunikasikan. Sebab kampung pada dasarnya memiliki kedaulatan penuh. Dan kedaulatannya ada di musyawarah kampung.

Harapan ke depan, pada program-program berikutnya, pendampingan YSID ke kampung-kampung dilakukan secara langsung (live in) dan durasi waktu lebih lama. Pertama, supaya tim YSID lebih dekat dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Kedua, mengetahui dinamika usulan/persoalan masyarakat secara langsung. Ketiga, dapat menemani proses inovasi-inovasi bertumbuh.



Sementara itu, pada kelas tata kelola keuangan BUMK, selain berfokus untuk memberikan pemahaman kembali terhadap dasar-dasar keuangan dan akuntansi, Tim YSID juga terus berupaya memperbaiki, mengevaluasi, serta mendampingi penggunaan aplikasi keuangan berbasis excel yang pada periode AKS sebelumnya sudah terlebih dahulu dikenalkan. Mengingat salah satu evaluasi dari proses implementasi aplikasi tersebut yaitu waktu pelatihan yang dirasa kurang untuk transfer pengetahuan terkait aplikasi keuangan terkait. Oleh karena itu, selain kelas belajar yang berjalan, Tim YSID juga meminta setiap BUMK untuk mengirimkan catatan keuangan yang selama ini sudah digunakan, baik yang telah menggunakan aplikasi excel maupun belum. Bagi BUMK yang sudah menggunakan, Tim YSID melakukan pengecekan beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam proses pencatatan ke dalam aplikasi.

Paska pelatihan, setiap BUMK yang mengirimkan laporan keuangan mereka akan mendapat review dari Tim YSID terkait catatan keuangan masing-masing. Sedangkan bagi BUMK yang belum menggunakan aplikasi keuangan tersebut, Tim YSID membantu proses pencatatan awal dari catatan manual ke aplikasi excel selagi memungkinkan (atau dalam hal ini belum terlalu banyak transaksi yang harus diinput). Setelah itu, hasil review, perbaikan diberikan kembali paska pelatihan melalui whatsapp kepada masing-masing BUMK untuk dilanjutkan proses pencatatan transaksinya. Untuk selanjutnya, Tim YSID akan terus berkomunikasi melalui daring dengan masing-masing bendahara dan/atau perwakilan BUMK untuk membantu proses penggunaan aplikasi keuangan apabila terdapat kendala dan diperlukan pendampingan lebih lanjut. Meski demikian, sampai hari laporan ini ditulis masih ada beberapa BUMK yang belum memberikan respon atau mengirimkan catatan keuangan mereka sehingga Tim YSID belum dapat memberikan feedback terkait.

3. Inisiasi Kampung Model

a. Tata Kelola Pemerintahan Kampung

Pada AKS #3 ini inisiasi kampung model yang difasilitasi oleh Tim YSID adalah Kampung Sumberagung, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Hal yang dilakukan Tim YSID adalah mendokumentasi berbagai pengalaman dan praktik baik tata kelola pemerintahan Kampung Sumberagung untuk dijadikan model pengetahuan terstruktur dan siap disebar ke banyak kampung di Kabupaten Berau dalam bentuk:

- 1) Buku Sejarah Kampung Sumberagung
- 2) Data biner PPT (Power Point Presentation) Kampung Sumberagung
- 3) Peta digital sosial Kampung Sumberagung
- 4) Kebijakan remunerasi berbasis kinerja



Pendokumentasian sejarah kampung Sumberagung harapannya adalah menjadi transfer pengetahuan untuk generasi muda sekaligus dapat dijadikan “role model” kebijakan bagi kampung lain. Sementara data biner PPT Kampung Sumberagung jadi ukuran capaian, karena hasil keluaran berupa dokumen presentasi (PPT) dipakai oleh Kepala Kampung Sumberagung untuk keperluan campaign keberhasilan Sumberagung di banyak forum penting. Sedangkan peta digital sosial Kampung Sumberagung dibuat karena kebutuhan data yang perlu ditingkatkan setelah kemenangan Kampung Sumberagung dalam Lomba Desa Tingkat Regional III Tahun 2022.

Selain itu pembuatan peta digital menjadi cerminan bahwa model ekosistemik atau kerja sama para-pihak (dalam hal ini antara Pemerintah Kampung Sumberagung, Tim YSID, Perkumpulan Perisai) yang diinisiasi oleh Tim YSID dapat dipraktikkan di Berau. Sementara kebijakan remunerasi berbasis kinerja pegawai dianggap penting dan mendesak serta perlu dibuat karena kampung memiliki Pendapatan Asli Kampung (PAK) cukup besar dari hasil pengelolaan sawit sekitar 500 juta/setahun, dan ukuran capaian ini adalah materi draft rencana peraturan kampung. Kegiatan inisiasi kampung model Tata Kelola Pemerintahan Kampung Sumberagung ini juga termasuk bagian dari kegiatan desk pembelajaran khusus. Waktu pelaksanaan kunjungannya antara tanggal 21 - 22 Februari 2023 dan 11 - 18 April 2023 serta 13 - 14 Mei 2023.

b. Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung

Pada AKS #3 peningkatan bagi BUMK terpilih, yakni Kampung Merabu, Kampung Long Ayan, Kampung Labanan Makarti, Kampung Talisayan, dan empat kampung di Kecamatan Maratua, meliputi penguatan kapasitas dasar dan penguatan kapasitas teknis. Berdasarkan hal tersebut, penguatan kapasitas difokuskan pada tiga hal pokok: Pertama, penyesuaian tata kelembagaan. Kedua, perencanaan dan pemilihan usaha. Ketiga, penerapan sistem pelaporan keuangan. Selain itu dilakukan penguatan perspektif sosial dan bisnis BUMK.

Adapun kegiatan Training of Trainer (ToT) BUMK Model bagi Sekolah BUMK yang telah diinisiasi pada Kampung Labanan Makarti dilakukan bersamaan dengan proses assessment. Bila tahun sebelumnya berfokus pada konten, pada tahun ini berfokus pada refreshment materi. Hal penting lain yang dilakukan oleh Tim YSID adalah memfasilitasi pembuatan Sistem Informasi Kampung Terpadu (SIKT) Kampung Labanan Makarti sebagai salah satu persyaratan dasar penilaian Lomba Kampung Tingkat Kabupaten Berau Tahun 2023. Dalam penilaian lomba, Kampung Labanan Makarti berhasil mendapatkan predikat Juara I Tingkat Kabupaten dan mewakili di tingkat provinsi Kalimantan Timur.



Selain itu, Tim YSID memfasilitasi pengembangan BUMK Bersama di Wilayah Pesisir untuk empat kampung di Kecamatan Maratua. Tim YSID menaruh harapan besar dari pendampingan ini muncul model BUMK Bersama yang sesuai karakteristik Wilayah Pesisir Berau serta dapat direplikasi di tempat lain. Pada tanggal 6-8 Maret 2023, BUMK Bersama Maratua berhasil menyelenggarakan Dakayu Malatua Festival – festival seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang pertama diadakan serta direncanakan menjadi event tahunan Maratua– hasil kolaborasi parapihak, mulai Pokdarwis, PKK, BUMK Tembudan, Maratua Peduli Lingkungan, sampai Yayasan Penyuu Indonesia, dan banyak lagi. Terkait BUMDES Bersama, juga terjalin kerjasama antara YSID dan DPMK di mana salah satu Tim YSID diminta menjadi pemateri Pelatihan Akuntansi BUMDES Bersama se-Kabupaten Berau.

Untuk pengembangan model BUMK di Wilayah Hulu Kelay dan Hulu Segah, yang difokuskan pada BUMK Kampung Merabu serta BUMK Kampung Long Ayan, masih pada penguatan kapasitas dasar dan kapasitas teknis terkait tata kelembagaan, perencanaan dan pemilihan jenis usaha, serta tata cara pelaporan keuangan.

4. Desk Pembelajaran Khusus

a. Kelas Muara Wahau

Mini training di Kecamatan Muara Wahau dilakukan dengan sasaran enam desa di Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur yang menjadi sasaran program Akademi Kampung Sigap #3. Keenam desa itu adalah Nehas Liah Bing, Bea Nehas, Long Wehea, Diaq Lay, Dea Beq, dan Diaq Leway. Dan kegiatan dilakukan pada 20 – 21 Maret 2023. Pasca kegiatan mini training, dan sampai program AKS #3 selesai, salah satu local officer YSID melakukan mentoring dan asistensi secara rutin untuk 6 desa di Kecamatan Muara Wahau.

Gambar 14 Dokumentasi mini training di Kecamatan Muara Wahau





1) Fokus Bahasan

Dari proses assessment terhadap tata kelola pemerintahan desa, hasil analisis menunjukkan bahwa dua desa menunjukkan status “cukup” dan empat desa lainnya menunjukkan status “kurang”. Dari kesemuanya, gap terbesar terdapat pada kapasitas politik dan kepemimpinan, sementara kapasitas sosial menunjukkan gap yang tidak terlalu signifikan. Kapasitas sosial yang sudah dimiliki, serta kesejahteraan masyarakat (dibuktikan dengan besarnya perputaran ekonomi di wilayah tersebut) tidak akan berarti apapun jika pemerintah kampung tidak mampu menjadikannya modal sosial bagi penyokong kemandirian kampung. Dari fakta tersebut, maka penting untuk mendudukkan kembali pemahaman basis kewenangan kampung sebagai prasyarat untuk terus bertumbuh.

Fakta lain yang ditemukan adalah, adanya pergantian kepala desa serta gerbong aparatur di empat desa baru-baru ini, yakni Nehas Liah Bing, Bea Nehas, Dea Beq, dan Diaq Leway. Pemahaman basis kewenangan inilah yang penting ditanamkan, agar perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa saling terkoneksi secara komprehensif terhadap visi dan misi kepala desa, serta membangun imajinasi pemanfaatan berbagai peluang yang ada dan memitigasi berbagai tantangan.

Sementara pada sisi Bumdes, hanya Desa Nehas Liah Bing yang sudah mendirikan Bumdes, namun kapasitas pengelolaan masih stagan, belum terbangun mekanisme kelola antara Bumdes – Pemerintah Desa – Musdes, bahkan cenderung mengarah ke arah privatisasi. Dari fakta tersebut, pembahasan terkait Bumdes difokuskan pada membangun ulang pemahaman terhadap filosofi Bumdes.

2) Dinamika Kelas

Kegiatan dilakukan pada 20 – 21 Maret 2023 di Balai Adat Desa Nehas Liah Bing ini bertepatan dengan pra-acara Pesta Adat Lom Plai, sehingga kurang mendapat atensi. Hanya Desa Nehas Liah Bing yang menunjukkan atensi bagus, dibuktikan dengan kehadiran Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta beberapa aparatur desa untuk mengikuti kelas. Kepala Desa Diaq Leway juga mengikuti kelas selama dua hari. Sementara empat desa lain kurang menganggap serius kelas ini, hal ini dapat ditakar lantaran kehadiran yang hanya diwakilkan kepada staf desa.

Kegiatan selama empat hari ini dibagi menjadi empat sesi. Sesi pertama hingga ketiga membahas tentang kewenangan desa dan mekanisme penyusunan RPJMDes. Pada sesi ini selain paparan materi, peserta juga diajak mensimulasikan rencana pembangunan desa. Mulai dari identifikasi isu, agenda setting, formulasi kebijakan, penerjemahan dalam implementasi program, hingga evaluasi. Antusiasme peserta cukup bagus, dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan selama sesi berlangsung.



Sesi keempat membahas topik filosofi Bumdes dan pengantar tata kelola Bumdes. Pembahasan difokuskan pada upaya membangun paradigma tata kelola Bumdes sesuai PP 11/2021. Kedudukan musdes, peran pemerintah desa, serta sisi strategis pengelolaan Bumdes sebagai dinamisator perekonomian di desa. Peserta sangat antusias pada sesi ini, karena merupakan pemahaman baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Penyeimbangan kontrol pengelolaan Bumdes yang tergambar utuh dalam PP 11/2023 dapat menjadi salah satu upaya mitigasi resiko mismanajemen Bumdes, sekaligus menjadi pondasi awal revitalisasi Bumdes yang akan dilakukan.

3) Hasil dan Tindak Lanjut

Materi tentang tata kelola pemerintahan desa banyak membuka perspektif baru bagi stakeholder desa yang terlibat dalam pelatihan ini. Beberapa ideasi muncul, dan yang paling kentara adalah ide pemajuan desa dengan menggerakkan sektor kreatif. Hal ini cukup menarik karena berangkat dari imajinasi pentingnya sektor alternatif penggerak ekonomi desa paska sawit. Dalam hal ini, pemerintah desa juga memandang pentingnya mewadahi dan memfasilitasi para pemuda untuk dapat menekuni sektor seni kreatif.

Dalam hal revitalisasi Bumdes, pemerintah desa memandang penting untuk segera dilakukan musdes “penyelamatan” Bumdes untuk mencegah Bumdes mati dan strategi pengembangan Bumdes ke depan. Dalam tahap ini, asistensi lanjutan sangat dibutuhkan, disisi lain, desa perlu membentuk tim ad hoc untuk menakar kembali prospek bisnis yang dijalankan Bumdes dan kapasitas pengelolaan saat ini, sebelum opsi revitalisasi diambil.

b. Kelas Merabu

1) Fokus Bahasan

Berangkat dari fakta hasil assessment yang menunjukkan aspek Kapasitas Proses dan Birokrasi merupakan aspek paling lemah dibandingkan dengan dua aspek lain. Aspek kapasitas proses dan birokrasi Kampung Merabu hanya mencapai 44 persen. Bila ditelaah lebih jauh, lemahnya kapasitas ini dikarenakan ketergantungan pada satu sosok yang yang mengadministrasikan berbagai urusan kampung. Distribusi dan pengorganisasian pekerjaan antar-aparat kampung tidak berjalan. Tantangan muncul saat ini ketika sosok tersebut sudah tidak di Merabu. Gap kesenjangan ini menganga terutama pada penyelenggaraan urusan rutin administratif pemerintahan kampung.

Maka, asistensi tata kelola pemerintahan kampung berfokus pada ‘penyelamatan’ laporan pertanggungjawaban pembangunan desa tahun 2021 dan 2022. Penyelarasan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti penggunaan anggaran menjadi fokus utama dalam asistensi kali ini.



Sementara pada sisi Bumkam, eksistensi Merabu yang memiliki salah satu Bumkam terbaik di Kecamatan Kelay, dengan proses bisnis dan potensi pasar yang ada saat ini perlu dijaga. Penguatan pada sisi manajemen dikedepankan agar posisi Bumkam tidak decline. Dalam hal ini, asistensi dokumen legal formal guna pendaftaran badan hukum Bumkam dan standarisasi pengelolaan keuangan dilakukan karena dapat menjadi pondasi utama perbaikan sistemik manajemen pengelolaan Bumkam.

2) Dinamika Kelas

Kegiatan dilakukan pada 19, 22 dan 23 Maret 2023 di Kampung Merabu. Pada 19 Maret 2023, dilakukan identifikasi mendalam faktor-faktor sebab, menemukan benang merah keterhubungan antar-cerita, hingga kesepakatan penyelesaian dan identifikasi pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam penyelesaian masalah-masalah kampung. Sementara pada pengelolaan Bumkam, dilakukan identifikasi pengelolaan keuangan, penghitungan ulang neraca saldo, dan inventarisir aset yang dimiliki. Jeda waktu 20 – 21 Maret dialokasikan untuk penyiapan dokumen-dokumen oleh pemerintah desa dan pengelola Bumkam untuk memperlancar proses mentoring pada hari selanjutnya.

Pada 22 – 23 Maret 2023, kelas Merabu dibagi menjadi dua kelas: satu kelas pemerintahan kampung dan satu kelas Bumkam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, asistensi pemerintahan kampung difokuskan pada standarisasi dan pelengkapan bukti-bukti penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu, strategi perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung juga dibahas pada kelas ini.

Sementara pada kelas Bumkam, pengelolaan keuangan yang tekotak-kotak 'dalam banyak dompet' dan tidak terkoneksi dengan baik antar sumber pendapatan satu dan lainnya, serta alokasi pembiayaan satu dan lainnya, menyebabkan pengelola Bumkam kesulitan dalam mengelola keuangannya. Penyelarasan pengelolaan keuangan antar-Bumkam dengan setiap unit usaha dilakukan untuk menjadi menu utama dalam sesi kali ini. Dimulai dari inventarisir aset, manajemen hutang-piutang, hingga membangun prosedur dan sistem keuangan baku satu pintu. Walaupun ada kesulitan karena harus beradaptasi dengan sistem baru, penyelarasan ini direspons sangat baik oleh pemerintah desa dan pengurus Bumkam.

Pada sisi lain, asistensi penyusunan aspek legal Bumkam menghasilkan draft Raperdes penyesuaian dan AD Bumkam, serta ART. Template program kerja telah diberikan dan akan diisi terlebih dahulu oleh pengurus Bumkam sebelum review lanjutan dilakukan.



3) Hasil dan Tindak Lanjut

Kesenjangan penyelenggaraan aktivitas rutin pemerintah kampung paska ditinggalkan orang kunci yang selama ini menjadi tumpuan utama masih menjadi PR yang perlu diselesaikan pemerintah kampung. Rencana tindak lanjut yang disepakati paska-proses ini, yaitu perlunya mendorong proses pembelajaran peer to peer antar-kampung. Proses pembelajaran peer to peer antar-kampung dipilih karena lebih ideal, dibandingkan model asistensi dari kecamatan ataupun kabupaten yang biasanya menggunakan pendekatan pressure power sehingga menyebabkan sekat psikologis. Pemerintah Kampung Merabu akan menjalin komunikasi dengan Kampung Sidobangen untuk membersamai proses Merabu. Pembelajaran antara Sidobangen ini meliputi proses asistensi tata laksana APBK serta review bukti pertanggungjawaban. Sidobangen dipilih selain karena jarak geografis yang relatif dekat, juga karena salah satu kampung terbaik di Kecamatan Kelay dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Sementara pada pengelolaan Bumkam, antusiasme bendahara Bumkam dalam menggunakan sistem yang dibangun cukup nampak, proses review dari YSID paska-pelatihan juga akan terus dilakukan. Adanya sistem ini juga memudahkan penyusunan laporan keuangan serta penakaran terhadap kapasitas keuangan Bumkam dan kinerja bisnis Bumkam. Pada sisi lain, kelengkapan dokumen syarat administratif pendaftaran badan hukum Bumkam tinggal menunggu isian program kerja yang saat ini masih dilakukan oleh pengelola.

c. Kelas Long Ayan

1) Fokus Bahasan

Dari proses assessment yang telah dilakukan, salah satu aspek yang patut menjadi prioritas untuk pengembangan kampung adalah Kapasitas Politik dan Kepemimpinan. Pemerintah kampung saat ini hanya fokus pada regulasi rutin reguler yang dibutuhkan untuk syarat transfer dana kampung. Begitu pula dengan pelayanan di kantor kampung yang masih bersifat insidental, belum ada penyelenggaraan pemerintahan yang rutin. Kampung Long Ayan juga belum menemukan sumber PAK dan rencana strategis terkait pengelolaan sumber daya yang ada.

Namun bila ditelaah lebih jauh, problem ini sangat berkorelasi dengan rentetan konflik politik yang terjadi di Long Ayan beberapa tahun terakhir. Konflik antar dua kubu politik di Long Ayan masih ada hingga saat ini, dan seringkali muncul dalam berbagai pengambilan kebijakan publik di kampung. Bak memadamkan api dalam sekam, proses rekonsiliasi harus dilakukan sebagai prasyarat menuju kemandirian kampung.



Basis fundamental untuk penguatan fungsi pemerintahan kampung dan pencairan komunikasi antar kubu di kampung akan strategis bila ditempuh mulai dari membangun pemahaman ulang tentang kewenangan kampung. Selain itu, upaya mengkreasi sumber ekonomi baru di kampung mendasarkan pada sisi pencerminan peluang yang ada serta membangun pemahaman ulang tentang model pengelolaan Bumkam yang baik. Hal-hal tersebut diatas menjadi fokus pembahasan kelas dua hari di Long Ayan.

2) Dinamika Kelas

Atensi kehadiran stakeholder kampung dalam penyelenggaraan kelas sangat minim. Hanya kepala kampung yang mengikuti keseluruhan kelas selama dua hari, tanggal 24-25 Maret 2023 di kantor kampung. Namun yang patut disyukuri adalah inisiatif kehadiran para PSS se-Kecamatan Segah dalam mengikuti kegiatan ini.

Pada hari pertama, pembahasan berfokus pada pemahaman hal-hal substantif tentang UU Desa serta pemahaman ulang terkait kewenangan kampung. Kelas pada hari pertama tidak berhenti disitu. Sesi malam digunakan untuk membaca ulang berbagai peluang yang ada di Long Ayan bersama dengan para PSS. Peluang adanya karyawan sawit dalam jumlah banyak belum banyak terhubung dengan aktivitas jual beli di Long Ayan. Didapati pula simpulan bahwa tingginya perputaran uang belanja kebutuhan pokok di pusat Kecamatan Segah (walaupun jaraknya relatif jauh dari Long Ayan) yang bersumber dari karyawan perusahaan sawit dikarenakan ketiadaan suplai logistik/barang kebutuhan sehari-hari di seputar Long Ayan. Hipotesis ini tentu perlu diuji lebih jauh untuk memproyeksikan skala ekonomi, maka survey perlu dilakukan. Sesi malam juga dilakukan drafting instrumen survey konsumsi pekerja sawit, yang nantinya dapat dijadikan rujukan pengembangan Bumkam.

Pembahasan pada hari kedua lebih difokuskan pada transformasi tata kelola Bumkam paska PP 11/2021. Sesi ini membongkar cukup banyak pemahaman kepala desa Long Ayan tentang Bumkam. Baik dari segi pengelolaan organisasi, maupun penataan usaha dan keuangan.

3) Hasil dan Tindak Lanjut

Prasyarat utama untuk berkembang dan maju adalah mengharmonisasi seluruh stakeholder Long Ayan untuk melangkah bersama. Saling membangun komunikasi antar-kubu, dan mulai melepas seluruh ego sektoral/kelompok, peran kepala kampung sangat penting dalam hal ini. YSID merekomendasikan untuk mengambil langkah ini terlebih dahulu sebelum melangkah ke isu lain.



Pemerintah Kampung Long Ayan sedang berencana melakukan restrukturisasi pengurus Bumkam. Ini merupakan momentum untuk membangun ulang arah pengembangan Bumkam, selain itu Bumkam perlu 'ditemani' lebih jauh, sebagai think tank diskusi tata kelola Bumkam.

Sementara rancangan instrumen survey konsumsi, selain bisa dimanfaatkan Long Ayan untuk menakar pasar, kiranya juga bermanfaat bagi PSS untuk memperkuat sisi metodologis untuk membaca peluang dan dapat diadaptasi (dengan berbagai penyesuaian) ke masing-masing kampung.

d. Kelas Maratua

1) Fokus Bahasan

Salah satu kegiatan mini training di wilayah pesisir dilakukan kepada 4 kampung di Kecamatan Maratua yang menjadi sasaran peserta program Akademi Kampung Sigap (AKS) #3. Keempat kampung tersebut Kampung Payung-Payung, Teluk Harapan, Teluk Alulu, Bohe Silian.

Dari proses assessment terhadap 3 BUMK dan kegiatan kelas belajar umum yang telah dilakukan yang diikuti keempat kampung, salah satu aspek yang menjadi prioritas untuk pengembangan 4 kampung di Kecamatan Maratua adalah Kapasitas Politik dan Kepemimpinan. Dari keempat kepala kampung, hanya satu kepala kampung yang berpikiran visioner, yakni Kepala Kampung Payung-Payung. Kepala Kampung Bohe Silian dan Kepala Kampung Teluk Alulu tidak progresif dan sedang di akhir masa jabatan. Sedangkan Kepala Kampung Teluk Harapan sangat teknokratis ketika melihat isu-isu arah pembangunan kampung, hal ini dibuktikan dari tertundanya rencana pembuatan/pemasangan Sistem Informasi Kampung Terpadu (SIKT) sampai bulan November 2023.

Fokus bahasan mini training 4 kampung di Kecamatan Maratua untuk Tata Kelola Pemerintahan Kampung adalah (1) mendudukkan kembali pemahaman basis kewenangan kampung. Sedangkan untuk Tata Kelola Kelembagaan BUMK adalah (2) membangun ulang pemahaman dasar filosofis BUMK, dan (3) penguatan BUMKam Bersama atau BUMDesma.

2) Dinamika Kelas

Kegiatan mini training Kepulauan Maratua dilakukan secara paralel antara tanggal 18 – 24 Maret 2023. Adapun kegiatan mini training yang menggabungkan 4 kampung langsung dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Maratua. Pada hari Senin, 20 Maret 2023, mulai dari pagi sampai siang hari, deck pembelajaran untuk inisiasi model Kelas Wilayah Pesisir Maratua dibuka oleh Muspika Kecamatan Maratua. Atensi para stakeholder keempat kampung sangat antusias, masing-masing kampung mengirim 3-4 perwakilan dari unsur pemerintahan kampung, BPK, pengurus BUMK, dan diikuti juga para Pejuang Sigap Sejahtera yang diwakili Korcam Maratua dan Faskam Bohe Silian.

Pada mini training gabungan, kelas belajar tidak dibuat menjadi dua kelas seperti umumnya kelas yang dibuat YSID, tetapi digabungkan satu kelas dalam satu hari. Sejumlah pertanyaan muncul dari para peserta terkait Tata Kelola Pemerintahan Kampung dan Tata Kelola Kelembagaan BUMK. Beberapa pertanyaan ditindaklanjuti lebih detail dalam kegiatan mini training khusus.

Gambar 15 Dokumentasi Mini Training Gabungan AKS (Kecamatan Maratua)



Selain kegiatan mini training gabungan, mini training khusus juga dilakukan di kampung masing-masing antara rentang tanggal 20 – 24 Maret 2023. Tim YSID bersama Kepala Kampung dan para perangkatnya bersama-sama mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dihadapi dan menginventarisir praktik-praktik baik yang dapat direplikasi. Selain itu Tim YSID, antara tanggal 18 – 24 Maret melakukan diskusi panjang mendalam untuk menemukan rencana programatik kelompok Maratua Peduli Lingkungan (MPL) bersama Kepala Kampung Payung-Payung, Ketua BPK Payung-Payung, Korcam Maratua, Faskam Bohe Silian dan Faskam Payung-Payung, Pokdarwis, serta anggota MPL.

3) Hasil dan Tindak lanjut

a) Kampung Payung-Payung

- Perkumpulan Maratua Peduli Lingkungan (MPL) diharapkan mampu membantu Pemkam dalam mengelola SIK. Oleh karena itu diperlukan SK atau Perkam terkait penunjukan MPL sebagai pengelola SIK (perlu contoh SK).



- Dalam lomba Anugerah Desa Wisata (ADWI) Tahun 2023, Kampung Payung-Payung terhenti di 300 besar, dan tidak mengetahui kelemahannya. Sebagai bentuk evaluasi dan peningkatan ke depan, pemkam mengharapkan dapat belajar dari kesalahan dan memperbaiki di tahun selanjutnya. Untuk itu, perlu mencermati indikator penilaian ADWI untuk persiapan tahun 2024 (berserta identifikasi kelemahan).
- Pemkam perlu pendampingan dalam penyusunan Perkam untuk membuka ruang kerja sama dengan resort-resort.
- YSID memastikan maintenance SIK selesai akhir bulan April, setelah itu akan dilakukan pendampingan lanjutan terkait sosialisasi apps.
- Detailing budget SIK terkait hardware, organaware, humanware untuk aktivasi lanjutan kepada lembaga/pihak yang akan mengelola SIK, yaitu MPL. Harapan besarnya MPL yang disupport Pemerintah Kampung Payung-Payung ini dapat menjadi learning center pertama di Maratua.
- Tools analisis pemetaan kelayakan usaha untuk BUMK
- Pendampingan pendaftaran badan hukum yang masih terkendala sampai sekarang
- Pelatihan pencatatan keuangan
- Mencari informasi terkait ketentuan apakah ASN Polri boleh masuk sebagai pengurus BUMK
- Sedangkan untuk MPL, MPL telah melakukan kerja-kerja konservasi lingkungan di tingkat tapak, yakni transplantasi terumbu karang di 7 titik yang dibantu BKSP Pontianak; kegiatan bersih-bersih sampah laut sepanjang garis Pantai Payung-Payung; menjadi mitra Yayasan Penyus Indonesia dalam kegiatan konservasi penyu; monitoring sampah laut dan sosialisasi pengelolaan sampah rumah ke sekolah-sekolah dan warga; kampanye ilegal fishing pada nelayan.
- MPL secara jangkauan programatik masih sebatas lokal (kampung/kecamatan), padahal nama MPL sudah mendunia sampai dunia internasional karena pernah memenangkan lomba video pendek Celebrate Islands 2022 "Reduce the Impact of Economic Activities". Modal sosial ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
- MPL sebagai perkumpulan terlalu bergantung pada fasilitator YPI, dan akibatnya ketika program YPI selesai, MPL kebingungan untuk merumuskan arah kegiatan. Sebelumnya MoU, penghubung program, kampanye media dilakukan oleh YPI.
- MPL sebagai perkumpulan belum memiliki tujuan dan rencana strategis jangka panjang, dan, kegiatan masih bergantung pada momentum, yang bersifat satu tahunan dan tanpa perencanaan yang matang. Perlunya fasilitasi penyusunan rencana strategis 5 tahun.



- Perlunya distribusi kerja-kerja teknis untuk personel MPL dalam berkegiatan (misalnya pembentukan divisi media, konservasi, dll).
- MPL sudah memiliki lini media, mulai dari Facebook, Instagram, dan Youtube. Tetapi praktis saat ini ketiganya vakum, tidak ada admin pengelolanya.
- Pelatihan lanjutan berkaitan dengan prosedur operasionalisasi SIK dan pelatihan dasar terkait manajemen konten. Pelatihan dasar terkait Jurnalisme Warga (menulis, fotografi, dan vidiografi)
- Pelatihan Proposal Program untuk memperluas ruang kolaborasi dengan NGO/perusahaan
- Perlu pengenalan tentang basis data untuk mendukung proposal kerja sama
- Desain tata kelola sampah laut (MPL)
- Pendampingan pengelolaan wisata Kehe Daing dan pembuatan logo untuk keperluan media branding
- Memberikan pemahaman pada pengurus MPL terkait desain programatik besar bidang Ocean (mulai dari transplantasi terumbu karang, konservasi penyu, konservasi mangrove, pengelolaan sampah laut, kampanye ilegal fishing, pengelolaan goa-goa karst, pengelolaan resort dan pemukiman sepanjang pantai) bahwa MPL bisa menjadi center learning di Maratua.
- Jika memungkinkan YSID menempatkan person di Payung-Payung, dan bersama ikut memikirkan program-program besar MPL dan kampung

b) Kampung Bohe Silian

- Pembuatan logo BUMK
- Tools analisis pemetaan kelayakan usaha
- Tahun 2018 - 2022 BUMK tidak ada perkembangan, tahun 2023 mulai perbaikan
- Rencana aktivasi SIK = perlu penawaran versi komplit, hardware, software, organware, humanware (Include pelatihan teknis operasionalisasi SIK)
- Pada tahun 2022 ditemukan kasus stunting
- Komunikasi antara pemerintah dan warga harus diubah dan pendataan penerima bantuan pemerintah mulai dibereskan agar tidak menimbulkan konflik

c) Kampung Teluk Harapan

- Follow up catatan keuangan dan aktivasi aplikasi laporan keuangan
- Rencana aktivasi SIK yang akan dianggarkan tahun ini. Perlu penawaran versi komplit, hardware, software, orgaware, humanware (Include pelatihan teknis operasionalisasi SIK dan biaya tahunan lanjutan 2,5 jt domain)
- Pengenalan data untuk menunjang program-program Pemkam



PEJUANG
SYGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar
Inovasi Desa



d) Kampung Teluk Alulu

- BUMK vakum dan belum ada pengurus baru, pengurus lama bermasalah
- Pelibatan anak-anak muda untuk pengurus BUMK baru jika susah mendapatkan orang tua
- Ada pandangan bahwa menjadi pengurus BUMK maka harus mendapat gaji
- Pendampingan penyusunan perkam diving center dan retribusi untuk resort-resort (follow up), ini penting karena titik penyelaman terbaik ada di Teluk Alulu.
- Selama ini dive center yang menikmati resort, dan ini perlu dikunci dengan Perkam retribusi, sosialisasi ke resort, untuk dimanfaatkan jadi pendapatan kampung
- Kampung mulai sosialisasi kepada nelayan untuk tidak lagi menggunakan alat tangkap Cang dalam kegiatan penangkapan ikan, karena merusak ekosistem laut.

e. Kelas Talisayan

1) Fokus Bahasan

Kegiatan desk pembelajaran khusus di Wilayah Pesisir Selatan, seperti yang menjadi sasaran peserta program Akademi Kampung Sigap (AKS) #3. Juga berhasil dilaksanakan di Kampung Talisayan. Fokus bahasan utamanya adalah pengembangan kampung, penguatan fungsi-fungsi pemerintahan, sekaligus refreshing pemahaman terkait Tata Kelola Kelembagaan BUMK. Dengan kata lain, mencermati kembali pemilihan jenis usaha dan membangun pemahaman ulang tentang model pengelolaan BUMK. Hal-hal itulah yang dijadikan fokus pembahasan kelas sehari di Talisayan.

2) Dinamika Kelas

Kegiatan desk pembelajaran khusus Talisayan dilakukan satu hari, pada tanggal 20 Februari 2023 setelah proses assessment keseluruhan kampung selesai, dengan mendatangi langsung rumah Kepala Kampung Talisayan serta Direktur BUMK Talisayan secara terpisah. Pesertanya adalah Kepala Kampung Talisayan, Direktur BUMK, Tim YSID, dan Perkumpulan Perisai. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan secara mendalam dari sore sampai larut malam ada kebutuhan terkait penguatan ekosistem kemandirian kampung dan pembelajaran bersama tentang usaha strategis-inovatif terkait pengelolaan BUMK.



3) Hasil dan Tindak Lanjut

Adapun hasil dan tindak lanjut konkret dari desk pembelajaran khusus Wilayah Pesisir Talisayan adalah pembuatan ulang peta 3 dimensi atau peta maket Kampung Talisayan yang pengerjaannya dilakukan oleh Perkumpulan Perisai. Kampung belum berani membangun Sistem Informasi Kampung Terpadu (SIKT) dan terobosan kemajuan lain sampai saat ini, padahal Kampung Talisayan adalah ibu kota kecamatan, karena kampung akan melaksanakan agenda pemilihan kepala kampung di tahun 2023 ini. Selain itu, Persoalan sampah kampung (yang dibuang sembarangan di pinggir jalan poros) dan bagaimana cara pengelolaannya juga sempat dibahas.

Sementara untuk BUMK, masih dengan masalah sama yang dihadapi tahun lalu, bagaimana BUMK mengalami banyak kebocoran keuangan, pengurus BUMK masih kesulitan dalam pengelolaan unit usaha, inventarisir aset, hingga membangun sistem pencatatan keuangan yang baik. Selain itu, BUMK kesulitan dalam penyusunan berkas aspek legal BUMK.

f. Kelas Labanan makarti

1) Fokus Bahasan

Kegiatan desk pembelajaran khusus, seperti yang menjadi sasaran peserta program Akademi Kampung Sigap (AKS) #3. Juga berhasil dilaksanakan di Kampung Labanan Makarti. Fokus bahasan utamanya adalah pengembangan website resmi kampung dan refreshing pemahaman terkait Tata Kelola Kelembagaan BUMK. Hal-hal itulah yang dijadikan fokus pembahasan desk pembelajaran khusus di Labanan Makarti.

2) Dinamika Kelas

Kegiatan desk pembelajaran khusus Wilayah Hilir di Kampung Labanan Makarti dilakukan beberapa kali, baik itu kunjungan langsung atau secara online. Kunjungan langsung dilaksanakan berbarengan proses assessment. Sementara itu pertemuan online dengan Tim IT YSID dilakukan sebelum dan sesudah waktu penilaian Lomba Kampung Tingkat Kabupaten Berau Tahun 2023 di bulan Maret. Pesertanya adalah perangkat kampung, bendahara BUMK, dan pejuang SIGAP Sejahtera.

3) Hasil dan Tindak Lanjut

Adapun hasil dan tindak lanjut konkret dari desk pembelajaran khusus Wilayah Hilir di Kampung Labanan Makarti adalah pembuatan website resmi kampung yang difasilitasi oleh Tim YSID.



Dari diskusi-diskusi yang dilakukan secara mendalam kebutuhan ini menjadi syarat penilaian untuk Lomba Kampung Tingkat Kabupaten Berau Tahun 2023. Dan berkat itulah, yang menjadi salah satu instrumen penilaian, Kampung Labanan Makarti berhasil menjadi Juara Pertama Lomba Kampung Tingkat Kabupaten Berau Tahun 2023. Dan akan menjadi wakil Kabupaten Berau untuk Lomba Kampung Tingkat Provinsi Kalimantan Timur mengikuti prestasi yang dicapai Kampung Sumberagung pada tahun 2022.

Sementara untuk kelembagaan BUMK, karena BUMK Labanan Makarti dengan “Sekolah BUMK” telah menjadi “role model” tidak banyak masalah yang dihadapi. Justru banyak cerita positif mengenai capaian-capaian mereka. Namun masih mengalami kendala dalam menggapai ‘atensi belajar’ dari kampung lain.

5. Pendampingan Pasca Pelatihan / Monitoring Evaluasi

Untuk menjamin keberhasilan proses pembelajaran setelah pelatihan atau Kelas Belajar Pesisir (Sumberagung) dan Kelas Belajar Tanjung Redeb yang dilaksanakan secara paralel pada minggu kedua bulan Maret 2023, Tim YSID memfasilitasi pendampingan dengan metode remote/online dan kunjungan lapangan/offline.

Proses pendampingan dimaksudkan untuk mempertajam pemahaman dan pendetailan hasil penugasan pasca-proses pelatihan kelas belajar umum. Selain itu, pendampingan pasca pelatihan menjadi media proses saling belajar antar-peserta dan sekaligus verifikasi data yang telah diinput. Pendampingan pasca pelatihan difokuskan pada pemerintah kampung, pengelola BUMK, serta pengelola Sistem Informasi Kampung Terpadu. Adapun monitoring kunjungan lapangan untuk mengetahui hambatan/kemajuan yang dihadapi peserta AKS #3 pasca pelatihan dilaksanakan pada:

Tabel 16 Agenda Pendampingan Pasca Pelatihan

No	Waktu	Tempat	Peserta
1	Selasa-Jumat, 21-24 Maret 2023	Kantor Kampung	Pemerintah Kampung Bohe Silian, Kampung Teluk Alulu, Kampung Payung-Payung, Kampung Teluk Harapan, BUMK 4 Kampung, dan Faskam 4 Kampung
2	Rabu-Kamis, 22- 23 Maret 2023	Kampung Merabu	Pemerintah Kampung Merabu dan BUMK



No	Waktu	Tempat	Peserta
3	Jumat-Sabtu, 24-25 Maret 2023	Kampung Long Ayan	Pemerintah Kampung Long Ayan, BUMK Long Ayan, PSS Kecamatan Segah
4	Selasa-Selasa, 11-18 April 2023 13-14 Mei 2023	Kampung Sumber Agung	Pemerintah Kampung Sumberagung, BUMK Sumberagung, Koperasi, Faskam Sumberagung, Masyarakat
5	Kamis-Jumat, 20-28 April 2023	Kampung Payung- Payung	Pemerintah Kampung Payung-Payung, Pokdarwis Payung-Payung, Pengelola Wisata Kehe Daing, Maratua Peduli Lingkungan, BUMK Payung-Payung, Faskam Payung-Payung
6	Maret-Mei 2023	6 Desa di Kecamatan Muara Wahau	Nehas Liah Bing, Bea Nehas, Long Wehea, Diaq Lay, Dea Beq, dan Diaq Leway

Gambar 16 Dokumentasi Pendampingan di Kampung Bohe Silian





Gambar 17 Dokumentasi Pendampingan di Kampung Teluk Alulu



Gambar 18 Dokumentasi Pendampingan di Kampung Teluk Harapan





Gambar 19 Dokumentasi Pendampingan di Kampung Payung-Payung



Gambar 20 Dokumentasi Pendampingan Maratua Peduli Lingkungan



Sementara itu monitoring secara remote/online untuk mengetahui hambatan/tantangan yang dihadapi peserta AKS #3 pasca pelatihan dilakukan pada sejumlah pemerintah kampung dan BUMK, antara lain Pemerintahan Kampung (Sumber Agung, Labanan Makarti, Payung-Payung, Long Ayan, Bohe Silian) serta lembaga BUMK (Payung-Payung, Bohe Silian, Teluk Sulaiman, Labanan Makarti, Tembudan, Lumba-lumba, Labanan Jaya).



C. Lembaga yang Terlibat

Selama 3 tahun (2021 – 2023) dalam upayanya membangun kemandirian kampung serta transparansi BUMK yang tersebar di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan merentang dari wilayah hulu, hilir, pesisir, sampai pulau terluar. Yayasan Sanggar Inovasi Desa (YSID) selaku mitra program Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) telah melibatkan banyak pihak untuk kerja-kerja tapak.

Tabel 17 Daftar Pihak-Pihak yang terlibat dalam kegiatan Akademi Kampung Sigap

Nasional	Regional	Lembaga Lain
(1) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT)	(1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Timur (3) Pemerintah Kabupaten Berau	(1) Sekretariat Kabupaten (Sekab) SIGAP Sejahtera (2) Pejuang SIGAP Sejahtera
(2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas)	(4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau (5) DPMD Kutai Timur (6) DPMD Kutai Kartanegara (7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau	(3) Yayasan Nastari Bogor (4) Pemerintah Kecamatan (5) Pemerintah Kampung
(3) Yayasan Konservasi Alam Nusantara	(8) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau (9) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau	(6) BUMK sasaran (7) Perkumpulan Perisai (8) Berau Tourism (9) Perkumpulan Maratua Peduli Lingkungan
(4) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	(10) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Berau (11) Yayasan Dharma Bakti Berau Coal (12) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Berau	(10) Tokoh/Lembaga Adat, dll.





F | Capaian Program Akademi Kampung SIGAP (AKS)



PEJUANG
SIGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar
Inovasi Desa



CAPAIAN PROGRAM AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS) 3

Sesudah 4 bulan berjalan, hasil atau capaian program AKS #3 Tahun 2023 antara lain: *Pertama*, dokumen laporan hasil assessment serta desain pendampingan Tata Kelola Pemerintah Kampung dan Tata Kelola Lembaga BUMK. *Kedua*, dokumen laporan perkembangan program (*progress report*) akhir penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kampung dan Tata Kelola Lembaga BUMK. *Ketiga*, pada AKS #3 adanya peningkatan sebanyak 2 pemerintahan kampung (Labanan Makarti dan Kayu Indah) sudah menerapkan Sistem Informasi Kampung Terpadu (SIKT) untuk mendukung pelayanan publik. Sedangkan untuk 4 kampung lain (Teluk Harapan, Teluk Alulu, Bohe Silian, Tabalar Muara) dalam proses/masih menunggu APBK Perubahan bulan November 2023. Selain itu, terdapat 10 kampung telah memanfaatkan website kampung secara aktif yang terintegrasi dengan media sosial resmi kampung.

Tabel 18 Daftar Kampung Yang Sudah Menginstal SIK

No	Nama Kampung	Alamat SIK
Wilayah Pesisir		
1	Sumber Agung	https://sumberagung-berau.desa.id/
2	Batu Putih	https://batuputih-berau.desa.id/
3	Tembudan	https://tembudan-berau.desa.id/
4	Teluk Sulaiman	https://teluksulaiman-berau.desa.id/
5	Teluk Sumbang	https://teluksumbang-berau.desa.id/
6	Sukamurya	https://sukamurya-berau.desa.id/
7	Kayu Indah	https://kayuindah-berau.desa.id/
8	Payung-payung	https://payungpayung-berau.desa.id/
9	Teluk Harapan	Dalam proses
10	Bohe Silian	Dalam proses
11	Teluk Alulu	Dalam proses



Wilayah Hilir		
12	Suaran	https://suaran-berau.desa.id/
13	Labanan Makarti (Website)	https://labananmakarti-berau.desa.id/
14	Tabalar Muara	Dalam proses
Wilayah Hulu		
15	Merabu	https://merabu.desa.id/
16	Sido Bangen	https://sidobangen-berau.desa.id/

Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa kampung-kampung yang telah menginstal SIKT ada 12 kampung dan kemungkinannya akan bertambah setiap tahun. Sementara itu, *keempat*, BUMK-BUMK di Berau yang menggunakan sistem pelaporan keuangan YSID dan merasa terbantu (terlatih, aktif menggunakan, dan menggunakan) capaiannya sebanyak 21 BUMK, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19 Daftar BUMK dengan Sistem Pelaporan Keuangan YSID

No	Nama Kampung	Progress
1	Kampung Long Lanuk	Terpapar/terlatih
2	Kampung Merancang Ulu	Terpapar/terlatih
3	Kampung Sambakungan	Terpapar/terlatih
4	Kampung Tasuk	Terpapar/terlatih
5	Kampung Tumbit Dayak	Terpapar/terlatih
6	Kampung Tumbit Melayu	Terpapar/terlatih
7	Kampung Inaran	Terpapar/terlatih
8	Kampung Sei Bebanir Bangun	Terpapar/terlatih





No	Nama Kampung	Progress
9	Kampung Tanjung Perangat	Terpapar/terlatih
10	Kampung Sukan Tengah	Aktif menggunakan
11	Kampung Birang	Aktif menggunakan
12	Kampung Tembudan	Aktif menggunakan
13	Kampung Merabu	Aktif menggunakan
14	Kampung Talisayan	Aktif menggunakan
15	Kampung Tunggal Bumi	Menggunakan
16	Kampung Teluk Sulaiman	Menggunakan
17	Kampung Labanan Jaya	Menggunakan
18	Kampung Pandansari	Menggunakan
19	Kampung Pegat Batumbuk	Menggunakan
20	Kampung Payung-Payung	Menggunakan
21	Kampung Bohe Silian	Menggunakan

Dari 43 BUMK yang terlibat program Akademi Kampung Sigap dalam rentang waktu 3 tahun (2021 - 2023), jika dirinci terdapat 7 BUMK telah resmi berbadan hukum, 7 BUMK masih tahap perbaikan dokumen badan hukum, dan 29 BUMK baru sebatas terverifikasi nama:



Tabel 20 Status Badan Hukum BUMK

BUMK KABUPATEN BERAU DALAM PENDAFTARAN

KEMENDESA-KEMENKUMHAM RI TAHUN 2023 (Data Per-bulan Mei)

No	Nama BUMK	Nama Kampung
Dokumen Badan Hukum Terverifikasi		
1	BUMK Rindang Jaya	Tembudan
2	BUMK Batu Bual Sejahtera	Pegat Bukur
3	BUMK Maju Bersama	Pandansari
4	BUMK Surya Jaya Abadi	Labanan Makarti
5	BUMK SMART	Pegat Batumbuk
6	BUMK Lanuk permai	Long Lanuk
7	BUMK Pa'gisunan	Tanjung Batu
Perbaikan Dokumen Badan Hukum		
8	BUMK Merasa Jaya	Merasa
9	BUMK Berkah Pandai	Pilanjau
10	BUMK Jaya Lestari	Harapan Jaya
11	BUMK Mandiri	Talisayan
12	BUMK Biduk Mandiri	Biduk-Biduk
13	BUMK Bersahaja	Labanan Jaya
14	BUMK Rumpun Jaya Mandiri	Melati Jaya
Nama BUMK Terverifikasi		
15	BUMK Mandiri Sejahtera	Sumber Agung
16	BUMK Karya Bersama	Kayu Indah
17	BUMK Jaya Abadi	Biatan Ulu
18	BUMK Gurimbang Mandiri	Gurimbang



No	Nama BUMK	Nama Kampung
19	BUMK Bina Mandiri	Suaran
20	BUMK Batiwakkal	Maluang
21	BUMK Makmur Sejahtera	Labanan Makmur
21	BUMK Bapinang Sejahtera	Biatan Bapinang
23	BUMK Lempake Mandiri	Biatan Lempake
24	BUMK Jaya Abadi	Biatan Ulu
25	BUMK Semurut Berkarya	Semurut
26	BUMK Mandiri Sejahtera	Tabalar Muara
27	BUMK Lebo Asik	Merabu
28	BUMK Harapan Baru	Long Duhung
29	BUMK Bangen Lestari	Sidobangen
30	BUMK Harapan Lestari	Long Beliu
31	BUMK Geh Elmin Meklaw	Long Ayan
32	BUMK Tiga Tawai	Tepian Buah
33	BUMK Mangrove	Teluk Semanting
34	BUMK Mandiri Jaya Abadi	Campursari
35	BUMK Bintang Bersinar	Sukamurya
36	BUMK Mekar Jaya	Tunggal Bumi
37	BUMK Tanjung Buaya-Buaya	Batu Putih
38	BUMK Pasir Putih Indah	Teluk Sulaiman
39	BUMK Berkarya	Teluk Sumbang
40	BUMK Lumba-Lumba	Teluk Harapan
41	BUMK Malatua Payung Sejahtera	Payung-Payung
42	BUMK Silian Jaya	Bohe Silian
43	BUMK Pamoahan	Teluk Alulu



Kelima, untuk inisiasi kampung model atau *deck* pembelajaran khusus untuk Tata Kelola Pemerintahan Kampung dan Tata Kelola Kelembagaan BUMK, berdasarkan capaian program dan perkembangan di lapangan serta prestasi yang didapat, Sumber Agung menjadi kampung “role model” untuk Tata Kelola Pemerintahan Kampung. Dan Labanan Makarti menjadi representasi kampung “role model” untuk Tata Kelola Kelembagaan BUMK. Sejak Akademi Kampung SIGAP Angkatan 1 (Desember 2020 – Juni 2021), Akademi Kampung SIGAP Angkatan 2 (Februari – Juli 2022) hingga Akademi Kampung SIGAP Angkatan 3 (Januari – Mei 2023), kedua kampung itulah yang secara capaian melesat jauh meninggalkan kampung-kampung lain di Kabupaten Berau.



Gambar 21 Dokumentasi Pembuatan Podcast

Keenam, produksi *podcast* sebagai salah satu bentuk dokumentasi pengetahuan bersama tokoh masyarakat kampung. Podcast ini bertujuan untuk merekam dan membagikan pengetahuan dari para tokoh masyarakat, baik berupa informasi, pengalaman, wawasan dan cerita menarik lainnya. Dalam pembuatan podcast, tim bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki keahlian, pengalaman, atau pengetahuan khusus di bidang tertentu. Mereka bisa menjadi ahli dalam bidang pertanian, kewirausahaan, seni dan budaya, atau topik lain yang relevan dengan kebutuhan komunitas. Podcast ini bukan hanya menjadi dokumentasi pengetahuan yang berharga, tetapi juga menjadi sarana inspirasi dan motivasi bagi pendengarnya. Dalam setiap episode, audiens dapat belajar dari pengalaman dan kearifan tokoh-tokoh masyarakat, serta mendapatkan wawasan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, dengan adanya *podcast* ini, pengetahuan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh masyarakat tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitar mereka, tetapi juga dapat diakses oleh orang-orang di luar komunitas. Hal ini berdampak positif dalam memperluas jangkauan pengetahuan dan menginspirasi orang lain untuk berpartisipasi dalam pengembangan komunitas dan peningkatan kualitas hidup. Secara keseluruhan, pembuatan podcast bersama tokoh masyarakat sebagai bentuk dokumentasi pengetahuan oleh Akademi Kampung Sigap adalah langkah penting dalam melestarikan dan menyebarkan kekayaan pengetahuan lokal.



PEJUANG
SYGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar
Inovasi Desa



G | Rencana Kerja Akademi Kampung SIGAP (AKS)



PEJUANG
SIGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar
Inovasi Desa

Laporan Akhir Program Akademi Kampung Sigap 3 Tahun 2023



RENCANA KERJA AKADEMI KAMPUNG SIGAP (AKS) 4 REKOMENDASI & ROAD MAP

A. Rekomendasi Tata Kelola Pemerintah Kampung

1. Perbaikan Kapasitas Sosial

- a. Pengembangan kualitas proses Pemilihan Kepala Kampung yang memungkinkan visi dan misi kepemimpinan programatik muncul dengan memperbanyak model kampanye dialogis, kampanye program, dan membuat pakta integritas.
- b. Peningkatan kualitas musyawarah kampung sejak perencanaan, pelaksanaan, dan hingga pertanggungjawaban lewat perluasan partisipasi, menyediakan dan menyosialisasikan bahan-bahan musyawarah kampung, dan perluasan ruang TPK untuk melibatkan warga.
- c. Pengembangan keterlibatan warga dalam evaluasi kinerja kebijakan dan lingkup pengawasan, setidaknya pada level alokasi program/kegiatan dan anggaran.
- d. Pengembangan model pendidikan kreatif warga untuk memperkuat kompetensi berpikir dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman.
- e. Perbaikan kualitas pelayanan dasar untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
- f. Pengelolaan sistem data kemiskinan terintegrasi bagi akurasi data dan pemanfaatannya untuk program penjaminan sosial dan pemberdayaan.
- g. Penguatan basis solidaritas sosial kewargaan melalui kegiatan gotong royong, dst.

2. Perbaikan Kapasitas Proses dan Birokrasi

- a. Memastikan siklus tahapan penyelenggaraan pemerintahan kampung (proses, waktu, standar dokumen) dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Termasuk upaya mendorong Pemerintah Kabupaten konsisten terhadap jadwal waktu dalam siklus kebijakan.
- b. Memastikan standar dan prosedur pelayanan yang jelas dan diatur dalam regulasi kampung.
- c. Inisiasi perencanaan tematik sebagai penerjemahan operasional RPJMK, misalnya dalam bentuk masterplan pembangunan.
- d. Pelibatan lembaga kampung atau lembaga kemasyarakatan kampung sebagai mitra pemerintah kampung. Pada urusan yang dinilai belum memiliki lembaga, dapat dibentuk lembaga khusus.



- e. Pengembangan pemahaman penyusunan standar dan penggunaan dokumen penyelenggaraan pemerintahan, baik dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Misal selain SISKEUDES, aplikasi SIPADES untuk pencatatan aset juga dapat digunakan untuk semua kampung di wilayah hulu karena aplikasi tidak harus terhubung dengan jaringan internet.
- f. Mendorong Pemerintah Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur menetapkan standar informasi publik untuk memenuhi hak publik atas informasi pemerintah kampung (transparan dan akuntabel).
- g. Mulai menerapkan Sistem Informasi Kampung Terpadu, baik dalam kerangka pengorganisasian data, penyajian, pengolahan, maupun publikasi.
- h. Pengembangan kompetensi analisis anggaran, formulasi kebijakan, hingga legal drafting untuk kampung-kampung.
- i. Penguatan skill dasar perangkat kampung dalam pelaksanaan tugas seperti cara penggunaan aplikasi-aplikasi komputer yang lazim dipakai seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel.
- j. Mendorong penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung setara minimal UMK sebagai upaya menciptakan basis kesejahteraan minimal.
- k. Mengembangkan sistem insentif berbasis kinerja untuk mendorong capaian dan inovasi. Ini bisa dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap analisis jabatan, beban kerja, dan deskripsi tugas dari masing-masing jabatan yang menjadi dasar dalam penetapan klasifikasi SOTK Kampung.

3. Perbaiki Kapasitas Politik dan Kepemimpinan

- a. Penguatan pemahaman Kepala Kampung terhadap basis dan jenis kewenangan kampung, baik dalam kerangka pengakuan asal-usul – rekognisi (self governing community), kewenangan skala lokal – desentralisasi/otonomi (local self government), maupun tugas pembantuan.
- b. Merancang Sekolah Calon Kepala Kampung atau bentuk lain yang memungkinkan pembelajaran integratif-kontekstual-inovatif.
- c. Pengembangan pemahaman konteks, dimensi, proses kebijakan, setidaknya pada tahap agenda setting dan (re)formulasi kebijakan, termasuk evaluasi berbasis regulatory impact.
- d. Pengembangan model ekosistem pembelajaran yang memungkinkan pertukaran, percontohan, dan pengembangan baik pengetahuan atau produk yang lahir dari praktik baik antarkampung.
- e. Pengembangan jejaring kerja kolaborasi antarkampung dan entitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya untuk menjadi bagian dari ekosistem pembangunan kampung secara programatik.



- f. Menggerakkan berbagai panggung untuk Kepala Kampung supaya mereka mendapat manfaat pengakuan terhadap hasil kinerja (misal, melalui berbagai lomba atau pemberian penghargaan) yang diikuti insentif program. Penghargaan bisa dari pemerintah, swasta, atau lembaga lain.
- g. Menyusun program legislasi kampung yang menghubungkan Pemerintah Kampung dan BPK.
- h. Menyusun masterplan pembangunan kampung sebagai pendetilan perencanaan strategis dalam RPJMK. Ini supaya fokus pembangunan kampung konsisten dari waktu ke waktu, termasuk jika terjadi pergantian Kepala Kampung.
- i. Menemukan dan mengembangkan kekhasan kampung sebagai pembeda ke lingkup lebih luas.
- j. Pengembangan kapasitas komunikasi publik Kepala Kampung dan re-branding kampung.

B. Rekomendasi Tata Kelola BUMK

1. Aspek Permodalan BUMK

- a. Perlunya analisa kelayakan usaha dan perencanaan usaha yang memadai untuk meminimalisir terjadinya kepailitan usaha BUMK di kemudian hari. Pada kasus di atas, perlu dilakukan inventarisasi ulang nilai aset dan nilai kemanfaatan aset yang dimiliki. Sehingga kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki dapat diputuskan, kerugian tidak semakin berlanjut, dan strategi 'penyelamatan' bisnis dapat dilakukan.
- b. Perlunya klausul kebijakan terkait penyertaan modal kepada BUMK harus disertai analisa kelayakan usaha dan rencana usaha. Tentunya dengan format sederhana namun mampu menjawab kebutuhan investasi, rencana aktivitas beserta proyeksi pendapatan dan biaya, serta proyeksi keuntungan yang didapatkan.
- c. Pada BUMK yang mendapatkan hibah dari pihak ketiga, baik dalam bentuk barang maupun program swakelola, perlu mengedepankan dialog dengan berbagai pihak terkait untuk menjamin prinsip akuntabilitas penyaluran hibah. Bila memungkinkan, berbagai hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor dapat disalurkan melalui mekanisme APBK.
- d. Terkait kerjasama usaha atau investasi dari pihak lain, pelaksana operasional wajib mengajukan rencana kerjasama untuk mendapatkan persetujuan dari Musyawarah Kampung.



2. Aktivitas Bisnis BUMK

- a. Pada karakteristik dimana SDM yang ada memiliki kesibukan yang padat di luar BUMK, kami merekomendasikan pemilihan jenis usaha dengan aktivitas rutin yang minim, dan intensitas cashflow yang rendah. Hal ini juga sebagai jalan tengah untuk meminimalisir biaya operasional rutin BUMK, yang salah satunya terkait tuntutan gaji. Contoh : kebun sawit, rumah walet, investasi ke perusahaan (BUMK) lainnya, dll.

3. Tata kelola BUMK

- a. Menurut hemat kami, setidaknya terdapat dua hal pokok yang akan memiliki daya ungkit besar terhadap keberhasilan BUMK, yakni musyawarah kampung yang berkualitas, serta kapasitas pelaksana operasional yang memadai. Namun, dalam proses assessment ditemukan berbagai kondisi timpang pada fungsi-fungsi tersebut. Sesuai PP 11/2021 yang mendudukan kembali sinergitas peran antara BUMK, Pemerintah Kampung, dan Masyarakat dengan menempatkan Musyawarah Kampung (Muskam) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang mengatur dan memutuskan 24 hal-hal pokok dan strategis pengelolaan BUMK, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Oleh karenanya, salah satu kunci utama keberhasilan BUMK terletak pada kualitas Muskam.
- b. Walaupun masih terdapat tantangan didalamnya, yakni kecenderungan forum musyawarah yang umumnya didominasi elit. Penyediaan data dan informasi sebagai bagian evaluasi dan arah kebijakan pengembangan BUMK perlu diupayakan untuk memperbaiki kualitas muskam menjadi ruang diskusi yang lebih inklusif dan partisipatif. Pun dalam hal kapasitas pelaksana operasional, yang perlu didukung dengan penyediaan berbagai tools praktis manajemen BUMK.

4. Tools Praktis Manajemen BUMK

- a. Kegagalan (atau fraud) pengelolaan BUMK acapkali bukan dikarenakan kecurangan, namun lebih kepada kesalahan atau ketidakmampuan pengelola BUMK untuk menyajikan kinerjanya dalam sebuah dokumen. Pasalnya, ketersediaan alat bantu pelaporan keuangan yang otomatis tersusun dari aktivitas pencatatan transaksi belum banyak tersedia dan terdiseminasi. Penyediaan berbagai template dan tools praktis perlu terus diupayakan untuk menjamin tata kelola BUMK yang baik, transparan dan akuntabel. Beberapa diantaranya adalah:
 - 1) Template Perkam, AD, dan ART BUMK.
 - 2) Template Program Kerja dan Rencana Usaha BUMK.
 - 3) Tools Analisa Kelayakan Usaha BUMK.
 - 4) Tools Pengelolaan Keuangan BUMK, dan
 - 5) Berbagai Template dan Tools Lain, sesuai karakteristik usaha BUMK.



5. Pengembangan Ekosistem

- a. Membangun Laboratorium Inovasi, proses knowledge management melalui pendokumentasian pengalaman (best practises dan worst practices) menjadi sebuah pengetahuan (model pembelajaran) untuk disebar-tularkan kepada BUMK dan Kampung lainnya. Praktik-praktik baik yang telah dilaksanakan pada beberapa BUMK dapat menjadi model pembelajaran yang efektif bagi BUMK lainnya. Seperti misalnya proses bisnis yang telah dijalankan BUMK Labanan Makarti, Laporan Keuangan BUMK Rindang Jaya, Tembudan, atau bahkan persoalan tata kelola bisnis di Biduk-Biduk yang juga dapat menjadi pembelajaran -yang kemudian menjadi pengetahuan- bersama.
- b. Membangun Hub Ekonomi, dengan mengembangkan keterpaduan rantai pasok antara kampung dengan pasar. Termasuk didalamnya inventarisir potensi dan produk dengan peluang pasar/ offtaker.
- c. Mengembangkan Jejaring, yang mempertemukan antar kompetensi (expertise) untuk menjawab berbagai kebutuhan kampung. Termasuk didalamnya meliputi dukungan teknis tertentu serta proses transfer of knowledge.

C. Catatan Umum dan Temuan Lapangan Akademi Kampung SIGAP

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil.
2. Berau memiliki banyak potensi, tetapi potensi besar tersebut gagal dimanfaatkan secara maksimal oleh Kampung dan BUMK.
3. Lambatnya proses transformasi kampung. Hal ini dikarenakan 4 area perbaikan strategis: infrastruktur politik/kapasitas kepemimpinan/kebijakan kepala kampung tidak dimiliki atau tidak terkelola dengan baik atau lahir dari proses politik yang cacat; infrastruktur ekonomi (entrepreneurship dan kolaborasi) tidak berjalan sama sekali; infrastruktur sosial (akuntabilitas dan transparansi) yang menjadi basic ethic sekaligus modal perubahan tidak dimiliki. Terakhir, infrastruktur teknologi, pemahaman soal pentingnya sistem informasi dan datakrasi belum terbangun.
4. Sinergitas antara Kampung, BUMK, dan lembaga lain belum banyak terjadi, justru yang paling banyak adalah konflik.
5. Lemahnya sisi perencanaan bisnis, pencatatan keuangan, pengembangan model usaha 100 BUMK di Berau.
6. Sejumlah BUMK telah memberikan pendapatan asli kampung (PAK). Tetapi penyertaan modal kepada BUMK sering menjadi celah penyelewengan. Perlu penataan ulang untuk pengelolaannya.
7. Tidak ada gaji tetap (bulanan) dan bonus kepada pengurus BUMK. Sehingga Direktur BUMK bekerja paruh waktu, tidak total. Dan pergantian pengurus sering terjadi. Jika ingin melihat BUMK berkembang maju, gaji tetap diberikan dan setidaknya nilainya di bawah UMR.



D. Rencana Kerja & Road Map AKS 4

Program Akademi Kampung SIGAP yang sudah 3 tahun berjalan telah menunjukkan dampak positif. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran perangkat kampung dan pengurus BUMK di kelas belajar yang tinggi dari tahun ke tahun, keterlibatan Pejuang SIGAP Sejahtera dan lembaga lain dalam proses asesmen dan kelas belajar. Terbentuknya kampung *role model* Tata Kelola Pemerintahan Kampung di Wilayah Pesisir (Kampung Sumber Agung) dan Tata Kelola Kelembagaan BUMK di Wilayah Hilir (Kampung Labanan Makarti). Namun, Akademi Kampung SIGAP masih menyisakan tantangan untuk kampung-kampung di Wilayah Hulu Segah dan Hulu Kelay.

Dan berikut ini adalah *roadmap* atau rencana kerja pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Kampung dan Tata Kelola Kelembagaan BUMK untuk program Akademi Kampung SIGAP lanjutan:

Tabel 21 13 Agenda Prioritas AKS 4

No	Agenda
1	Sasaran wilayah atau peserta program tidak lagi tersebar serta dalam jumlah banyak seperti AKS 1 - AKS 3. Melainkan lebih terfokus, yaitu inisiasi 10-12 Kampung "role model" Tata Kelola Pemerintahan Kampung atau Tata Kelola Kelembagaan BUMK di Kabupaten Berau.
2	Sasaran yang terfokus akan membuat pendampingan model live in di tingkat tapak lebih intensif.
3	Pendampingan intensif strategi pembangunan kampung-kampung di kawasan Wilayah Hulu dan Pulau Terluar perlu menjadi prioritas, mengingat tingkat kemajuan yang dicapai relatif lambat
4	Durasi program kegiatan dibuat panjang, tidak lagi pendek seperti tiga fase sebelumnya.
5	Pendekatan ekosistemik (belajar bersama/berjejaring) tetap dipakai. Dengan kata lain, pendekatan terhadap perubahan sosial, ekonomi, masyarakat, dan politik diletakkan dalam konteks ekosistemik sehingga faktor determinan muncul. Tetapi yang terpenting faktor determinan memiliki multiplier effect.
6	Pengembangan dukungan kebijakan untuk ekosistem inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kampung dan Tata Kelola Kelembagaan BUMK dalam rangka kemandirian kampung dan kemajuan BUMK.
7	Bentuk dan mekanisme irisan program antar-lembaga perlu disepakati di awal sebelum program jalan sehingga dapat lebih terarah dan muncul harmonisasi.
8	Jika Akademi Kampung SIGAP 2021 – 2023 terfokus pada dua sub-program, yakni Tata Kelola Pemerintahan Kampung dan Tata Kelola Kelembagaan BUMK. Maka Akademi Kampung SIGAP selanjutnya, perlu perluasan pada program Tata Kelola Sumber Daya Alam (khususnya Perhutanan Sosial).





No	Agenda
9	Fasilitasi kampung-kampung di Berau untuk Sistem Informasi Kampung Terpadu (SIKT). Dan minimal dari 100 kampung di 12 kecamatan di Berau, muncul 1 “role model” percontohan “Kampung IT”.
10	Fasilitasi rencana tata ruang wilayah untuk kampung serta pemanfaatan pengelolaan hutan untuk rakyat
11	Penyelesaian sejumlah permasalahan lembaga ekonomi BUMK seperti pendaftaran badan hukum, pencatatan keuangan, pemilihan jenis usaha, komunikasi dan kerjasama parapihak. Dan untuk melihat indikator kinerja, perlu dibuat khusus “Lomba BUMK tingkat Kabupaten Berau” setiap tahun.
12	Transformasi BUMK, terutama untuk akuntabilitas, sebagai wujud pelaksanaan komitmen terhadap penyertaan dana alokasi kampung.
13	Inisiasi Sekolah Calon Kepala Kampung dan Sekolah Calon Direktur BUMK.



H | Dukungan dan Penutup Akademi Kampung SIGAP (AKS)



PEJUANG
SIGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar
Inovasi Desa



DUKUNGAN & PENUTUP

Program Akademi Kampung SIGAP (AKS) menjadi salah satu bagian dari program besar SIGAP Sejahtera – program unggulan Kabupaten Berau – terlaksana atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau yang diwakili oleh DPMK Berau, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Yayasan Darma Bhakti Berau Coal, dan Universitas Gadjah Mada selaku pengelola program sekaligus konsorsium bersama. Akademi Kampung SIGAP telah menjangkau lebih dari 50 kampung/desa yang tersebar di 3 Kabupaten, yakni Berau, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Akademi Kampung SIGAP didukung oleh pendanaan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan mendapat dukungan kebijakan/teknis dari DPMK Berau serta Sekretariat Kabupaten SIGAP Sejahtera, sementara implementasi tingkat tapak dilaksanakan oleh Yayasan Sanggar Inovasi Desa. Proses asesmen dan pelatihan kelas belajar didukung oleh Pemerintah Kampung dan Lembaga BUMK.



|| Lampiran



PEJUANG
SIGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



 Sanggar
Inovasi Desa

Laporan Akhir Program Akademi Kampung Sigap 3 Tahun 2023



LAMPIRAN

Materi 1. Pengantar Kewenangan Kampung



ysid.or.id

UU DESA DAN KEMANDIRIAN DESA



Wahana pembentukan ekosistem inovasi kemandirian desa melalui desain *knowledge management* yang bertumpu pada nilai otentik, lestari dan tumbuh bersama dengan mengarus utamakan kerja-kerja kolaboratif lintas *stakeholder*.

Mendorong desa menjadi pusat sistem inovasi perubahan tata kelola pemerintahan dan kewirausahaan desa

www.sanggarinovasidesa.id





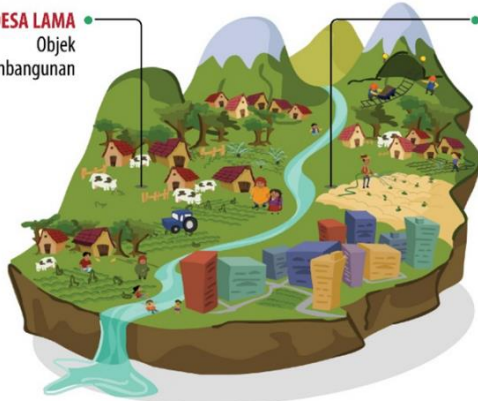
Kampung (Desa)

- Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.



PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN DESA: DESA SEBAGAI SUBYEK UTAMA PEMBANGUNAN

DESA LAMA
Objek
Pembangunan



DESA BARU
Subyek
Pembangunan:
Partisipatoris



**PERBAIKAN
INFRASTRUKTUR EKONOMI**



**PERBAIKAN
INFRASTRUKTUR POLITIK**



**PERBAIKAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL**



**PERBAIKAN
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI**



KEWENANGAN DESA

KEWENANGAN BERDASARKAN ASAL USUL

Subyek	Cakupan	PP 43/2014	Permendes No.1/2015
Desa	Hak Asal-usul: Merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sistem organisasi masyarakat adat ➢ Pembinaan kelembagaan masyarakat ➢ Pengelolaan Tanah kas desa ➢ Pengembangan Peran Masyarakat Desa 	Meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem organisasi perangkat Desa 2. Sistem organisasi masyarakat adat 3. Pembinaan kelembagaan masyarakat 4. Pengelolaan Tanah Bengkok 5. Pengembangan peran masyarakat 6. Dll
Desa Adat			Meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat 2. Pranata hukum adat 3. Pemilikan hak tradisional 4. Pengelolaan tanah ulayat 5. pengelolaan tanah kas desa adat 6. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat 7. Dll

Permendagri 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa

Matriks Kewenangan Lokal Berskala Desa

CAKUPAN	BIDANG	PP 43/2014	PERMENDESA NO.1/2015
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa	Pemerintahan Desa	a. Pengelolaan tambatan perahu	1) Penetapan organisasi Pemerintah Desa
	Pembangunan Desa	b. Pengelolaan pasar desa	2) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
	Keayakatan Desa	c. Pengelolaan tempat pemandian umum	3) Penetapan perangkat Desa
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	d. Pengelolaan jaringan irigasi	4) dll
		e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa	1) Pelayanan dasar desa
		f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu	2) Sarana dan prasarana
		g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar	3) Membina kerukunan warga desa
		h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan	4) Pengembangan ekonomi lokal desa
		i. Pengelolaan air minum berskala desa	5) dll
		j. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian	1) Membina keamanan, ketertibandan
			2) ketentraman wilayah dan masyarakat
			3) membina kerukunan warga desa
			4) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi
			5) dll



KEWENANGAN DESA

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

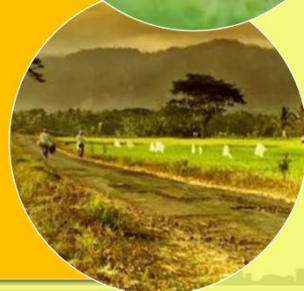
- 1 Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa;
- 2 Menetapkan organisasi Pemerintah Desa;
- 3 Pengangkatan perangkat desa
- 4 Memfasilitasi pembentukan BPD;
- 5 Membuat Peraturan di Desa
- 6 Merencanakan, melaksanakan, pemantuan dan pengendalian pembangunan desa
- 7 Mengelola Keuangan Desa
- 8 Melakukan Pungutan Desa
- 9 Mengelola Aset Desa
- 10 Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa
- 11 Melakukan Kerjasama antar desa
- 12 Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga
- 13 Menetapkan batas desa
- 14 Penanggulangan kemiskinan
- 15 Penanggulangan bencana tingkat desa
- 16 Mengelola sistem informasi desa
- 17 Memberikan Rekomendasi



KEWENANGAN DESA

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 1 Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - a Pengembangan Kelembagaaan Petani lokal
 - b Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
 - c Pengembangan lumbung pangan;
 - d fasilitas modal usaha tani;
 - e membantu penyediaan benih unggul;
 - f pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
 - g pemeliharaan irigasi desa;
- 2 Kehutanan dan Perkebunan
 - a Pengelolaan dan pelestarian hutan desa;
 - b penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa
- 3 Perindustrian dan Perdagangan
 - a pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
 - b pengelolaan pemasaran hasil industri Desa;
- 4 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - a pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan lkan;
 - b pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.
 - c Mendirikan dan Memperkuat BUMDes

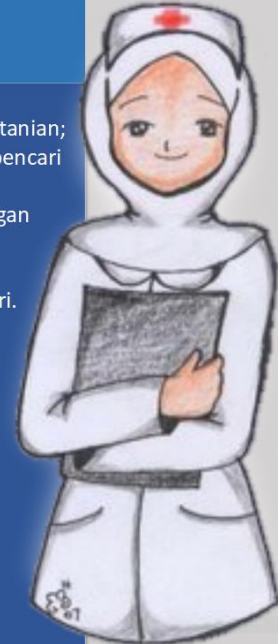




KEWENANGAN DESA

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 5 Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - a pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - b pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - c pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - d pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
 - h pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
 - i pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.
- 6 Kesehatan
 - a penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
 - b fasilitasi pengelolaan posyandu;
 - c pengelolaan dana sehat;
 - d pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
 - e penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
 - f penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - g pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa
 - h pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
 - i pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.



KEWENANGAN DESA

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 7 Pendidikan dan Kebudayaan
 - a Penyelenggaranya kursus-kursus ketrampilan;
 - b penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - c pendataan warga buta huruf/aksara , Putus Sekolah dan Siswa Miskin.
 - d Bantuan Siswa Miskin
- 8 Sosial
 - a mengeluarkan surat keterangan miskin;
 - b Memfasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
 - c menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
 - d pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- 9 Penataan Ruang
 - a Penataan tata ruang desa
- 10 Permukiman/Perumahan
 - a pengaturan tata permukiman desa;
 - b pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;
 - c memfasilitasi pembangunan rumah karena bencana





KEWENANGAN DESA

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

11 Pekerjaan Umum

- a pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;
- b pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi Desa
- c pengelolaan embung milik desa
- d Perencanaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Perawatan jalan dan jembatan desa;
- e pengelolaan sumber daya air di desa;
- f memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal
- g fasilitasi pembangunan MCK RTM
- h Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
- i Pembangunan dan Pemeliharaan SPAL dan Drainase Desa

12 Lingkungan Hidup

- a Pembangunan, pengelolaan dan perawatan penampungan air hujan;
- b pemantauan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;
- c pelarangan penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum desa;
- d Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa

13 Pariwisata

- a pengelolaan obyek wisata milik desa;



KEWENANGAN DESA

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

14 Pertanian

- a penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

15 Kependudukan dan Catatan Sipil

- a Registrasi Penduduk dan surat keterangan kependudukan

16 Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

- a Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Poskamling dll)
- b pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- c pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa

17 Informasi dan Komunikasi

- a pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
- b sosialisasi berbagai kebijaksanaan desa
- c pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- d pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;





KEWENANGAN DESA

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 18 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB
 - b Penyuluhan KB
 - c Fasilitasi ketrampilan produktif bagi pra keluarga sejahtera
 - d penguatan kapasitas bagi penyandang masalah sosial
 - e fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi RTM
- 19 Pemuda dan Olahraga
 - a pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;
 - b peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
 - c penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
 - d memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda
 - e pemasyarakatan olah raga;
 - f penyelenggaraan olahraga tingkat desa;
 - g pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda
- 20 Statistik
 - a penyusunan profil desa
 - b pendataan penduduk miskin
- 21 Arsip dan Perpustakaan
 - a Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;



KEWENANGAN DESA

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

- 1 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 2 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa

KEWENANGAN DESA

BIDANG PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT

- 1 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa dalam pembangunan
 - b pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat
 - c pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa
 - d peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan
- 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a Pembentukan dan Fasilitasi komite perlindungan anak desa;
 - b Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan
 - c Pemberdayaan masyarakat berbasis gender
 - d Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Anak





KEMANDIRIAN DESA

ysid.or.id



KAPASITAS SOSIAL

14.281 13.402



± 86 Milyar



KAPASITAS SOSIAL



MODAL SOSIAL



LAWAN! MONEY POLITIC

**KAPASITAS POLITIK YANG SEHAT
HANYA TERLAHIR DARI
PROSES POLITIK YANG SEHAT**



BASIS DAN INSTRUMEN KAPASITAS DESA

K
A
P
A
S
I
T
A
S

REGULASI

EKSTRAKTIF

DISTRIBUTIF

RESPONSIF

JARINGAN



RENCANA STRATEGIS
DESA

RENCANA
PEMBANGUNAN DESA

PERATURAN DESA

ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA



KAPASITAS PROSES DAN BIROKRASI



KULTUR BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA

- LAMBAN
- KORUP
- TIDAK TRANSPARAN
- BIAS KEPENTINGAN ELIT DESA



REFORMASI BIROKRASI



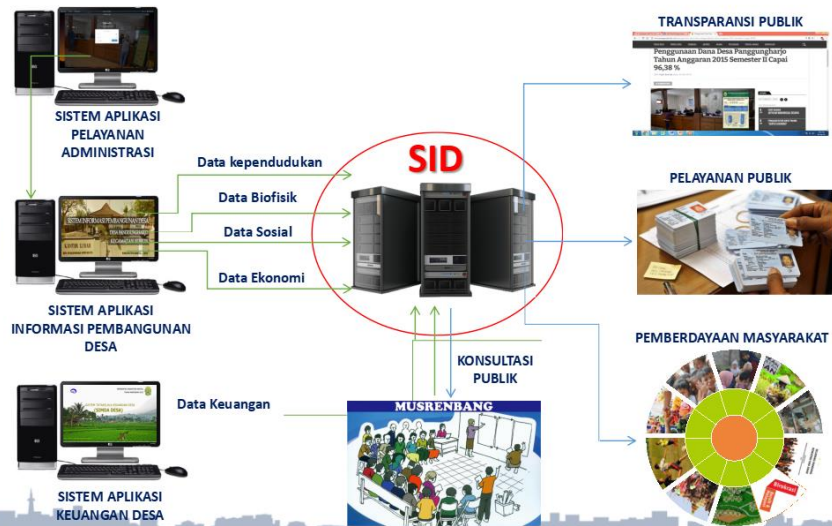


JANGAN TINGGALKAN DESA

karena desa layak diperjuangkan



PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI





Materi 2. Identifikasi dan pemetaan aktor



ysid.or.id

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG (LKK):

PEMETAAN FUNGSI, PERAN, DAN PELAKU



Wahana pembentukan ekosistem inovasi kemandirian desa melalui desain *knowledge management* yang bertumpu pada nilai otentik, lestari dan tumbuh bersama dengan mengarusutamakan kerja-kerja kolaboratif lintas *stakeholder*.

Mendorong desa menjadi pusat sistem inovasi perubahan tata kelola pemerintahan dan kewirausahaan desa

www.sanggarinovasidesa.id



**PASAR
DESA**.id





Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK)

UU No. 6/2014, Ps. 94; PP No. 43/2014, Ps. 150 & 151;
Permendagri No.18/2018

- LKK:
 - Wadah partisipasi dan menciptakan akses masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
 - Mitra Pemkam dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan
 - Lingkup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat
 - Mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat
- Pembentukan dan pengaturan keberadaan, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban diatur dalam PERKAM, termasuk dukungan pembiayaan.



- Lembaga kemasyarakatan Desa, paling sedikit antara lain:
 - RT/RW
 - PKK
 - Karang Taruna
 - Posyandu
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- LKD lainnya dapat dibentuk sesuai perkembangan dan kebutuhan, misalnya:
 - Pokdarwis
 - LPHD / Pengelola Hutan Mangrove

Dalam melaksanakan tugas,
LKD mengusulkan program
dan kegiatan kepada Pemkam

SELARAS DENGAN ARAH
KEBIJAKAN PRIORITAS
PEMKAM



POSISI LKK TERHADAP SOTK PEMKAM



LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI

RT/RW	a. membantu Kakam dalam bidang pelayanan pemerintahan; b. membantu Kakam dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kakam.
PKK	pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
POSYANDU	menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda
KARANG TARUNA	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
LPM	menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung dengan swadaya gotong-royong.
POKDARWIS	
LPHD	

1. Seberapa efektif telah membantu Pemkam?
2. Seberapa efektif program/kegiatannya sesuai dengan arah kebijakan Kakam?
3. Seberapa mampu mengelola program kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan)?



Dinamika LKK (1)

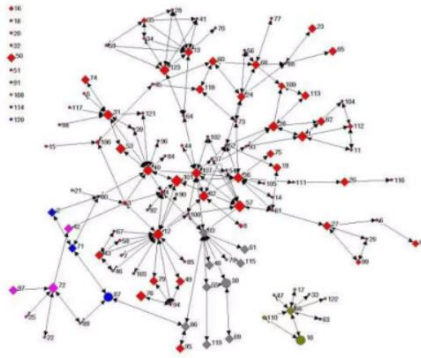
- LKK regular belum dimanfaatkan optimal untuk membantu Pemkam
 - Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan program?
 - Pemantauan perkembangan berbagai data kampung terkait lingkup fungsi LKK?
- Ada permintaan dari pemerintah Kab/Prov/Pusat atau pihak lainnya untuk membentuk LKK selain yang sudah ada?
- Biasanya, isunya sektoral didorong oleh Kementerian/OPD Sektoral:
 - Pariwisata?
 - Kehutanan
 - Air Bersih?
 - Listrik Kampung?
- Biasanya, permintaan disertai “iming-iming” insentif:
 - Honor pengurus?
 - Dukungan biaya program?
 - Insentif lainnya



Dinamika LKK (2)

- Tidak jarang LKK “non regular” ini menimbulkan masalah di kemudian hari, yang menimbulkan kebingungan:
 - Insentif tidak berlanjut (selanjutnya, diharapkan dibiayai oleh pemkam)?
 - Pemkam kadang “dilewati”?
 - Dukungan program kepada LKK non-regular melibatkan Pemkam?
 - Terjadi ketidaksesuaian agenda dengan arah kebijakan pemkam?
 - Pembiayaan tidak dapat dicatatkan melalui APBK?
 - Terjadi kontestasi antar LKK atau antara LKK dengan lembaga lain di kampung
 - Misal, pemanfaatan potensi wisata antara BUMK dan Pokdarwis atau dengan LPHD?

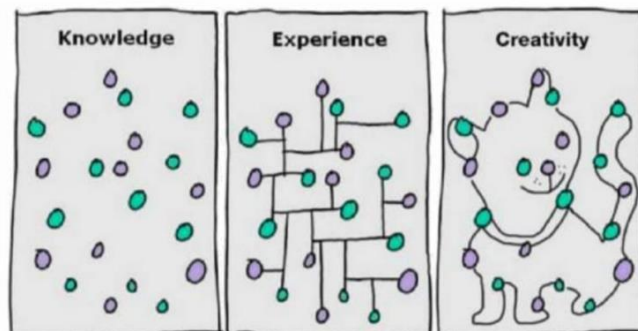
Berpikir dan Bertindak Kreatif thd LKK (1)



- Disadari atau tidak, kita hidup dalam “networked society” (organisasi, komunitas, tim/kelompok, dll)
- Struktur dari sebuah network, menunjukkan sebenarnya bagaimana sebuah networked society tersebut bekerja.
- Dengan memahami bagaimana struktur tersebut bekerja, kita akan mendapatkan perspektif yang lebih akurat untuk meningkatkan kinerjanya.
- Network Analysis atau Social Network Analysis merupakan alat bantu (tools) untuk memahami sebuah struktur network

Berpikir dan Bertindak Kreatif thd LKK (1)

Creativity is about connecting the dots in a purposeful way.





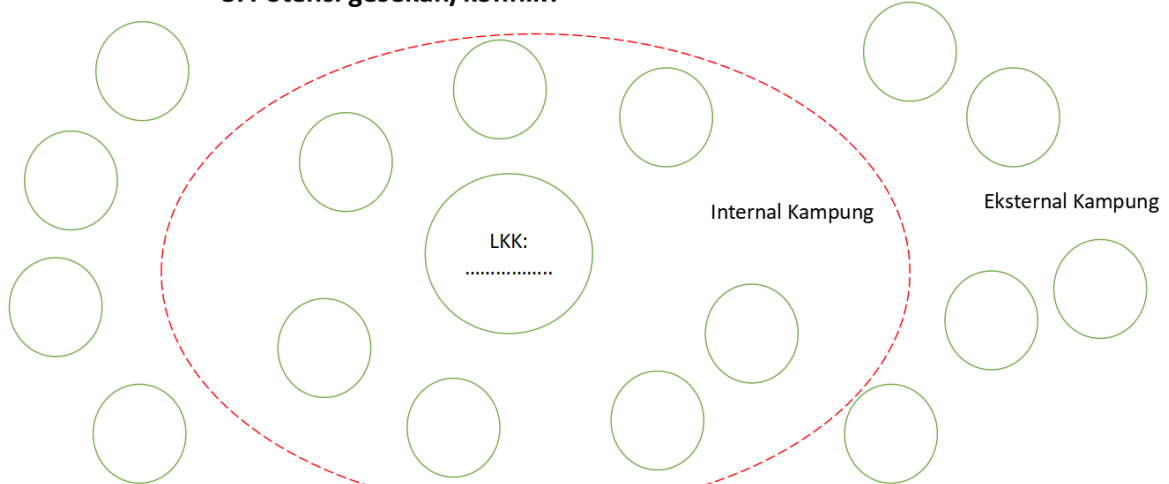
REVITALISASI LKK (1)

LKK	FUNGSI UTAMA	FUNGSI/PERAN & PROGRAM/KEGIATAN LKK SAAT INI	FUNGSI IDEAL YANG DIHARAPKAN PEMKAM THD LKK	DATA KAMPUNG YANG DAPAT DIBANTU MENGHIMPUN MELALUI LKK



REVITALISASI LKK (2):

1. Pelaku yang terhubung/dapat memberikan dukungan?
2. Bentuk Hubungan/Dukungan/Kerjasama yang diharapkan?
3. Potensi gesekan/konflik?



Identifikasi aktor dan pemetaan jaringan



Materi 2. 1. Pengantar Menuju Data Desa (2)



Asa Kemandirian Desa; sepotong cerita dari Panggungharjo

Wahyudi Anggoro Hadi
Lurah Desa Panggungharjo, Sewon Bantul DIY

desa adalah masa
depan dunia



udara bersih



air bersih



pangan sehat



GAMBARAN UMUM DESA PANGGUNGHARJO

INFORMASI DASAR KEWILAYAHAN

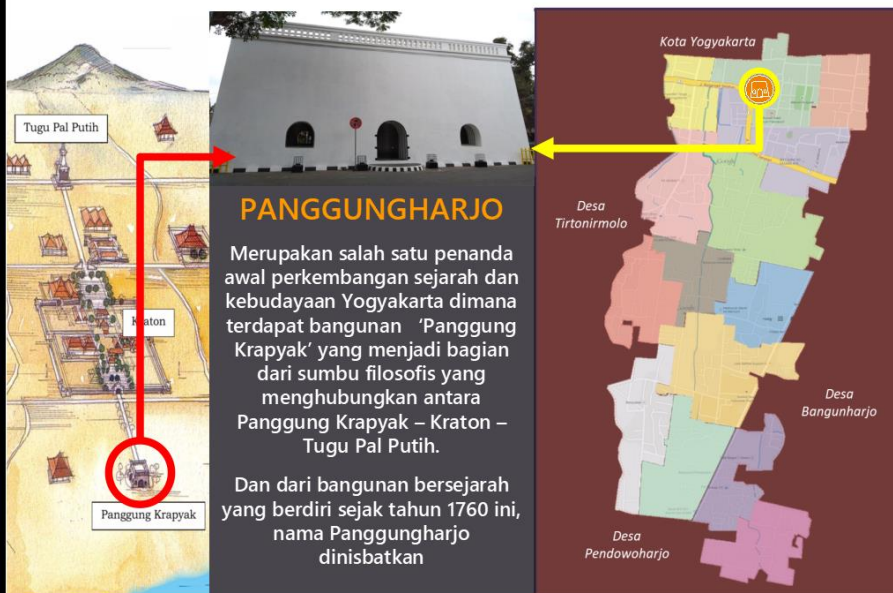
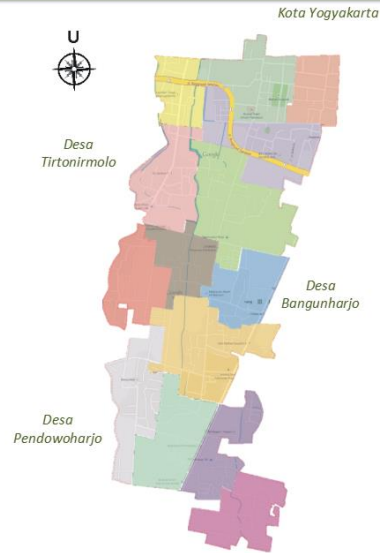
Luas Wilayah	560,966 Ha
Batas Wilayah	
▪ Utara	Kota Yogyakarta
▪ Selatan	Desa Pendowoharjo
▪ Barat	Desa Tirtonirmolo
▪ Timur	Desa Bangunharjo
Orbitasi	
ke kecamatan	2 km
ke ibu kota kabupaten	6 km
ke ibu kota DIY	7 km

INFORMASI DASAR KEPENDUDUKAN

	2014	2015
Jumlah Penduduk	27.392	27.683
Jumlah Laki-laki	14.071	14.281
Jumlah Perempuan	13.321	13.402
Jumlah Kepala keluarga	8.594	8.739

INDIKATOR EKONOMI (2015)

Tipologi	Jasa dan Perdagangan
Pendapatan Sektoral	86 Milyar Rupiah







VISI

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Panggungharjo yang demokratis, mandiri dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan

PRASYARAT

Terselenggaranya

pemerintahan yang bersih,
transparan dan
bertanggung jawab

untuk mewujudkan masyarakat
Panggungharjo yang

demokratis,

KONDISI IDEAL YANG DICITAKAN

mandiri dan sejahtera

serta

berkesadaran lingkungan

PERSPEKTIF/ CARA PANDANG



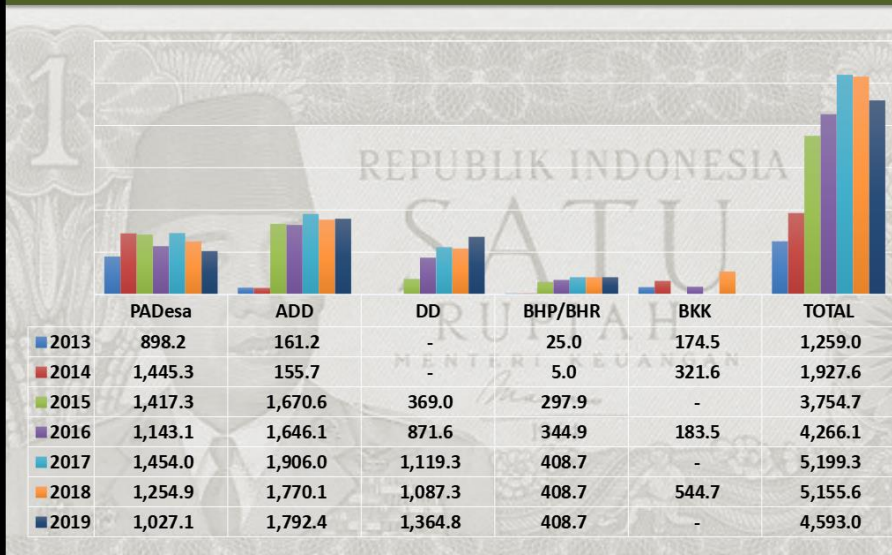


DESA PANGGUNHARJO



Informasi lebih lanjut
www.panggunharjo.desa.id

SUMBER PENDAPATAN DESA PANGGUNHARJO TAHUN 2013 – 2019 (Dalam Jutaan)





PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015 - 2019



BASE LINE
PEMBANGUNAN DESA

PENGUATAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN DAN
MASYARAKAT DESA

PENGEMBANGAN EKONOMI
LOKAL

PENDAYAGUNAAN POTENSI
DESA



BESARAN ALOKASI BELANJA DANA DESA TIAP BIDANG
TAHUN 2015 - 2019
(x 1.000)



BENTANG SOSIAL



DATA PERKEMBANGAN
JENIS DAN BESARAN PENDAPATAN 2013-2016





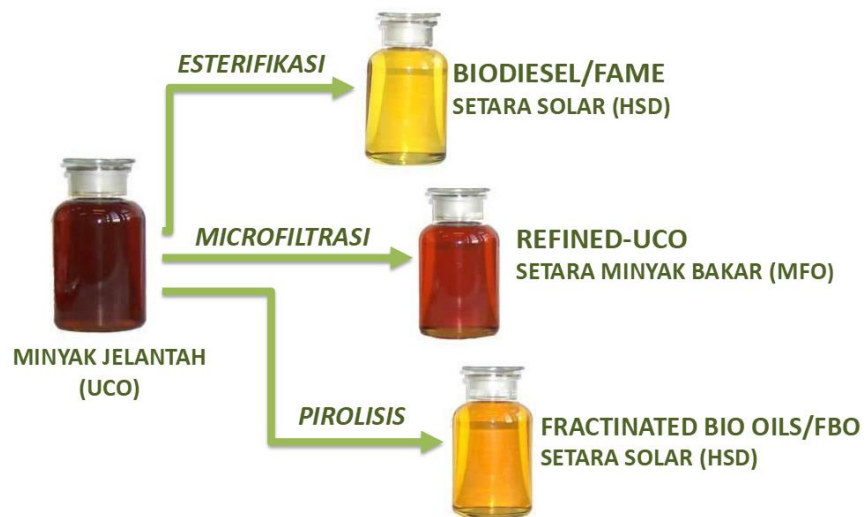
RISET PEMANFAATAN JELANTAH

KOLABORASI BUMDes PANGGUNG LESTARI – PT. DANONE AQUA



RISET PEMANFAATAN JELANTAH

(USED COOKING OILS)





BENTANG
EKONOMI



GERAI PRODUK DESA



lurik
jumputan
batik tulis
payet
sepatu
tas rajut

rupa-rupa kerajinan
dan dolanan tradisional

minuman olahan
rempah nusantara

rupa rupa
camilan
makanan
minuman
oleh-oleh

BENTANG
TEKNOLOGI



PRODUKSI TAMANU OILS/MINYAK NYAMPLUNG



BENTANG
BUDAYA



JASA WISATA DESA



PERLINDUNGAN
SOSIAL



Jenis Perlindungan

KESEHATAN

Dilaksanakan dengan program JPS Kesehatan
Jenis Layanan

pelayanan kesehatan dasar meliputi biaya konsultasi dan pemeriksaan medis; biaya tindakan medis kecil/ sederhana; biaya pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui; biaya pemeriksaan balita; biaya pembelian obat sesuai obat sesuai Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan/atau obat yang tersedia di PP-JPS Kesehatan sesuai indikasi medis; dan biaya pelayanan kegawatdaruratan

PENDIDIKAN

Dilaksanakan dengan program JPS Pendidikan
Jenis Layanan

Asuransi pendidikan dengan premi dibayar oleh BAPEL JPS

**KESEHATAN
IBU DAN
ANAK**

Dilaksanakan dengan program JPS KIA
Jenis Layanan

7x pemeriksaan kehamilan, 1x persalinan normal, 2x pemeriksaan nifas dan 5 imunisasi lengkap untuk bayi





PERLINDUNGAN KESEHATAN



LAYANAN
LUAR
GEDUNG



PEMERIKSAAN
PENGOBATAN
GRATIS



HOME CARE
OLEH PERAWAT
DESA

CAKUPAN LAYANAN KARTU KIA



7X PEMERIKSAAN
KEHAMILAN



PERSALINAN
NORMAL

2X PEMERIKSAAN
NIFAS



LIMA IMUNISASI
LENGKAP



PERLINDUNGAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

MANFAATKAN LAYANAN PURNA **KARTU KIA**



Dengan **KARTU KIA** dapatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak berupa,
» Pemeriksaan Kehamilan
» Pertolongan Persalinan secara normal
» Pemeriksaan Nifas
» Lima Imunisasi Lengkap bagi bayi di BPRB LARAS HATI - AKBID YOGYAKARTA secara **GRATIS**



JADWAL PELAYANAN KARTU KIA di BPRB LARAS HATI		
Pemeriksaan Kehamilan	: Setiap hari	08.00-20.00 WIB
Pertolongan Persalinan	: Setiap hari	24 jam
Imunisasi	: Setiap Minggu ke II	09.00-10.30 WIB
Pemeriksaan KIA	: Setiap hari	08.00-20.00 WIB

*KARTU KIA BAPEL JPS merupakan program jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo bekerjasama dengan BPRB Laras Hati, Akademi Kebidanan Yogyakarta. Sistem rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan Anak dan keluarga miskin, untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi:

- Bp. Sunardi, S. Ag. Kepala Bapel-Kes dan Agama Desa Panggungharjo
- Sdr. Jamali
- Sdr. Rizki

Manfaatkan juga fasilitas mobil Ambulance Gratis*
Persembahan Bapel JPS Desa Panggungharjo dan HAFSA Transport

Hubungi
Humaidi 081904179127
Jani 085862464260
Rini 085725041458

*tidak bagi sampai dengan 10 km



PROGRAM LAYANAN KIA **Kerja Sama Panggungharjo dan Laras Hati**

BANTUL OKRO - Sebagai komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Badan Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS) Desa Panggungharjo Sewon mulai menjalin kerja sama dengan Balai Pengobatan Rumah Bersalin (BPRB) Laras Hati Akademi Kebidanan Yogyakarta (AKBidy) Penandatanganan MoU dilakukan Direktur AKBidy, Drs H. Horri Soekirni MEd dan Lurah Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi SFarm Apt, Smin C102, di BPRB Laras Hati.

Perjanjian tersebut tertuang pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi kelompok rentan di Desa Panggungharjo, sebagai penerima manfaat. Penandatanganan kerja sama bertujuan peningkatan balasan BPRB Laras Hati. Menurut Pimpinan BPRB Laras Hati Eka Nur Rahayu SSIT MPH, kerja sama ini berlaku dua tahun sejak ditandatangani. Bapel JPS mener-



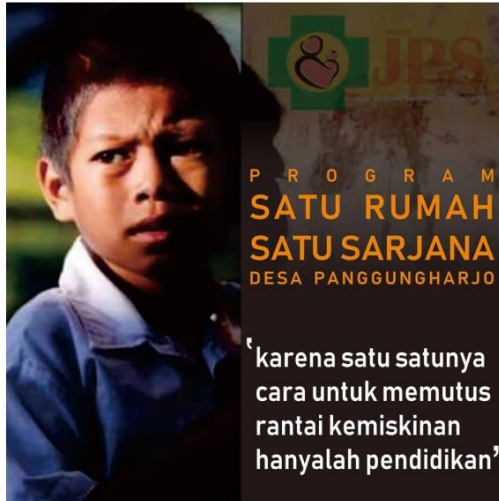
Lurah Panggungharjo (kanan) dan Direktur AKBidy, usai penandatanganan MoU.

bitkan Kartu KIA yang diberikan kepada penerima manfaat, sedangkan Laras Hati akan memberikan layanan kesehatan kepada pemegang Kartu KIA secara gratis. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, pemeriksaan nifas dan lima imunisasi lengkap bagi bayi. "Terdapatnya seputih ditanggung Fasilitas Panggungharjo dan separuhnya oleh Laras Hati sebagai program pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR AKBidy," jelas Eka didampingi Heri Soekirni.

Eka menjelaskan, BPRB Laras Hati juga menerima layanan kesehatan bagi masyarakat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun banyak masyarakat belum tahu, Laras Hati bisa melayani peserta BPJS, akibat perbedaan daftar yang dibicarakan PT Axa dengan Jamsostek. Padahal bagi peserta BPJS ini, Laras Hati menjadi komitmen dengan perusahaan layanan kesehatan karyawan. (Bantul)



PERLINDUNGAN PENDIDIKA



PROGRAM
**SATU RUMAH
SATU SARJANA
DESA PANGGUNGHARJO**

'karena satu satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan hanyalah pendidikan'





**BASE LINE
PEMBANGUNAN DESA**

**PENGUATAN KELEMBAGAAN
Pemerintahan dan
Masyarakat Desa**

**PENGEMBANGAN EKONOMI
LOKAL**

**PENDAYAGUNAAN POTENSI
DESA**

**PROGRAM PEMBERDAYAAN
DESA PANGGUNG HARJO 2019-2024**



**BERSAMA
KITA
PERJUANGKAN
PANGGUNG HARJO
2024
MANDIRI SEJAHTERA**

Setiap keluarga memiliki **Tabungan**
Setiap keluarga memiliki **Jaminan Hari Tua**
Setiap keluarga memiliki **Jaminan Kesehatan**
Indeks Kebahagiaan meningkat





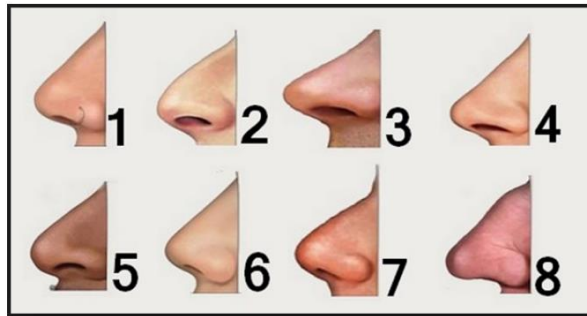
KEMANDIRIAN DESA





Materi 2. 2. Pengantar Kebijakan Berbasis Data

Apa itu data



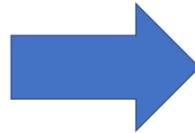
Data atau informasi?



Pengertian Data

Data bisa dibayangkan sebagai sebuah fakta yang belum diolah sehingga tidak bisa disajikan begitu saja ke publik atau pembaca. Data terkadang masih dalam bentuk potongan atau sepotong kata yang jika dibaca orang awam tidak akan bisa dimengerti dengan mudah. Data bisa berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, dan tanda apapun yang bisa diolah menjadi informasi.

Diproses/diolah



Pengertian Informasi

Informasi adalah serangkaian data yang sudah diolah sehingga bisa disampaikan dan lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Di dalam informasi terdapat sekumpulan data yang dirangkai dalam satu, dua, atau lebih kalimat.

Data

sector	jumlah
00nl_Combined_Sector	14625
00nl_Combined_Sector	10125
00nl_Combined_Sector	4900
business	1360
consumer	3150
00nl_Combined_Sector	5625
business	4950
consumer	675
00nl_Combined_Sector	4900
00nl_Combined_Sector	1090
business	805
consumer	1035
00nl_Combined_Sector	2610
business	1215
consumer	1395

Information



- Merupakan fakta mentah yang sulit dipahami orang lain
- Tidak memiliki makna
- Berupa angka, huruf, simbol, fakta, rincian, dan hasil pengamatan dasar
- Lebih detail dan bersifat teknis.

- Mudah dipahami orang lain
- Terdiri dari kumpulan data yang sudah diolah dengan teknik dan gaya penulisan tertentu
- Bersifat menjelaskan sesuatu
- Bisa digunakan untuk mengambil keputusan.



Dalam penyusunan perencanaan pembangunan tidak lepas dari data sebagai persyaratannya, dalam hal ini desa sebagai sumber data merupakan :

- Wilayah administrasi terdepan;
- Desa sebagai sumberdata yang mewakili keadaan yang sebenarnya;
- Sumber data yang valid dan akurat;
- Semuanya terangkum dalam profil desa;

Persoalan-persoalan apa saya yang dihadapi desa bapak/ibu terkait data?





Realita di desa, saat ini adalah banyak memiliki data namun belum terkelola dengan baik, sumber daya manusia yang terbatas, pembangunan sarana prasarana lebih banyak focus pada fisik bangunan.

Sedangkan infrastruktur TIK sangat kurang, beban kerja berbanding terbalik dengan reward serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang. Sehingga menimbulkan masalah bagi desa, antara lain :

- Kemiskinan
- Desa kurang berkembang
- Pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan desa karena data yang kurang akurat

Kebijakan Berbasis Data adalah jenis keputusan yang didasarkan pada fakta, informasi, atau data sebagai dasar utama untuk memilih di antara alternatif. Ini kontras dengan keputusan berdasarkan intuisi.

Pengumpulan
Data

data untuk mendefinisikan kebutuhan, menetapkan tujuan, merencanakan intervensi, dan mengevaluasi kemajuan dari pembangunan desa.

Analisis

- akuntabilitas pemerintah
- proses pembelajaran



PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI



Keadaan yang diinginkan, dengan dibangunnya SID bertujuan ingin mewujudkan *single data* untuk menunjang perencanaan pembangunan, sehingga :

1. Basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
2. Menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat;
3. Perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
4. Mewujudkan monitoring dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Informasi pembangunan yang akurat





Materi 3 Memahami Kebijakan dalam Legislasi Kampung (1)

MEMAHAMI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROSES DAN PRODUK LEGISLASI KAMPUNG

KEBIJAKAN

- Apa yang dipilih untuk dikerjakan/diatur dan apa yang tidak!

LEGISLASI

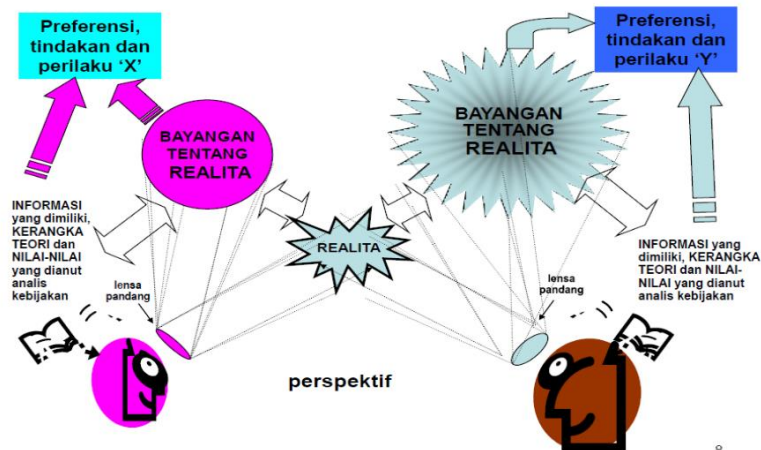
- Hal bagaimana merumuskan kebijakan ke dalam berbagai produk peraturan di kampung

LEGAL DRAFTING

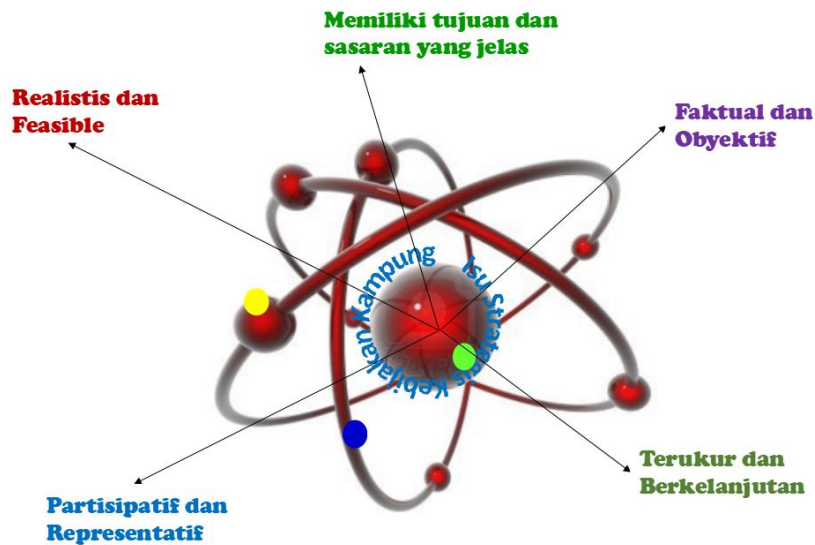
- Hal bagaimana teknis menyusun (memformulasikan):
 - norma-norma aturan secara logis, dapat dipahami, tidak saling bertentangan (koheren) dalam berbagai produk peraturan di kampung.
 - Kontrol teknis kaidah penulisan: bahasa, tanda baca, penomoran, dsb



Kebijakan: Apa yang dipilih untuk dikerjakan dan apa yang tidak!



Isu Strategis Menyusun Kebijakan Kampung





KEBIJAKAN PUBLIK YANG BAIK (1): DIMENSI KEBIJAKAN



KEBIJAKAN PUBLIK YANG BAIK (2)



- FOKUS PADA SASARAN YANG HENDAK DICAPAI (OUTCOME BASED) UNTUK MENJAWAB MASALAH
- BERBASIS DATA DAN BUKTI (EVIDENCE BASED):
 - DAPAT DIUKUR CAPAIAN PERKEMBANGANNYA DARI WAKTU KE WAKTU
- DILAKUKAN EVALUASI
 - DAPAT DILANJUTKAN ? DILANJUTKAN DENGAN PERBAIKAN? (REFORMULASI)
 - DIGANTI? DIHAPUS? (TERMINASI)





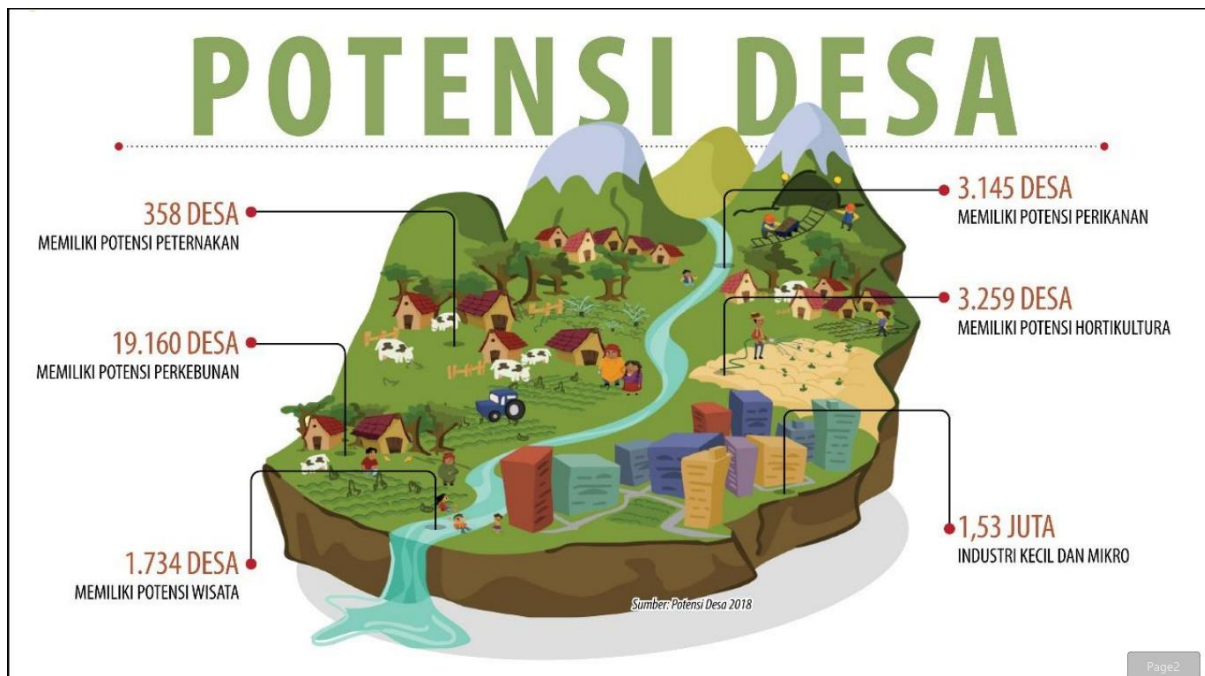
Materi Pengelolaan Keuangan BUMK

Sanggar Inovasi Desa ysid.or.id

AKADEMI KAMPUNG SIGAP #3

PENGELOLAAN KEUANGAN BUMK

(PENGANTAR)





ENTREPRENEURSHIP VS MANAGEMENT

**MENGENALI & MEMANFAATKAN
PELUANG MENJADI USAHA**

**MENGELOLA USAHA
MENJADI SEHAT & AKUNTABEL**

ENTERPRE
NEURSHIP

MANAGEMENT

MAIN FRAME ----->

“ART & EXPERIENCE”

“FUNCTION & KNOWLEDGE”

BASIC SKILLS ----->

“VALUE CREATION, CUSTOMER – PRODUCT FIT”

MKT – OPS – HRD – KEU

YANG AKAN
DIPELAJARI



BUMK TSIGAB memiliki kegiatan usaha penjualan keripik pisang. Dalam setahun, laku 5.000 bungkus, dengan harga jual Rp 10.000,00 per bungkus. Keripik tersebut merupakan hasil produksi warga yang disetorkan ke BUMK seharga Rp 6.000,00 per bungkus.

Sedangkan biaya yang dikeluarkan adalah :

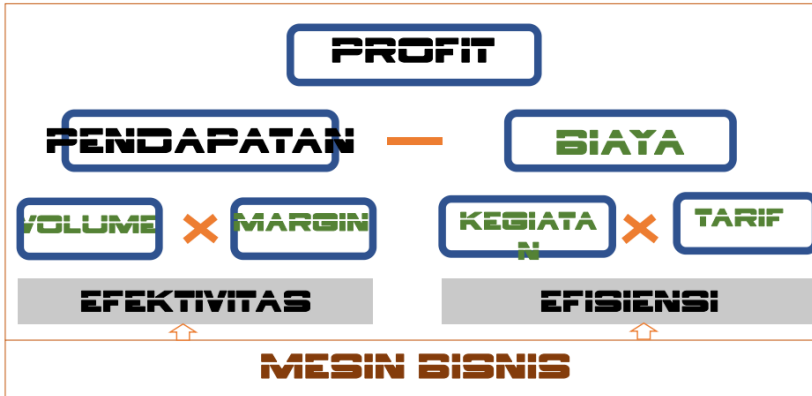
- a. Transportasi Rp 100.000,00 per bulan ,*
- b. Sewa kios Rp 3.000.000,00 per tahun,*
- c. Listrik & Air Rp 125.000,00 per bulan,*
- d. Gaji Rp Rp 1.500.000,00 per bulan.*

BERAPA LABA BUMK DALAM SETAHUN?

Pendapatan		
1	Pendapatan Penjualan	Rp 50.000.000
2	Harga Pokok Penjualan	Rp 30.000.000
Laba Kotor		Rp 20.000.000
Biaya		
3	Biaya Transportasi	Rp 1.200.000
4	Biaya Sewa Tempat	Rp 3.000.000
5	Biaya Listrik & Air	Rp 1.500.000
6	Biaya Gaji	Rp 18.000.000
Total Biaya		Rp 23.700.000
Laba / Rugi Usaha		-Rp 3.700.000



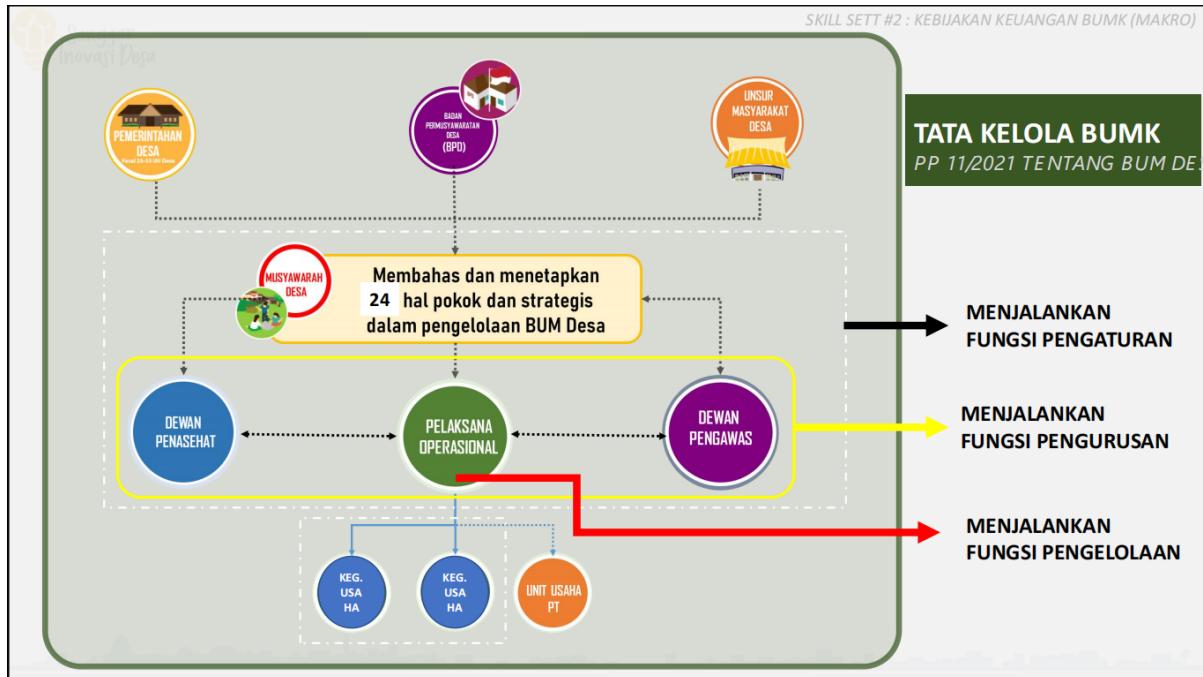
KONSEP DASAR DALAM BERBISNIS



STRATEGI BISNIS

- ✓ **MEMPERBESAR PENDAPATAN**
(CREATING REVENUE)
→ EFEKTIF
- ✓ **MENGURANGI BIAYA**
(REDUCE COSTS)
→ EFISIEN

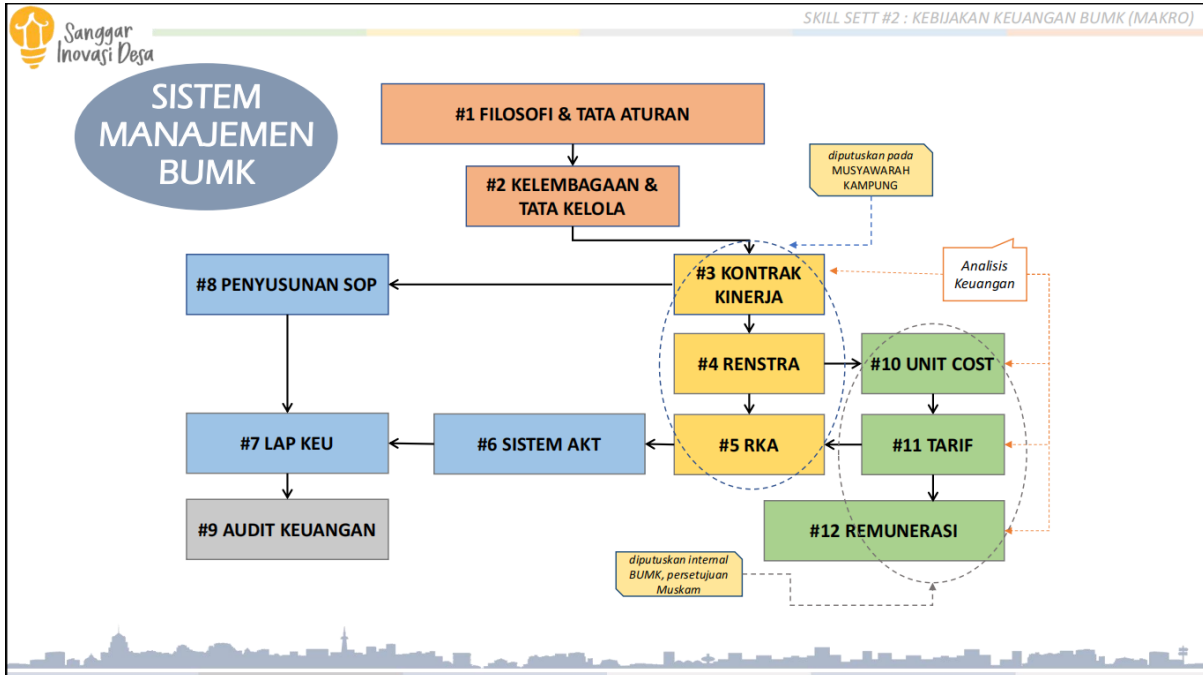




PP.11/2021 Pasal 17

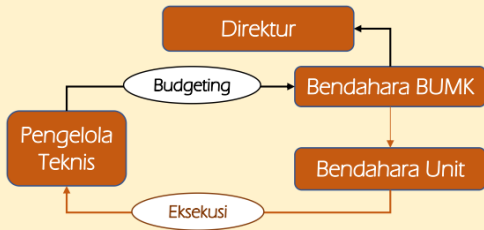
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang:

- menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian pada BUM Desa;
- membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
- memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
- membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.



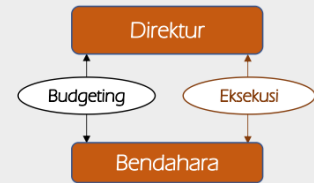


STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN BUMK



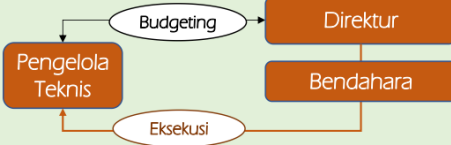
MODEL #1

- Inisiator – Pengelola Teknis
- Verifikator – Bendahara BUMK
- Otorisator – Direktur
- Eksekutor – Bendahara Unit



MODEL #3

Inisiator, Verifikator, Otorisator, Eksekutor → Direktur & Bendahara



MODEL #2

- Inisiator – Pengelola Teknis & Direktur
- Verifikator – Bendahara
- Otorisator – Direktur
- Eksekutor – Bendahara

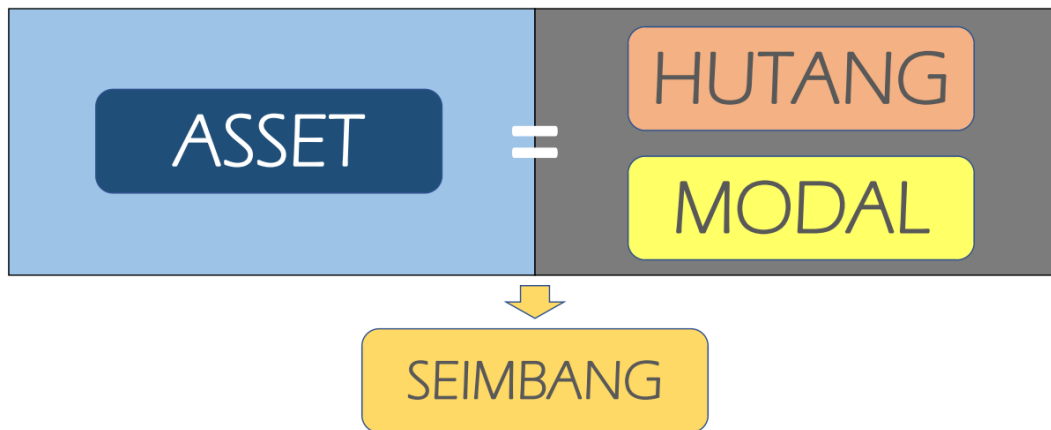
MODEL LAIN

*PRINSIP DASAR :
TANGGUNGJELAS &
TANGGUNGJAWAB*

Page11



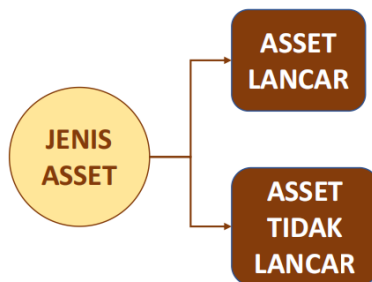
LOGIKA DAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI





ASSET

Asset adalah **kekayaan** yang **dimiliki** dan/atau **dikuasai** oleh BUM Desa baik **berwujud** maupun **tidak berwujud** guna mendapatkan **manfaat** di masa mendatang (untuk menghasilkan pendapatan)

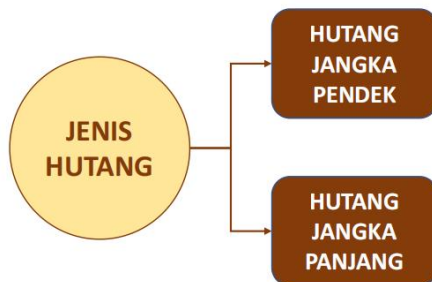


Asset BUM Desa dapat berasal dari :

- penyertaan modal
- bantuan tidak mengikat (hibah)
- hasil usaha
- pinjaman
- sumber lain yang sah



HUTANG



Hutang adalah **kewajiban** yang dimiliki oleh BUM Desa atas **perjanjian** yang dilakukan di **masa lalu** dan kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam bentuk **penyerahan jasa** dan/atau **asset** sesuai dengan **kesepakatan** antara kedua belah pihak yang terkait

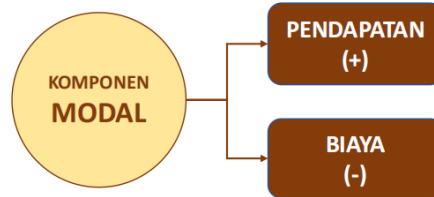


MODAL

Modal adalah **kekayaan** yang dimiliki oleh pemerintah desa yang diserahkan kepada BUM Desa untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kepentingan BUM Desa dalam menjalankan usahanya

Modal BUM Desa terdiri dari :

- Penyertaan modal oleh pemerintah desa
- Utang direksi maupun kontribusi masyarakat
- Investasi
- Saldo sisa hasil usaha kumulatif



PERAN LAPORAN KEUANGAN



FUNGSI PENGENDALIAN

- ✓ AKTIVA VS PASIVA
- ✓ PENGENDALIAN *FRAUD*
- ✓ PENGENDALIAN BIAYA

FUNGSI RESPONSIBILITAS

- ✓ TRANSPARANSI
- ✓ AKUNTABILITAS
- ✓ EVALUASI KINERJA

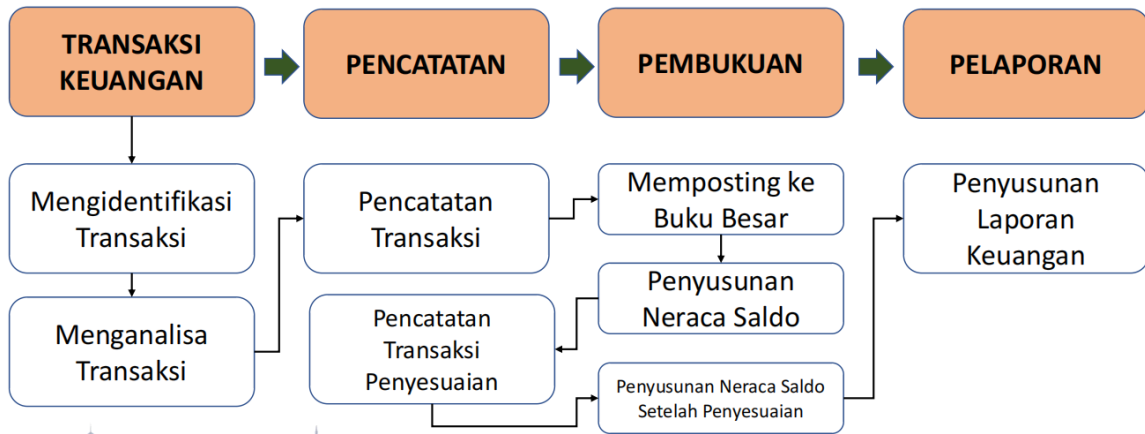
FUNGSI STRATEGIS

- ✓ PENATAAN ORGANISASI
- ✓ PENGEMBANGAN USAHA
- ✓ MENGGALANG DUKUNGAN



Alur Keuangan

MANUAL?




PENYEDERHANAAN PROSES

DENGAN SISTEM KEUANGAN





SKILL SETT #4 : PENCATATAN & PELAPORAN KEUANGAN




Laporan Neraca Keuangan

Node Acc	Account	Debet	Kredit	Nominal
12	1.1.00	ASSET		
13	1.1.00	ASSET LANCAR		
14	1.1.01	KAS		
15	1.1.01.01	Kas Besar	6.365.663	
16	1.1.01.02	Petty Cash		
17	1.1.01.03	Depositi Tiket		
18	1.1.02	BANK		
19	1.1.02.01	Bank BPD Kaltimcara		
20	1.1.02.02	Kas Besar Bank		
21	1.1.03	PIUTANG		
22	1.1.03.01	Piutang Usaha		
23	1.1.03.02	Piutang Jasa		
24	1.1.03.03	Piutang Karyawan		
25	1.1.04	PERSEDIAAN		
26	1.1.04.01	Persediaan Barang Dagang	261.285.530	
27	1.1.05	PERLENGKAPAN		
28	1.1.05.01	Perengkapan Kantor	7.200.000	
29	1.1.06	PAJAK DIBAYAR DI MUKA		
30	1.1.06.01	Pajak PPh Murnikan		
31	1.1.06.02	Pajak Dibayar Dimuka Pph 023		
32	1.1.07	BIAYA DIBAYAR DI MUKA		
33	1.1.07.01	Uang Muka/Finjaman Kepada Karyawan		
34	1.1.07.02	Uang Muka Pembelian		
35	1.1.07.03	Cash Advance		
36	1.1.07.04	Cashbon/Finjaman		
37	1.1.08	BAGI HASIL PROFIT BUMDES		
38	1.1.08.01	Dana Operasional	249.804	
39	1.1.08.02	Dana Sosial	601	
40	1.1.02.03	Kontribusi Pendapatan Asli Desa		
41	1.1.02.04	Bagi Hasil Pengurus Bumdes	9.393.041	
42	1.2.00	ASSET TIDAK LANCAR		
43	1.2.01	ASSET TETAP		
44	1.2.01.01	Tanah		
45	1.2.01.02	Bangunan	420.000.000	
46	1.2.01.03	Kendaraan		
47	1.2.01.04	Peralatan Kantor	13.000.000	

Laporan Neraca Keuangan Berisi informasi tentang asset, utang, dan modal yang dimiliki oleh BUMK dari awal tahun hingga akhir tutup buku pelaporan.

Jika dalam laporan neraca ini tidak terjadi keseimbangan antara asset dengan utang + Modal maka bisa dipastikan terdapat kesalahan. Sehingga dalam laporan neraca diwajibkan terjadi keseimbangan

SKILL SETT #4 : PENCATATAN & PELAPORAN KEUANGAN



LAPORAN NERACA KEUANGAN

ASET

- Kas XXX
- Bank XXX
- Piutang XXX
- Persediaan XXX
- Aset Tetap
 - Tanah XXX
 - Mobil XXX
 - Peralatan XXX
 - Perlkap XXX
- Aset lainnya XXX

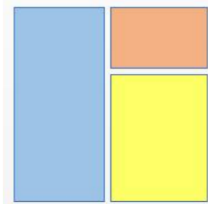
HUTANG

- Hutang usaha XXX
- Hutang Bank XXX
- Hutang lainnya XXX

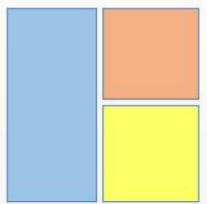
MODAL

- Modal Awal XXX
- Laba ditahan XXX
- Laba periode berjalan XXX

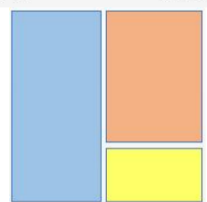
INDIKASI KONDISI KEUANGAN



SEHAT



NORMAL



KURANG SEHAT





Laporan Laba Rugi
Periode 31 desember 2022

LAPORAN LABA RUGI

4.1.00	PENDAPATAN USAHA
4.1.01	PENDAPATAN
4.1.01.01	Penjualan
4.1.01.02	Potongan Penjualan
4.1.01.03	Retur Penjualan
TOTAL PENDAPATAN USAHA	
5.0.00	HARGA POKOK PENJUALAN
5.1.00	HPP
5.2.00	HARGA POKOK BARANG DAGANG
5.2.02	Pembelian
5.2.03	Ongkos Pembelian Barang Dagangan
5.2.04	Discount Pembelian
5.2.05	Retur Pembelian
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	
(TOTAL PENDAPATAN - TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN)	
LABA KOTOR	
6.0.00	BIAYA
6.1.00	BIAYA USAHA
6.1.01	Biaya Umum Dan Administrasi
TOTAL BIAYA	
(TOTAL LABA KOTOR - TOTAL BIAYA)	
7.0.00	PENDAPATAN LAINNYA
7.1.01	PENDAPATAN DI LUAR USAHA
7.1.02	Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya
TOTAL PENDAPATAN LAINNYA	
8.0.00	BIAYA LAINNYA
8.1.01	BIAYA DI LUAR USAHA
8.1.02	Biaya Lain-Lain
TOTAL BIAYA LAINNYA	
(TOTAL PENDAPATAN LAINNYA - TOTAL BIAYA LAINNYA)	
(TOTAL PENDAPATAN USAHA + TOTAL PENDAPATAN DI LUAR USAHA)	
LABA BERSIH	

Laporan Laba / Rugi menggambarkan kinerja utama keuangan bagi BUMK. Laporan Laba / Rugi ini juga yang dijadikan dasar sebagai bagi hasil kepada pihak terkait dengan BUMK. Laporan Laba / Rugi ini terdiri dari Pendapatan, HPP, Biaya, Pendapatan di luar Usaha, dan Biaya di luar Usaha. Elemen Laporan Laba / Rugi ini akan ditutup setiap akhir periode yang biasanya terjadi pada 31 Desember

1.465.500



KOMPONEN LAPORAN LABA / RUGI

PENDAPATAN USAHA

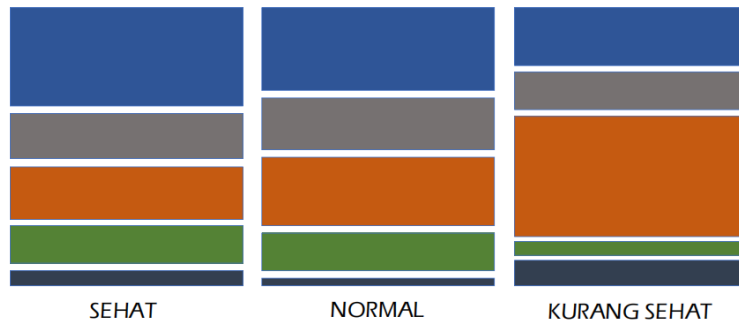
HPP

BIAYA

PENDAPATAN DILUAR USAHA

BIAYA DILUAR USAHA

INDIKASI
KINERJA
BISNIS
BUMK



KESIMPULAN

■ + ■ HARUS LEBIH BESAR DARIPADA ■ + ■



Laporan Arus Kas
Periode 31 desember 2022

A. ARUS KAS DARI OPERASIONAL

Penerima Kas dari Pelanggan		
4.1.01.01	Penjualan	643.342.000
4.1.01.02	Potongan Penjualan	
4.1.01.03	Retur Penjualan	
1.1.03.01	Piutang Usaha	42.233.000
1.1.03.03	Piutang Karyawan	
2.1.02.01	Utang PPN Keluaran	
2.1.04.01	Pendapatan Diterima Dimuka	
1.1.06.02	Pajak Dibayar Dimuka Pph 023	
Total Penerima Kas dari Pelanggan		685.575.000
Kas yang Dibayarkan ke Vendor		
2.1.01.01	Utang Usaha	57.340.000
2.1.02.01	Utang PPN Keluaran	
2.1.02.02	Utang PPh 21	
2.1.02.03	Utang PPh 23	
2.1.03.01	Utang Gaji/Upah	
5.1.00	HPP	20.000.000
5.2.02	Pembelian	528.318.500
1.1.07.02	Uang Muka Pembelian	
5.2.03	Ongkos Pembelian Barang Dagangan	300.000
5.2.04	Discount Pembelian	
5.2.05	Retur Pembelian	
1.1.04.01	Persediaan Barang Dagang	95.000.000
1.1.05.01	Perlengkapan Kantor	

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas akan memperlihatkan perubahan kas dari awal periode hingga akhir periode, dan terkategori dalam 3 hal.

1. Arus Kas dari Operasional
2. Arus Kas dari Investasi
3. Arus Kas dari Pendanaan

KAS MASUK > KAS KELUAR
CASHFLOW (+)

KAS MASUK < KAS KELUAR
CASHFLOW (-)



Laporan Perubahan Modal

Laporan Perubahan Modal akan menunjukkan pada BUMDesa terkait dengan Modal yang saat ini dikelola baik yang terdiri dari setoran modal dari pemerintah desa maupun dari sisa hasil usaha atau dari pihak lain seperti hibah.

Modal Akhir pada laporan perubahan modal ini digunakan untuk modal awal di periode berikutnya.

Laporan Perubahan Modal
Periode 31 desember 2022

PERUBAHAN MODAL

Modal (Awal) per 1 Januari 2022	620.000.000
Modal (Tambahan) untuk Tahun yang berakhir per 31 desember 2022	0
Pemupukan modal usaha per 1 Januari 2022	65.109.139
Saldo Laba Tahun Berjalan untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2022	
Saldo Laba Ditahan per 31 desember 2022	1.465.500
Modal Akhir	686.574.639

MODAL AKHIR NAIK
KINERJA (+)

MODAL AKHIR TURUN
KINERJA (-)



Pencatatan Keuangan

1. Pemasukan (Uang Masuk), baik tunai/ non tunai
Contoh : Pendapatan Jasa, Penjualan Barang
2. Pengeluaran (Uang Keluar), baik tunai/ non tunai
Contoh : Pembelian aset, Biaya Listrik, Biaya BBM, Gaji
3. Hutang/Piutang (Set Database Hutang/Piutang)
Contoh : Hutang Usaha, Piutang Usaha



MENGENAL DAFTAR AKUN DAN POSISINYA DALAM AKUNTANSI



**MANUAL BOOK APLIKASI KEUANGAN BERBASIS EXCEL
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK)
(Secara Permenkese PDTT No. 3 Tahun 2021)**

Berikut penjelasan dari account dan pos jurnal yang ada di sheet transaksi.
Setiap transaksi pasti terdiri dari debit dan kredit (karena harus balance/seimbang).
Apabila terjadi sebaliknya, maka saldo normal akan diubah kebalikannya.
Jadi pilihlah 2 account yang tersedia dalam tabel.

No	Kode	AKUN	Saldo Normal	Saldo Normal	Simulasi Kondisi	
					Debet (Bertambah)	Kredit (Bertambah)
1	1.2.01.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan	Total biaya penyusutan yang berjalan atas nilai bangunan.	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
2	1.2.01.07	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Total biaya penyusutan yang berjalan atas nilai kendaraan.	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
3	1.2.01.08	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	Total biaya penyusutan yang berjalan atas nilai peralatan kantor.	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
4	1.2.01.02	Bangunan	Gedung maupun bangunan-bangunan yang dimiliki perusahaan yang dimaksudkan untuk	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
5	1.1.02	Bank	Rekening yang dimiliki BUMK di bank	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
6	6.1.01.10	Biaya ATK Dan Fotocopy	Pembayaran atas pembelian ATK dan fotocopy.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
7	8.1.08	Biaya Bagi Hasil Investasi	Pembayaran yang dikeluarkan untuk bagi hasil kepada investor	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
8	8.1.05	Biaya Bonus Pengurus Bumdes/BUMK	Pembayaran untuk membayar bonus bagi para pengurus BUMDES/BUMK	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
9	8.1.07	Biaya Dana Operasional	Pengeluaran untuk membeli / membiayai sesuatu diambil dari dana operasional	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
10	8.1.06	Biaya Dana Sosial	Pengeluaran untuk membeli / membiayai sesuatu diambil dari dana sosial	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
11	6.1.01.13	Biaya Entertainment Dan Representasi	Pembayaran atas bentuk marketing.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
12	6.1.01.01	Biaya Gaji	Pembayaran gaji karyawan yang reguler bukan honor.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
13	6.1.01.08	Biaya Gas	Pembayaran atas pembelian gas yang digunakan untuk keperluan perusahaan.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
14	6.1.01.02	Biaya Insentif Dan Bonus	Pembayaran bonus atau insentif seperti THR, reward.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
15	6.1.01.09	Biaya Keamanan Dan Kebersihan	Pembayaran atas keamanan dan kebersihan.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang

**MANUAL BOOK APLIKASI KEUANGAN BERBASIS EXCEL
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK)
(Secara Permenkese PDTT No. 3 Tahun 2021)**

Berikut penjelasan dari account dan pos jurnal yang ada di sheet transaksi.
Setiap transaksi pasti terdiri dari debit dan kredit (karena harus balance/seimbang).
Apabila terjadi sebaliknya, maka saldo normal akan diubah kebalikannya.
Jadi pilihlah 2 account yang tersedia dalam tabel.

No	Kode	AKUN	Saldo Normal	Saldo Normal	Simulasi Kondisi	
					Debet (Bertambah)	Kredit (Bertambah)
16	8.1.04	Biaya Kontribusi Pendapatan Asli Desa	Pembayaran yang dikeluarkan untuk bagi hasil kepada desa/kampung	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
17	8.1.02	Biaya Lain-Lain	Pembayaran untuk pengeluaran di luar usaha lainnya	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
18	6.1.01.07	Biaya Listrik Dan Air	Pembayaran listrik dan air.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
19	6.1.01.03	Biaya Makan	Pembayaran konsumsi terhadap karyawan ataupun pekerja lepas.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
20	6.1.01.04	Biaya Medis	Pembayaran kesehatan yang meliputi perawatan, pembelian obat.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
21	6.1.01.16	Biaya Operasional Lainnya	Pembayaran atas semua keperluan operasional perusahaan lainnya.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
22	6.1.01.17	Biaya Penyusutan Bangunan Kantor	Pengakuan penyusutan atas bangunan kantor.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
23	6.1.01.18	Biaya Penyusutan Kendaraan	Pengakuan penyusutan atas kendaraan.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
24	6.1.01.19	Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	Pengakuan penyusutan atas peralatan kantor.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
25	6.1.01.05	Biaya Perjalanan Dinas	Pembayaran perjalanan untuk urusan perusahaan.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
26	6.1.01.11	Biaya Perlengkapan	Pembayaran atas pembelian perlengkapan lainnya.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
27	6.1.01.12	Biaya Servis Dan Pemeliharaan	Pembayaran atas segala servis dan pemeliharaan.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
28	6.1.01.15	Biaya Sewa	Pengeluaran untuk sewa	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
29	6.1.01.14	Biaya Telepon Dan Internet	Pembayaran atas penggunaan telepon dan internet dalam perusahaan.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
30	6.1.01.06	Biaya Transportasi, BBM, Tol Dan Parkir	Pembayaran atas pengeluaran yang ditujukan untuk transportasi, BBM, tol, dan parkir.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang





**MANUAL BOOK APLIKASI KEUANGAN BERBASIS EXCEL
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK)
(Sesuai Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021)**

Berikut penjelasan dari account dan pos jurnal yang ada di sheet transaksi. Setiap transaksi pasti terdiri dari debit dan kredit (karena harus *balance/seimbang*). Jadi pilihan 2 account yang tersedia dalam tabel. Apabila terjadi sebaliknyanya, maka saldo normal akan diubah kebalikannya.

No	Kode	AKUN	Saldo Normal	Saldo Normal	Simulasi Kondisi	
					Debet (Bertambah)	Kredit (Bertambah)
31	5.2.04	Discount Pembelian	Potongan atau <i>discount</i> atas pembelian yang terjadi.	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
32	3.1.01.03	Hibah Pihak Ke-3	Pemberian suatu asset dari pihak ke-3	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
33	5.1.00	HPP	Total yang dikeluarkan selama proses penjualan (<i>total penjualan - total</i>)	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
34	3.1.01.02	Investasi	Suatu modal berupa asset yang diharapkan mendapatkan bagi hasil kedepannya berasal	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
35	1.1.01.01	Kas Besar	Sejumlah dana yang sudah disiapkan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
36	1.2.01.03	Kendaraan	Aset jangka panjang, masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun dan pasti ada	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
37	1.2.01.05	Mesin	sejumlah mesin yang digunakan untuk menunjang penjualan	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
38	3.1.01.01	Modal Disetor	Jumlah uang yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham.	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
39	5.2.03	Ongkos Pembelian Barang Dagangan	Biaya ongkos pengiriman atas pembelian yang terjadi.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
40	1.1.06.01	Pajak PPN Masukan	Pajak yang harus dikeluarkan oleh BUMDES/BUMK	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
41	5.2.02	Pembelian	Suatu sistem yang digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
42	7.1.02	Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya	Pendapatan yang di dapat dari perusahaan yang di luar usaha perusahaan.	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
43	2.1.04.01	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan yang telah diperoleh dan usaha yang harus dilakukan di masa depan	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
44	4.1.01.01	Penjualan	Pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
45	1.2.01.04	Peralatan Kantor	Suatu alat ataupun bisa berbentuk tempat yang gunanya untuk mendukung berjalannya	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang

Page 29

**MANUAL BOOK APLIKASI KEUANGAN BERBASIS EXCEL
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK)
(Sesuai Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021)**

Berikut penjelasan dari account dan pos jurnal yang ada di sheet transaksi. Setiap transaksi pasti terdiri dari debit dan kredit (karena harus *balance/seimbang*). Jadi pilihan 2 account yang tersedia dalam tabel. Apabila terjadi sebaliknyanya, maka saldo normal akan diubah kebalikannya.

No	Kode	AKUN	Saldo Normal	Saldo Normal	Simulasi Kondisi	
					Debet (Bertambah)	Kredit (Bertambah)
46	1.1.05.01	Perlengkapan Kantor	Istilah generik yang mengacu pada semua perlengkapan yang umumnya digunakan di	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
47	1.1.04.01	Persediaan Barang Dagang	Persediaan barang dagangan yang digunakan untuk dijual kembali	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
48	1.1.01.02	Petty Cash	Dana yang dikeluarkan oleh perusahaan secara rutin dengan jumlah yang kecil.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
49	1.1.03.01	Piutang Usaha	Hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang dari transaksi penjualan barang /jasa.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
50	4.1.01.02	Potongan Penjualan	Potongan yang diberikan atas pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
51	5.2.05	Retur Pembelian	Pengembalian barang atas pembelian yang dilakukan.	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
52	4.1.01.03	Retur Penjualan	Pengembalian barang atas pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
53	3.1.02.01	Saldo Laba Ditahan	Laba atau rugi perusahaan sebelum dibagikan kepada pemodal.		Kondisi Rugi	Kondisi Laba
54	1.2.01.01	Tanah	tanah yang diperoleh BUMDES/BUMK berasal dari usaha BUMDES/BUMK	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
55	1.1.07.02	Uang Muka Pembelian	uang muka atas pembelian	Debit	Nilai Akun bertambah	Nilai Akun berkurang
56	2.1.03.02	Utang BPJS Kesehatan/ Ketenagakerjaan	utang yang wajib dibayarkan oleh BUMDES/ BUMK atas tagihan BPJS	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
57	2.1.03.01	Utang Gaji/Upah	utang yang wajib dibayarkan oleh BUMDES/ BUMK atas gaji yang belum dibayarkan	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
58	2.1.04.02	Utang lain-lain	utang yang wajib dibayarkan oleh BUMDES/ BUMK atas biaya di luar usaha	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
59	2.1.02.01	Utang PPN Keluaran	utang yang wajib dibayarkan oleh BUMDES/ BUMK atas Pajak	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah
60	2.1.01.01	Utang Usaha	utang yang wajib dibayarkan oleh BUMDES/ BUMK atas usaha	Kredit	Nilai Akun berkurang	Nilai Akun bertambah





ysid.or.id

**MANUAL BOOK APLIKASI KEUANGAN BERBASIS EXCEL
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK)
(Sesuai Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021)**

CARA PENGISIAN PADA SHEET TRANSAKSI

Berikut penjelasan dari account dan pos jurnal yang ada di sheet transaksi.
Setiap transaksi pasti terdiri dari debit dan kredit (karena harus *balance/seimbang*).
Jadi pilihlah 2 account yang tersedia dalam tabel.
Apabila terjadi sebaliknya, maka saldo normal akan diubah kebalikannya.

BUMK WIGUNA

Bank	3.000.000		Pembelian	3.755.000		Polongon Penjualan	0
Kas	645.000	MATCH	Donglos Pembelian Barang Dagangan	0		Retur Penjualan	0
Piutang	4.000.000		Discount Pembelian	0		TAHUN 2022	
Utang Usaha	90.000.000		Retur Pembelian	0			
Persediaan Barang Dagang	0		Penjualan	170.000			

Tanggal	Bulan	Tahun	KD Trx	Rer	Siklus	Keterangan	DEBIT	KREDIT	Piutang Baru	Pembayaran Piutang Usaha	Hutang	JUMLAH
26	Mei	2022				wang masuk						3.755.000
27	Mei	2022				Pembelian ATK Untuk Dijual Kembali						170.000
27	Mei	2022				wang masuk						50.000
28	Mei	2022				Penjualan Barang ATK						280.000
28	Mei	2022				wang keluar						
29	Mei	2022				FC DAN BELI METERAI						
29	Mei	2022				wang keluar						
29	Mei	2022				Cuci Cetak Foto						

Klik dropdown

Apabila ada piutang/hutang Wajib ditulis KD Trx (bebas) biasanya kalau Piutang diawali Huruf P dan hutang H. Dan apabila ada cicilan/pelunasan ditulis sesuai KD Trx pada saat awal Piutang

Indikator benar atau salah Dalam penginputan bila salah "0"

pilih Nama Piutang

pilih nama piutang yang melakukan Cicilan/pelunasan

Pilih nama hutang Untuk awal hutang dan cicilan/pelunasan

Dipilih sesuai transaksi yang terjadi dan pilihlah sesuai tabel di atas





Logo BUMK Silian Jaya – Kampung Bohe Silian

Logo Guideline

BUMK SILIAN JAYA

by  Sanggar
Inovasi Desa



Gurita/*octopus*

Maratua dengan ragam kekayaan dan keindahan sumber daya lautnya menjadikannya memiliki berbagai spot diving yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi Maratua. Gurita menjadi salah satu dari ragam biota-laut yang ada di Maratua.

Terumbu karang/*coral reefs*

Maratua sebagai salah satu surganya biota-laut Indonesia harus terus berupaya menjaga kelestarian ragam terumbu karang yang ada. Selain keindahannya sebagai spot snorkeling, hal ini mengingat terumbu karang dapat menjadi tempat berlindung yang baik bagi ikan-ikan dan hewan-hewan laut.





Mockups - tshirt



Mockups - others





Logo Wisata Kehe Daing – Kampung Payung Payung

Logo Guideline

KEHE DAING

by  Sanggar
Inovasi Desa

Lubang/kehe

Bentuk setengah lingkaran yang abstrak dapat dimaknai sebagai laguna dan juga lubang. Laguna berwarna biru sebagai pesona panorama yang ditawarkan Kehe Daing. Sedangkan lubang atau dalam bahasa Bajau disebut sebagai "Kehe" adalah lubang atau goa kecil yang merupakan tempat keluar masuknya ikan pada terumbu karang.



Ikan/fish/daing

Logo ikan yang dalam bahasa Bajau disebut "Daing" ini merepresentasikan kedalaman dan keberagaman kehidupan bawah laut yang menjadi salah satu kekayaan Indonesia, khususnya Maratua. Ikan yang hidup di sekitar terumbu karang selalu berjuang untuk bertahan hidup di tengah arus yang kadang sangat kuat dan kondisi lingkungan yang sulit. Sehingga, logo ikan juga diartikan sebagai simbol kemandirian, ketangguhan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Hal ini selaras dengan proses perjuangan Kehe Daing untuk menjadi obyek wisata yang dapat dinikmati banyak orang seperti sekarang.

Terumbu karang/coral reefs

Maratua sebagai salah satu surganya biota-laut Indonesia harus terus berupaya menjaga kelestarian ragam terumbu karang yang ada. Selain panorama laguna yang indah, Kehe Daing juga menawarkan beberapa sport terumbu karang yang cantik dan masih cukup terjaga. Selain keindahannya sebagai spot snorkeling, hal ini mengingat terumbu karang dapat menjadi tempat berlindung yang baik bagi ikan-ikan dan hewan-hewan laut.



KEHE DAING





PPT Catatan Perjalanan Kampung Sumber Agung



**MELAMPAUI KETERBATASAN :
INOVASI DAN KOLABORASI DALAM
MEWUJUDKAN DESA MANDIRI**

Catatan Perjalanan Kampung Sumber Agung,
Batu Putih, Berau, Kalimantan Timur.



PEJUANG
SIGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Sanggar
Inovasi Desa